



Rencana Strategis

2020- 2024



KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyusun Rencana Strategis (Renstra) Balai Besar Wilayah Sungai Citarum Tahun 2020-2024. Penyusunan Dokumen Rencana Strategis ini, mengacu pada Surat Edaran Dirjen SDA Nomor: 07/SE/D/2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Tahun 2020-2024 dan

Permen PUPR Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian PUPR Tahun 2020-2024. Dokumen Renstra ini disusun sebagai acuan dasar dalam pemrograman kegiatan di Tahun 2020-2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya air yang dimiliki Balai Besar Wilayah Sungai Citarum berdasarkan Dokumen Pola dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air yang telah ditetapkan sebelumnya.

Besar harapan kami kiranya Rencana Strategis ini bisa mendapatkan dukungan sumberdaya yang memadai sehingga dapat terimplementasi dengan baik sesuai indikasi target kinerja yang telah ditetapkan serta sekaligus juga dapat memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan layanan pengelolaan sumber daya air khususnya bagi stakeholders lingkup Wilayah Sungai Citarum sebagai bagian dari upaya kolektif untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera.

Bandung, 20 November 2020

Balai Besar Wilayah Sungai Citarum

Kepala,



Anang Muchlis
Ir. Anang Muchlis, Sp.PSDA
NIP. 196511211997031001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
I. PENDAHULUAN.....	1
I.1 Kondisi Umum	1
I.1.1. Gambaran Umum Wilayah Sungai Citarum	3
I.1.2. Daerah Aliran Sungai di Wilayah Sungai Citarum	4
I.1.3. Topografi.....	5
I.2 Identifikasi Capaian Renstra 2015 – 2019.....	8
I.3 Identifikasi Kendala Dalam Pencapaian Renstra 2015-2019.....	12
I.4 Tinjauan Terhadap Dokumen Pola dan Rencana PSDA WS Citarum	14
I.4.1. Matriks Dasar Upaya Fisik dan Non Fisik.....	14
I.4.2. Kondisi Infrastruktur SDA yang Sudah Terpasang dan Kinerjanya	19
I.4.3. Potensi Pengembangan SDA.....	20
I.4.4. Neraca Ketersediaan dan Kebutuhan Air	23
I.5 Realisasi Pendanaan pada Periode Renstra Sebelumnya.....	25
I.6 Potensi dan Permasalahan	26
I.6.1. Potensi Sumber Daya Air di WS Citarum.....	26
I.6.2. Permasalahan Sumber Daya Air di WS Citarum	28
I.6.3. Analisis Lingkungan Strategis	30
I.6.3.1. Analisis Lingkungan Internal (Kekuatan dan Kelemahan)	31



I.6.3.2.	Analisis Lingkungan Eksternal (Peluang dan Tantangan).....	34
II.	TUJUAN DAN SASARAN	39
II.1	Intemalisasi Visi dan Misi Kementerian PUPR	39
II.1.1.	Visi	39
II.1.2.	Misi.....	39
II.2	Tujuan dan Sasaran Kementerian PUPR.....	40
II.2.1.	Tujuan.....	40
II.2.2.	Sasaran	41
II.3	Tujuan dan Sasaran Direktorat Jenderal SDA.....	41
II.3.1.	Tujuan.....	41
II.3.2.	Sasaran	42
II.4	Tujuan dan Sasaran Balai Besar Wilayah Sungai Citarum	44
II.4.1.	Tujuan.....	44
II.4.2.	Sasaran	45
III.	ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI	47
III.1	Arah Kebijakan dan Strategis Kementerian PUPR	47
III.1.1.	Arah Kebijakan dan Strategi Sektor Sumber Daya Air... ..	47
III.1.2.	Arah Kebijakan dan Strategi Lintas Sektor	51
III.2	Arah Kebijakan dan Strategis Direktorat Jenderal SDA	53
III.2.1.	Arah Kebijakan Umum Direktorat Jenderal SDA.....	53
III.2.2.	Strategi Operasional Direktorat Jenderal SDA	55
III.2.3.	Strategi Pendukung Direktorat Jenderal SDA.....	64
III.3	Arah Kebijakan dan Strategi Balai Besar Wilayah Sungai Citarum	68
III.3.1.	Arah Kebijakan Balai Besar Wilayah Sungai Citarum	68
III.3.2.	Strategi Balai Besar Wilayah Sungai Citarum	81



III.4	Kerangka Regulasi.....	84
III.5	Kerangka Kelembagaan.....	87
IV.	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	93
IV.1	Target Kinerja.....	93
IV.2	Kerangka Pendanaan	94
IV.3	Identifikasi Resiko.....	95
V.	PENUTUP	98



DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1. Peta Wilayah Sungai Citarum	2
Gambar I.2. Peta Rencana Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat	4
Gambar I.3. Peta Topografi Wilayah Sungai Citarum	7
Gambar I.4. Capaian Penyediaan Air Baku 2015 – 2019 di WS. Citarum	9
Gambar I.5. Capaian Infrastruktur Penanganan Bencana 2015-2019 di WS. Citarum	10
Gambar I.6. Capaian Pembangunan Irigasi Air Tanah dan Irigasi Tambak	11
Gambar I.7. Capaian Rehabilitasi Irigasi Tahun 2015 – 2019 di WS. Citarum....	12
Gambar I.8. Kondisi Daerah Irigasi WS Citarum	20
Gambar I.9. Modernisasi Irigasi DI. Jatiluhur Loan SIMURP (2020 – 2024)	22
Gambar I.10. Pendanaan pada Peride Renstra Sebelumnya	26
Gambar I.11. Potensi Sumber Daya Air di WS. Citarum	27
Gambar I.12. Penggunaan Sumber Daya Air di WS. Citarum.....	27
Gambar I.13. Diagram <i>SWOT</i> di WS. Citarum.....	38
Gambar III.1. Rencana Target Penyelesaian 46 Bendungan.....	59
Gambar III. 2 Peta Strategi Balai Besar Wilayah Sungai Citarum	83
Gambar III.3. Presentase Jumlah Pegawai BBWS Citarum Berdasarkan Status Kepegawaian.....	90
Gambar III.4. Presentase Jumlah Pegawai BBWS Citarum Berdasarkan Golongan	90
Gambar III.5. Presentase Jumlah Pegawai BBWS Citarum Berdasarkan Level Pendidikan.....	91
Gambar III.6. Struktur Organisasi Balai Besar Wilayah Sungai Citarum	92
Gambar IV.1. Kebutuhan Pendanaan BBWS Citarum 2020-2024	95



DAFTAR TABEL

Tabel I.1. Cakupan WS Citarum berdasarkan Provinsi dan Kabupaten/Kota	1
Tabel I.2. Daftar DAS Wilayah Sungai Citarum	5
Tabel I.3. Upaya Fisik Aspek Konservasi Sumber Daya Air	15
Tabel I.4. Upaya Non Fisik Aspek Konservasi Sumber Daya Air	15
Tabel I.5. Upaya Fisik Aspek Pendayagunaan Sumber Daya Air	16
Tabel I.6. Upaya Non Fisik Aspek Pendayagunaan Sumber Daya Air	16
Tabel I.7. Upaya Fisik Aspek Pengendalian Daya Rusak Air	17
Tabel I.8. Upaya Non Fisik Aspek Pengendalian Daya Rusak Air	17
Tabel I.9. Upaya Fisik dan Non Fisik Aspek SISDA	18
Tabel I.10. Upaya Fisik dan Non Fisik Aspek Pemberdayaan Masyarakat.....	18
Tabel I.11. Infrastruktur Eksisting Tampung Air di WS Citarum.....	19
Tabel I.12. Daerah Irigasi Kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai Citarum ...	20
Tabel I.13. Potensi Bendungan Di Wilayah Sungai Citarum	21
Tabel I.14. Luasan Tambak Eksisting dan Potensi di WS. Citarum.....	23
Tabel I.15. Potensi Ketersediaan Air dan Kebutuhan Air.....	24
Tabel I.16. Perbandingan Ketersediaan dan Kebutuhan Air Provinsi Jawa Barat	25
Tabel II.1. Sasaran Kegiatan Balai Besar Wilayah Sungai Citarum.....	45
Tabel II.2. Peta Sasaran Kegiatan Balai Besar Wilayah Sungai Citarum.....	46
Tabel III.1. Pemilihan Kebijakan berdasarkan Urgensi Penanganan – BBWS Citarum.....	69
Tabel III.2. Matriks Kerangka Regulasi.....	85
Tabel III.3. Sejarah Pembentukan Organisasi Balai Besar Wilayah Sungai Citarum	88
Tabel III.4. Komposisi SDM di Lingkungan Balai Besar Wilayah Sungai Citarum	89
Tabel IV.1. Identifikasi Resiko Pencapaian Target Renstra Balai Besar Wilayah Sungai Citarum	96



DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1 MATRIK RENCANA PROYEK 2020-2024 DENGAN TARGET (OUTPUT DAN OUTCOME) DAN PERKIRAAN KEBUTUHAN PENDANAAN
- LAMPIRAN 2 MATRIK KINERJA DAN PENDANAAN
- LAMPIRAN 3 MATRIK KERANGKA REGULASI
- LAMPIRAN 4 INFORMASI SPASIAL YANG MEMUAT PETA-PETA ANTARA LAIN :
- Peta Wilayah Sungai dan Badan Air WS Citarum
 - Peta Daerah Aliran Sungai WS Citarum
 - Peta Daerah Rawan Banjir WS Citarum
 - Peta Rawan Kekeringan WS Citarum
 - Peta Rawan Longsor WS Citarum
 - Peta Zona Rawan Bencana WS Citarum
 - Peta Lokasi Infrastruktur SDA Eksisting WS Citarum
 - Peta Lokasi Daerah Irigasi WS Citarum
 - dan Peta Ketersediaan Air Provinsi Jawa Barat.
- LAMPIRAN 5 INFORMASI LAINNYA YANG MEMUAT HAL-HAL YANG DIANGGAP PENTING OLEH BBWS/BWS YANG HARUS MENJADI BAGIAN DARI RENSTRA BBWS/BWS



BAB I PENDAHULUAN

I.1 Kondisi Umum

Wilayah Sungai Citarum ditetapkan sebagai Wilayah Sungai Strategis Nasional berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai dengan kode WS: 02.06.A3 dan luas 1.132.334 ha.

Seluruh Wilayah Sungai Citarum berada di wilayah administrasi Provinsi Jawa Barat, meliputi 10 (sepuluh) Kabupaten dan 2 (dua) Kota dapat dilihat pada Tabel 1.1. berikut ini:

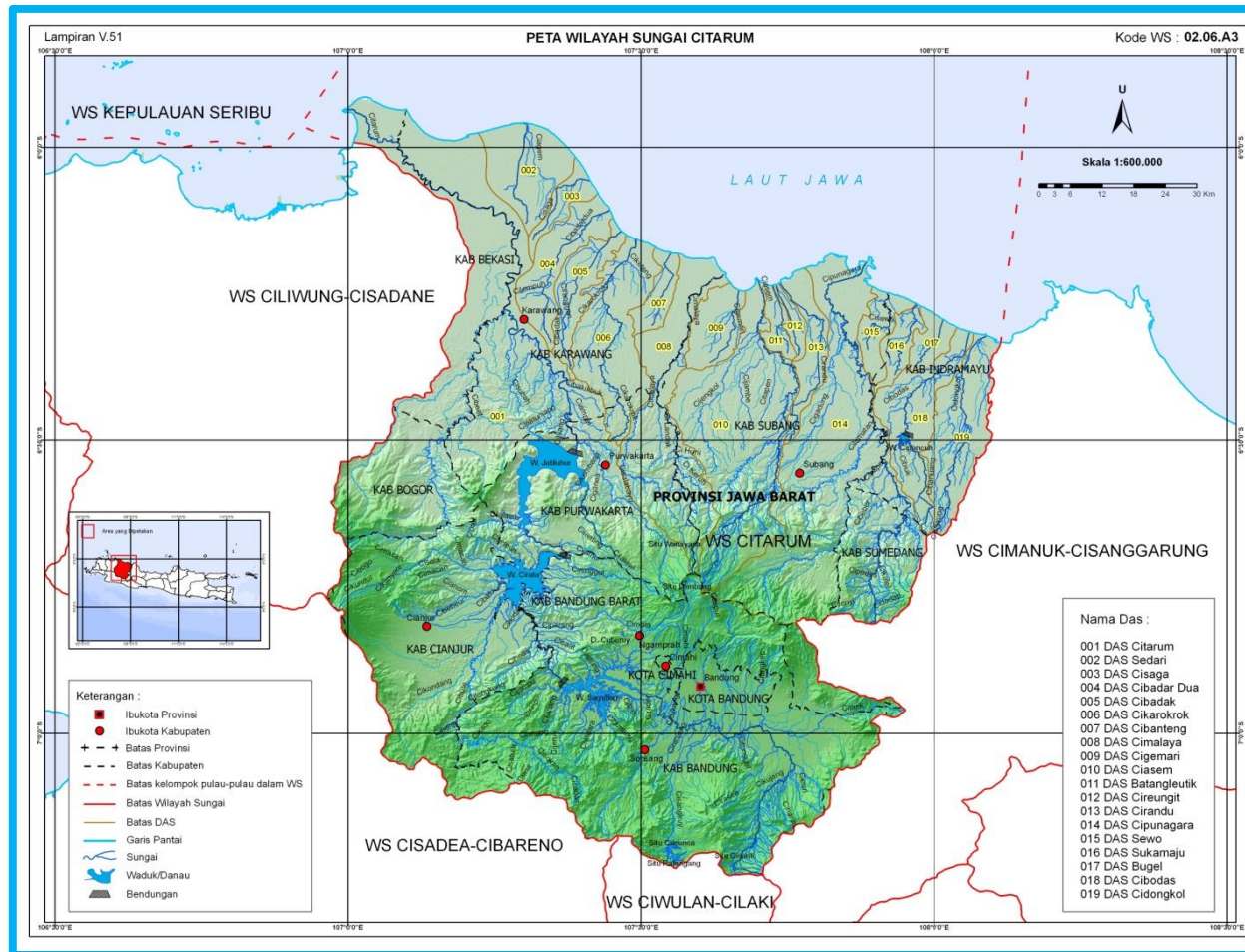
Tabel I.1. Cakupan WS Citarum berdasarkan Provinsi dan Kabupaten/Kota

Wilayah Sungai	Provinsi Jawa Barat	
	Kabupaten	Kota
Citarum	1 Cianjur	1 Bandung
	2 Bandung	2 Cimahi
	3 Sumedang	
	4 Indramayu	
	5 Subang	
	6 Purwakarta	
	7 Karawang	
	8 Bekasi	
	9 Bandung Barat	
	10 Bogor	

Sumber : Peraturan Menteri PUPR Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai



RENCANA STRATEGIS
BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CITARUM
TAHUN 2020-2024



Sumber: Peraturan Menteri PUPR Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai
Gambar I.1. Peta Wilayah Sungai Citarum



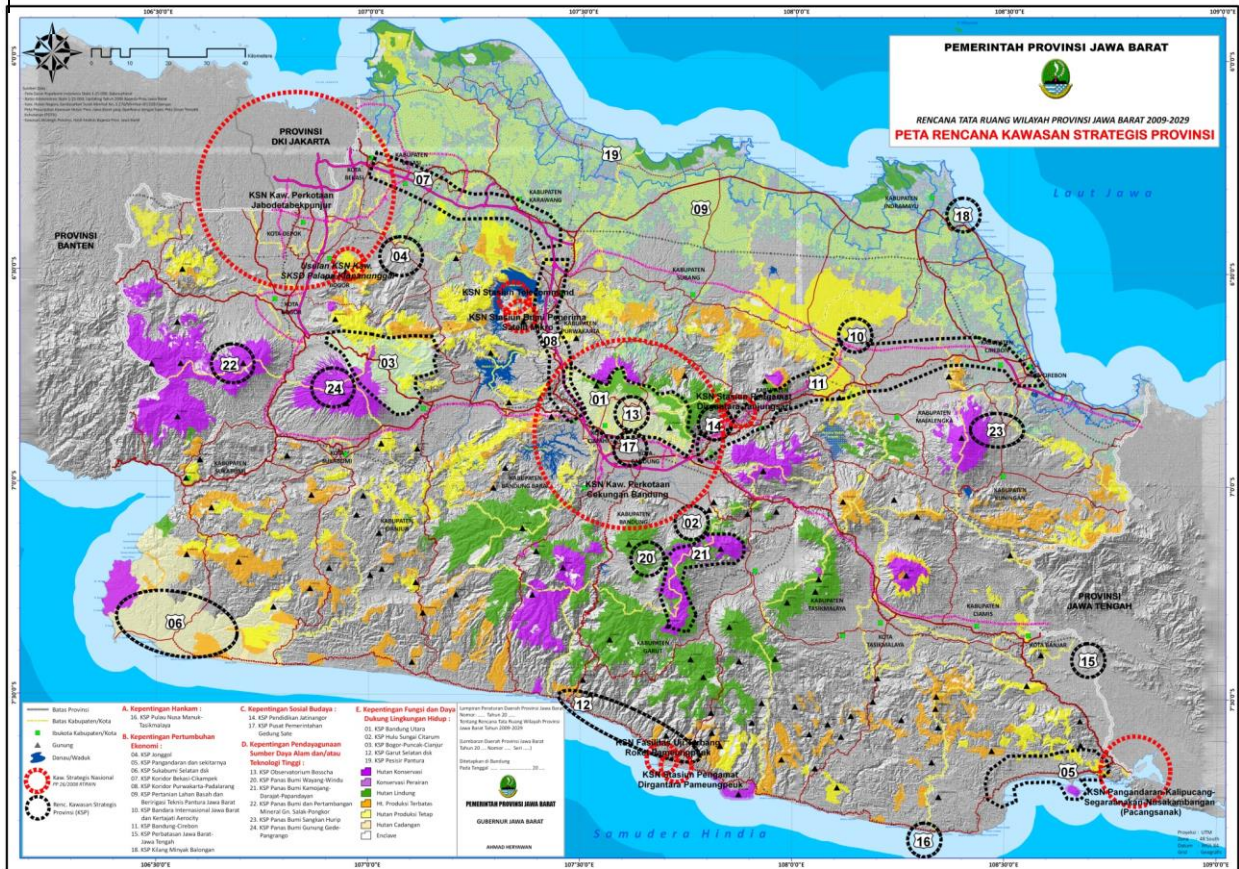
I.1.1. Gambaran Umum Wilayah Sungai Citarum

Wilayah Sungai (WS) Citarum secara geografis berada pada $106^{\circ} 51'36''$ - $107^{\circ} 51'$ BT dan $7^{\circ} 19' - 6^{\circ} 24'$ LS, dengan batas-batas sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Laut Jawa,
2. Sebelah Timur : WS Cimanuk-Cisanggarung,
3. Sebelah Selatan : WS Ciwulan-Cilaki dan WS Cisadea Cibareno,
4. Sebelah Barat : WS Ciliwung-Cisadane.

Wilayah Sungai Citarum mempunyai luas 11.323,34 km² atau 32,01% dari luas Provinsi Jawa Barat (35.374,38 km²). Berdasarkan PP No 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Wilayah Sungai Citarum mempunyai 2 Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan 4 (empat) Kawasan Andalan (KA) sebagai berikut

1. Kawasan Strategis Nasional
 - a. Kawasan Perkotaan JABODETABEKPUNJUR (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur)
 - b. Cekungan Bandung (Kota Bandung, Kota Cimahi, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kab. Sumedang)
2. Kawasan Andalan
 - a. Bogor-Puncak-Cianjur
 - b. Purwakarta-Subang-Karawang
 - c. Kawasan Strategis Provinsi (KSP)
 - 1) KSP Sukabumi dan sekitarnya termasuk penanganan Geopark Ciletuh
 - 2) KSP BIJB dan *Aerocity*
 - d. Kawasan Patimban / Segitiga Rebana



Gambar I.2. Peta Rencana Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat

I.1.2. Daerah Aliran Sungai di Wilayah Sungai Citarum

Sungai Citarum mengalir dari hulu yang berada di daerah Gunung Wayang, di sebelah Selatan Kota Bandung, menuju ke Utara dan bermuara di Laut Jawa dengan panjang sekitar 297 km. Citarum merupakan sungai terpanjang dan terbesar di Provinsi Jawa Barat. Sungai Citarum mempunyai peran yang sangat penting bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat khususnya di Jawa Barat dan DKI Jakarta. Air Sungai Citarum digunakan sebagai sumber air baku, irigasi pertanian, perikanan, sumber bagi pembangkit tenaga listrik tenaga air untuk pasokan Pulau Jawa dan Bali, serta sebagai pemasok air untuk kegiatan industri.

Wilayah Sungai Citarum berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai terdiri dari 19 DAS dapat dilihat pada **Tabel 1.2** sebagai berikut:



Tabel I.2. Daftar DAS Wilayah Sungai Citarum

No	Nama DAS ¹⁾	Luas DAS (Km ²) ²⁾	Panjang Sungai (Km) ²⁾
1	Citarum	6617,00	297
2	Sedari	232,10	23,17
3	Cisaga	69,01	19,36
4	Cibadar Dua	195,20	34,37
5	Cibadak	147,30	35,11
6	Cikarokrok	364,50	59,46
7	Cibanteng	74,72	17,58
8	Cimalaya	522,30	91,8
9	Cigemari	127,70	18,26
10	Ciasem	734,10	98,59
11	Batangleuting	49,14	16,13
12	Cireungit	36,29	16,21
13	Cirandu	128,60	45,38
14	Cipunagara	1284,00	137
15	Sewo	87,97	21,28
16	Sukamaju	68,54	21,19
17	Bugel	64,25	13,69
18	Cibodas	262,20	71,6
19	Cidongkol	291,90	59,04
Jumlah		11.323,34	

Keterangan ¹⁾ = Permen PUPR No. 4/PRT/M/2015, ²⁾ = Analisis spasial peta DEM.

I.1.3. Topografi

Topografi Wilayah Sungai Citarum digambarkan dalam bentuk lahan atau morfologi yang dibagi dalam 3 bagian, yaitu bagian hulu, tengah dan hilir.

1. Wilayah Sungai Citarum bagian hulu nampak seperti cekungan raksasa yang lebih dikenal sebagai Cekungan Bandung, dengan elevasi berkisar antara 625-2.600 meter diatas permukaan air laut (mdpl). Wilayah Sungai Citarum bagian hulu dikelilingi oleh daerah pegunungan dan perbukitan, yaitu antara lain:



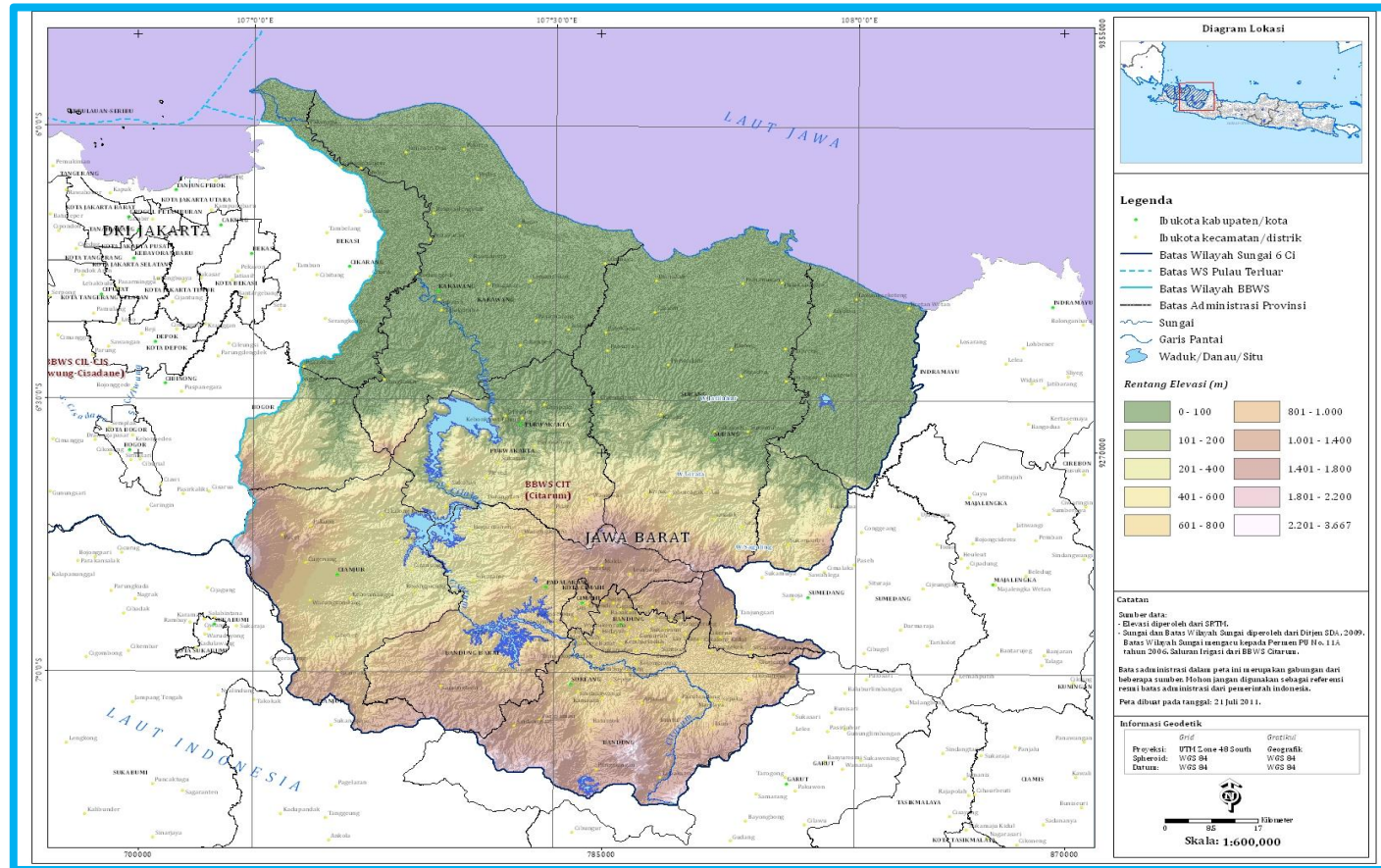
- a. Bagian Utara terdapat Gunung Tangkuban Perahu
 - b. Bagian Timur terdapat Gunung Munggang dan Gunung Mandalawangi
 - c. Bagian Selatan terdapat Gunung Malabar, Puncak Besar, Puntang, Haruman, Gunung Tilu, Gunung Tikukur dan Gunung Guha.
 - d. Bagian Barat terdapat punggung-punggung gunung yang tidak beraturan
2. Wilayah Sungai Citarum bagian tengah morfologi bervariasi antara dataran (elevasi 250-400 mdpl), perbukitan bergelombang lemah (elevasi 200-800 mdpl), perbukitan terjal (elevasi 1.400-2400 mdpl) dan morfologi tubuh gunung api.
 3. Wilayah Sungai Citarum bagian hilir lebih didominasi oleh dataran, perbukitan bergelombang lemah dan terjal dengan variasi elevasi antara 200-1.200 mdpl.

Seluruh sungai di Wilayah Sungai Citarum mengalir dari selatan ke arah utara yang bermuara di pantai utara (Laut Jawa). Sebagian Daerah Aliran Sungai (DAS) di Wilayah Sungai Citarum masuk dalam 2 (dua) kawasan metropolitan, yaitu:

1. Kawasan metropolitan Jabodetabek di bagian utara yaitu pada dataran rendah dengan ketinggian 0-100 mdpl, dan
2. Kawasan metropolitan Cekungan Bandung berada di bagian selatan (dataran tinggi) pada ketinggian di atas 100 mdpl.



RENCANA STRATEGIS
BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CITARUM
TAHUN 2020-2024



Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2011

Gambar I.3. Peta Topografi Wilayah Sungai Citarum



I.2 Identifikasi Capaian Renstra 2015 – 2019

Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting dalam menentukan capaian target RPJPN. Namun di sisi lain, target penyusunan Renstra 2020-2024 tidak dapat dilepaskan dari capaian yang diperoleh pada periode implementasi Renstra 2015-2019. Evaluasi kinerja dan capaian Renstra periode sebelumnya menjadi pertimbangan dalam Renstra yang berikutnya, apakah capaian sudah sesuai dengan target atau belum. Program-program yang masih belum memenuhi target menjadi prioritas untuk diselesaikan pada Renstra berikutnya.

Realisasi kinerja BBWS Citarum secara kumulatif tidak dapat memenuhi target Rencana Strategisnya untuk jangka waktu yang sama. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa factor penentu seperti estimasi target Renstra yang disusun terlalu optimis tetapi dengan dengan dukungan basis data yang terbatas. Hal ini juga menyebabkan kendala dalam mengkalkulasikan kebutuhan nyata pembangunan sumber daya air.

1. Pengelolaan Air Baku Bekelanjutan

Untuk meningkatkan layanan air baku bagi kebutuhan rumah tangga, industri, dan perkotaan, pada tahun 2015-2019 telah dibangun jaringan air baku dengan kapasitas layanan $1.65 \text{ m}^3/\text{det}$, yang belum memenuhi target penambahan kapasitas yang direncanakan sebesar $15.6 \text{ m}^3/\text{det}$ sehingga terjadi deviasi negatif sebesar $13.95 \text{ m}^3/\text{det}$.

Pelayanan air baku untuk air bersih saat ini masih dihadapkan pada beberapa tantangan terkait kuantitas dan kualitas air. Peningkatan jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi menuntut ketersediaan air yang terus meningkat. Sedangkan ketersediaan air melalui sumber air permukaan masih terbatas, menyebabkan timbulnya pemanfaatan air tanah berlebihan di beberapa wilayah. Hal ini kemudian memicu terjadinya penurunan muka air tanah dan intrusi air laut.

Selain itu sumber-sumber air permukaan dihadapkan dengan isu sedimentasi yang tidak hanya mempengaruhi kuantitas tetapi kualitas dari itu sendiri.



Sedimentasi terjadi dipengaruhi adanya perubahan fungsi lahan terutama pada bagian hulu. Kualitas air pada air permukaan juga dipengaruhi dengan adanya pencemaran yang bersumber pada kegiatan masyarakat, perkotaan maupun industry.

Kedepan, tantangannya tidak hanya pada bagaimana menyediakan air baku yang cukup tetapi juga pada pemenuhan kualitas air baku yang aman digunakan untuk masyarakat sesuai dengan standar baku mutu yang telah ditetapkan.



Gambar I.4. Capaian Penyediaan Air Baku 2015 – 2019 di WS. Citarum

2. Infrastruktur Penanganan Bencana

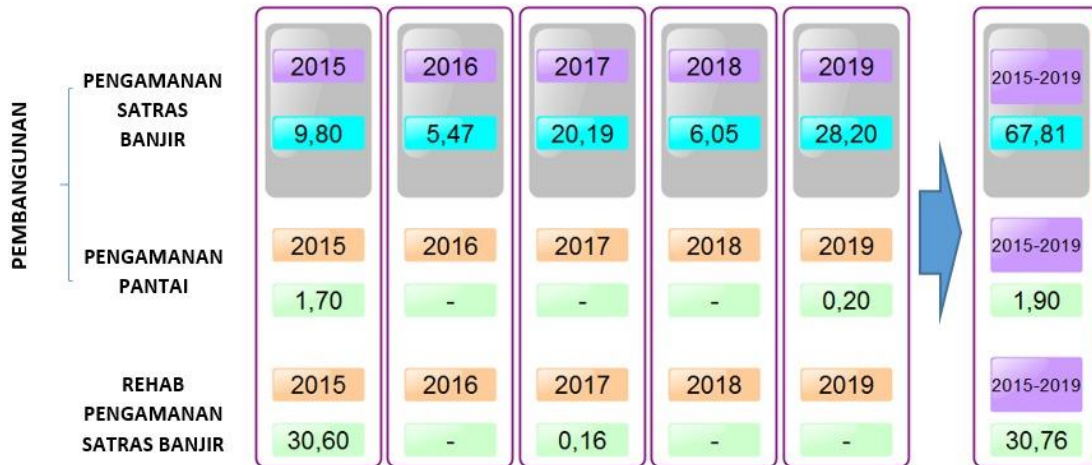
Sebagian wilayah Indonesia rentan terhadap bencana alam, seperti banjir, gempa bumi dan gunung berapi. Dalam wilayah kerja Balai Besar Wilayah Sungai Citarum juga mengalami kerentanan pada bencana alam terutama banjir dan longsor. Untuk mengendalikan bencana akibat tdaya rusak air seperti banjir dan abrasi pantai pada tahun 2015 – 2019 telah dilaksanakan pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana pengendalian banjir dan pengamanan pantai. Pembangunan sarana dan prasarana pengendalian banjir yang sudah dibangun adalah sepanjang 67,81 km ditambah dengan pembangunan sarana dan prasarana pengamanan pantai sepanjang 1,90 km. Selain itu juga telah dilaksanakan rehabilitasi sarana dan prasarana pengendalian banjir sepanjang 30,76 km.

Kerentanan terhadap bencana alam terutama banjir tidak hanya dapat diatasi dengan melalui infrastruktur pengendali banjir saja tetapi harus disertai dengan adanya pemulihan tutupan lahan pada daerah alisan sungai dan peningkatan



kesadaran seluruh pemangku kepentingan termasuk masyarakat dalam ikut menjaga kelestarian sumber daya air.

Ke depan, pengendalian daya rusak perlu terintegrasi dengan upaya perbaikan lingkungan ditunjang dengan peningkatan dan adanya peranan *early warning system*, sehingga dampak dan kerugian yang timbul akibat bencana dapat dikurangi.



Gambar I.5. Capaian Infrastruktur Penanganan Bencana 2015-2019 di WS. Citarum

3. Bendungan dan Embung untuk Peningkatan Daya Tampung Air

Dalam rangka meningkatkan kapasitas tampung, pada tahun 2015 – 2019 Balai Besar Wilayah Sungai Citarum telah melakukan pembangunan bendungan sebanyak 1 (satu) buah yaitu Bendungan Sadawarna yang sekaligus merupakan salah satu proyek Strategis Nasional (PSN) di Provinsi Jawa Barat, serta pembangunan embung sebanyak 4 (empat) buah sesuai target 4 (empat) buah yang terdiri dari 2 (dua) embung konservasi yaitu Embung Gedebage, dan Embung Bukitn Wanadesa serta 2 (dua) embung untuk air baku yaitu Embung Sidodadi dan Embung Cipanas . Selain itu dilakukan juga rehabilitasi embung/situ pada 3 (tiga) buah embung yaitu Situ Jungkur Kab. Karawang, Situ Citapen Kab. Subang, dan Situ Cipule Kab. Karawang. Dengan adanya pembangunan Bendungan dan Embung, serta adanya Rehabilitasi Embung diharapkan penyediaan air baku untuk daerah dapat mengalami peningkatan. Kedepan, masih diperlukan peningkatan kapasitas tampung, baik dalam skala



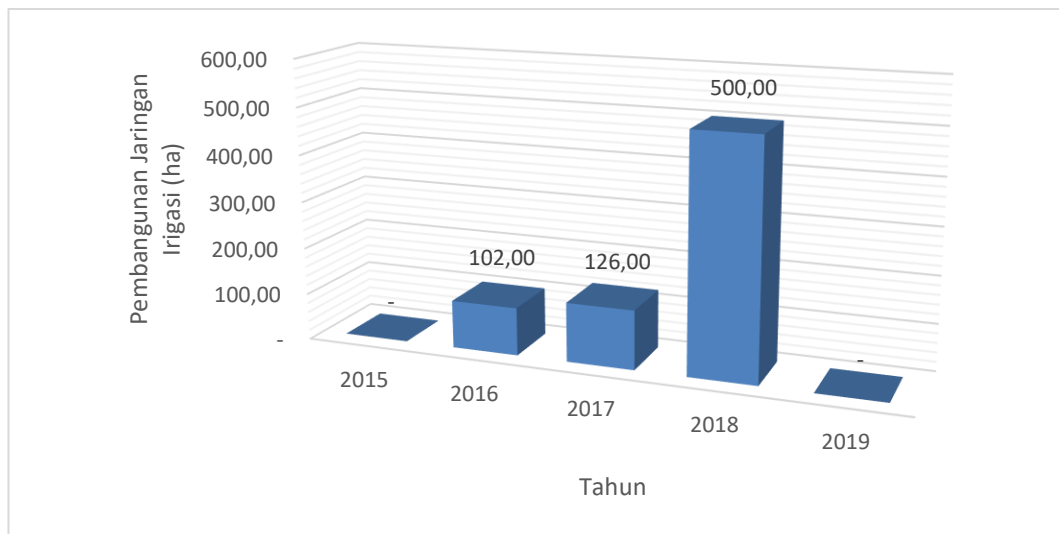
besar maupun dalam skala kecil untuk memenuhi sekaligus mengantisipasi peningkatan kebutuhan akan air.

4. Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi untuk Mendukung Ketahanan Pangan

Kedaulatan pangan (*food sovereignty*) adalah pemenuhan hak atas pangan yang berkualitas gizi baik dan sesuai dengan budaya, diproduksi dengan sistem pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Pada tahun 2015- 2019, dalam mendukung ketahanan pangan telah dilakukan Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi yang meliputi wilayah kerja Balai Besar Wilayah Sungai Citarum. Pembangunan jaringan irigasi tersebut terdiri atas :

- Pembangunan jaringan irigasi air tanah melalui APBN seluas 228 Ha.
- Pembangunan jaringan irigasi tambak melalui APBN seluas 500 Ha.

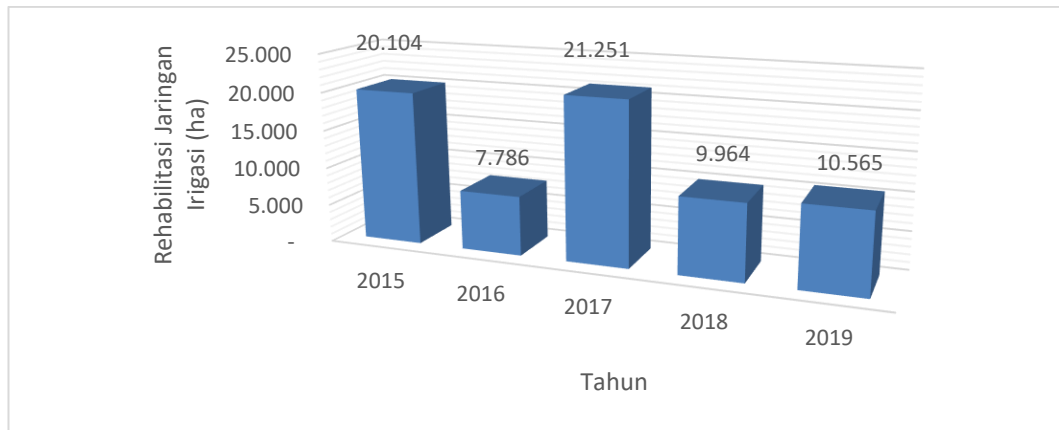


Gambar I.6. Capaian Pembangunan Irigasi Air Tanah dan Irigasi Tambak

Tahun 2015 - 2019

Sedangkan rehabilitasi jaringan irigasi seluas 69.669 Ha dilaksanakan dengan APBN dan Loan WISMP terdiri atas :

- Pendanaan rehabilitasi melalui APBN, seluas 59.396 Ha.
- Pendanaan rehabilitasi jaringan irigasi melalui Loan WISMP, seluas 10.273 Ha.



Gambar I.7. Capaian Rehabilitasi Irigasi Tahun 2015 – 2019 di WS. Citarum

I.3 Identifikasi Kendala Dalam Pencapaian Renstra 2015-2019

Evaluasi terhadap faktor-faktor yang menjadi kendala dan hambatan dalam pelaksanaan Renstra 2015 – 2019 perlu dilakukan untuk dijadikan pertimbangan sebagai pertimbangan dalam melanjutkan program pada Renstra berikutnya. Adapun beberapa kendala yang dihadapi Balai Besar Wilayah Sungai Citarum dalam pencapaian Renstra 2015-2019 antara lain adalah :

1. Masih Rendahnya Tingkat Layanan Sarana dan Prasarana Air Baku
Menurut Laporan Kinerja tahun 2019 kegiatan pekerjaan dalam pemenuhan layanan sarana dan prasarana air baku tidak sesuai dengan target awal sebesar 15.6 m³/det sedangkan realisasi sebesar 13.95 m³/det yang disebabkan salah satunya adalah ketidaksiapan desain.
2. Masih Rendahnya Kapasitas Tampung Sumber-Sumber Air
 - a. Menurut Laporan Kinerja tahun 2019 pada tahap pelaksanaan bendungan (*on-going*) terjadi kendala dikarenakan lahan belum tersedia dan terdapat paket pekerjaan yang terlambat terkontrak sehingga tidak dapat dilaksanakan pekerjaan fisiknya. Kondisi ini terjadi dikarenakan dana terblokir sehingga harus dilakukan revisi anggaran yang berakibat terlambatnya pelaksanaan paket pekerjaan;
 - b. Kegiatan pekerjaan embung dan bangunan air lainnya terdapat kendala penolakan masyarakat akan dibangunnya embung.
 - c. Paket pekerjaan baru terkontrak pada pertengahan triwulan III sehingga progress pekerjaan tidak sesuai dengan rencana. Serta cuaca yang



- memasuki musim penghujan menjadi salah satu hambatan pada pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
- d. Terdapat penambahan paket pekerjaan baru dan gagal lelang di akhir bulan Oktober 2019 sehingga tidak dimungkinkan untuk pelaksanaan lelang ulang dan pelaksanaan konstrusinya.
3. **Belum Optimalnya Kapasitas Pengendalian Daya Rusak**
Beberapa pekerjaan bendungan pengendali banjir yang dibangun/ditingkatkan dan pekerjaan polder/kolam retensi yang dibangun/ditingkatkan terkendala oleh lahan yang akan dibebaskan.
 4. **Belum Optimalnya Kinerja Layanan Irigasi**
Pada output pekerjaan jaringan irigasi permukaan kewenangan pusat dan daerah yang dibangun terkendala karena kegiatan desain belum selesai.
 5. **Belum Optimalnya Kinerja Operasi dan Pemeliharaan**
 - a. Bendungan yang dioperasikan dan dipelihara terkendala karena ada dua paket pekerjaan yang tidak dilaksanakan yaitu Pemeliharaan Rutin Bendungan Ciburuy dan Pemeliharaan Rutin Bendungan Kamojing, dikarenakan pekerjaan tersebut sedang dilaksanakan oleh Perum Jasa Tirta II dan Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat;
 - b. Embung dan bangunan penampung air lainnya yang dioperasikan dan dipelihara, terkendala karena ada beberapa pemeliharaan berkala situ yang tidak dilaksanakan karena situ tersebut tidak ada seperti, Situ Wanayasa, Situ Ciruluk, Situ Cibeletog, Situ Kosambi, Situ Ciparang, Situ Legok Saijan, Situ Cijengkol, Situ Girang, Situ Ciaul, Situ Sukapura dan Situ Cicorelas.
 - c. Biaya TPOP 80% untuk membiayai tenaga O bukan untuk pemeliharaannya sehingga untuk pemeliharaan berkala dan rutin Sebagian tidak bisa dilakukan terkait keterbatasan anggaran.
 6. **Masih Terbatasnya Jumlah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)**



- a. Masih kurangnya ketersediaan SDM dan tingkat pengetahuan SDM dalam menjalankan kegiatan swakelola yang ada pada Satker BBWS Citarum.
- b. Pengendalian dalam pelaksanaan program swakelola kurang diperhatikan, sehingga tidak sesuai program Rencana Operasional Kerja dan realisasinya.
- c. Masa transisi pergantian kepanitiaan pengadaan barang yang ada menghambat proses pengadaan sehingga realisasi pelaksanaannya tidak sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan.
- d. Perencanaan Kegiatan Pelaksanaan Diseminasi Data dan Informasi dan Pelaksanaan Pembinaan Teknis Staff / Penjaga Pos / Stasiun yang kurang, karena terlalu banyak perjalanan dinas yang tidak bisa terserap sehingga memakan waktu untuk revisi pergantian akun.

I.4 Tinjauan Terhadap Dokumen Pola dan Rencana PSDA WS Citarum

Secara umum dokumen Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Citarum digunakan sebagai rumusan strategi dan kebijakan operasional bagi seluruh instansi yang memiliki tugas dan fungsi sebagai pengelola sumber daya air maupun yang terkait dengan pengelolaan sumber daya air di Wilayah Sungai Citarum.

I.4.1. Matriks Dasar Upaya Fisik dan Non Fisik

Berdasarkan rentang waktu penetapan Dokumen Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air WS Citarum dengan pelaksanaan kegiatan, menunjukkan belum banyak upaya non fisik yang dapat dilihat. Upaya fisik dalam Pengendalian Daya Rusak Air yang dilakukan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Citarum perlu diperkuat dengan upaya non fisik seperti peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat.



1. Di Bidang Konservasi Sumber Daya Air

Tabel I.3. Upaya Fisik Aspek Konservasi Sumber Daya Air

ALTERNATIF STRATEGIS	2016-2020	2021-2025	2026-2030	2031-2035	Instansi
1. Upaya Vegetatif (RTKRHL 2014-2033)	186.767 ha	454.760 ha	204.323 ha		Dinas Kehutanan Prov Jawa Barat, Kab/Kota, Masyarakat
2. Upaya Sipil Teknis (RIKRHL 2014-2033)					
a. Dam Penahan	636 unit	1.143 unit	464 unit		Dinas Kehutanan Prov Jawa Barat, Kab/Kota, BPDAS Citarum-Ciliwung
b. Sumur Resapan	113.475 unit	189.125 unit	75.650 unit		
c. Gully Plug	341 unit	571 unit	231 unit		
d. Teras Gulud/Banguku	67.263 ha	181.532 ha	100.801		
e. Parit Buntu	38.323 ha	12.088 ha	93 ha		
3. Cek Dam Pengendali Sedimen	286 unit	202 unit	155 unit		DDWS Citarum
4. Memanfaatkan oxbow					BBWS Citarum
5. Pembangunan IPAL Komunal	12 unit				BPLHD
6. Pembangunan jamban sehat					Dinas Ciptakarya Prov Jawa Barat, Kab/Kota
7. Pemasangan Trash Rake (S. Citepus, S. Cidurian, S. Cicadas, S. Cikapundung, Siphon Cibeet, Siphon Bekasi)					BBWS Citarum
8. Penanganan sampah pada kawasan Sungai					Dinas Kebersihan PemKab, PemKot
9. OP Situ					BBWS Citarum

— Upaya
— Operasi dan Pemeliharaan (OP)

Tabel I.4. Upaya Non Fisik Aspek Konservasi Sumber Daya Air

ALTERNATIF STRATEGIS	2016-2020	2021-2025	2026-2030	2031-2035	Instansi
1. Eco Village					PemProv Jawa Barat, BPDAS Citarum-Ciliwung, BBWS Citarum
2. MoU Puslitbang SDA & BBWS Citarum					Puslitbang SDA & BBWS Citarum
3. Sosialisasi Masyarakat					PemProv Jawa Barat, PemKot, Bandung, PemKab Bandung Barat
4. Koordinasi TKPSDA, Forum DAS, GANKPA					SKPD di lingkungan PemProv Jawa Barat, BPDAS Citarum-Ciliwung, BBWS Citarum, LSM, BUMN, serba swasta
5. Peningkatan partisipasi ibu					PemProv Jawa Barat, PemKab Bandung Barat, PemKot, Bandung
6. Pengaturan penggunaan pestisida					Dinas Pertanian Proven Kab/Kota
7. Pemberdayaan masyarakat Peduli Sungai					PemProv Jawa Barat, PemKab Bandung Barat, PemKot, Bandung, BBWS Citarum, Perguruan Tinggi
8. Penataan Kawasan Sempadan Sungai					BBWS Citarum, TNI, Satpol PP, PemKab, PemKot, Komunitas Sungai Setempat, Perguruan Tinggi
9. Rencana Aksi Multi-pihak instansi Pemerintah (RAM-IP)					Seluruh instansi yang berwenang di WS Citarum
10. Penegakan hukum					Kepolisian, PPNS dari masing-masing instansi, Satpol PP
11. Teknologi Restorasi Kualitas Air Sungai Citarum Hulu					Balai Lingkungan Keairan Puslitbang SDA
12. Teknologi Pemanfaatan Bekas Sungai Citarum Hulu yang Mempertimbangkan Aspek Ekohidroliik					Balai Lingkungan Keairan Puslitbang SDA
13. Teknologi Konservasi Air, Tanah dan Lahan untuk Mengurangi Erosi dan Sedimentasi yang disebabkan oleh Perubahan Iklim dan Tata Guna Lahan					Balai Lingkungan Keairan Puslitbang SDA
14. Teknologi Pengendalian Erosi dan Sedimentasi di DAS Citarum Hulu					Balai Lingkungan Keairan Puslitbang SDA

— Upaya



2. Pendayagunaan Sumber Daya Air

Tabel I.5. Upaya Fisik Aspek Pendayagunaan Sumber Daya Air

ALTERNATIF STRATEGIS	2015-2020	2021-2025	2026-2030	2031-2035	Instansi
1. Pemanfaatan dan pembanguan MA Gambung; MA Kertasari; Interbasin Sinumbra; Wd Harien Cikalong; Pompa Saguling, Ciembang; Wd Sadawarna; Pipa Intake SPAM Purwokarta,	33,34 m3/dtk				BBWS Citarum
2. Pemanfaatan dan pembanguan Wd Santosa; Wd Cikapundung; Wd Cibee; Balekambang Conjunctiva; Wd Rancaetek/Tegaluar; Wd Sukawana; Wd Cipanengah; Intake Nanjung; WTP Siphon Bekasi		25,94 m3/dtk			BBWS Citarum
3. Pemanfaatan dan pembanguan Wd Cisonandi 1.2; Cwidney; Wd Cigondek; Wd Cilarik; Wd Cibatarua; Wd Cipaminghis; Pipa dari Wd Jatiluhur Tahap I			8,66 m3/dtk		BBWS Citarum
4. Pemanfaatan dan pembanguan Wd Cimahi; Wd Cimeta; MA Ganjarsari; Pasiranji Cs, Cilame Cs, Pipa dari Wd Jatiluhur Tahap II, Pipa Canal 2 dari Bendungan Jatiluhur				28,32 m3/dtk	BBWS Citarum
5. Rehabilitasi Saluran Tarun Timur	67 km				BBWS Citarum, PJT II
6. Rehabilitasi Saluran Tarun Barat	54 km				BBWS Citarum, PJT II
7. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	87.317 Ha	87.317 Ha	87.317 Ha		BBWS Citarum, Dinas PSDA
8. Pembangunan Daerah Irigasi Sadawarna		6.000 Ha			BBWS Citarum
9. Puluensi Irigasi Air Tanah (Laru, sempungsi IKK)					BBWS Citarum, Dinas ESDM Prov
10. Modernisasi irigasi					BBWS Citarum, Dinas PSDA Prov, Kab/Kota
11. OP Irigasi, air tanah dan air baku					DDWS Citarum, PT. TGR, PDAM

— Upaya
— Operasi dan Pemeliharaan (OP)

Tabel I.6. Upaya Non Fisik Aspek Pendayagunaan Sumber Daya Air

ALTERNATIF STRATEGIS	2015-2020	2021-2025	2026-2030	2031-2035	Instansi
1. Pemberdayaan Komisi Irigasi P3A dan GP3A					Dinas Pertanian Prov, Dinas Pertanian Kab/Kota, Dinas PSDA Prov, Dinas PSDA Kab/Kota, Balai PSDA Prov (Citarum)
2. Penguatan lembaga pengelola jaringan irigasi Jatiluhur					BBWS Citarum, Dinas PSDA Prov, PJT II
3. Pengelolaan Aset Irigasi (PAI)					BBWS Citarum, Dinas PSDA Prov, Kab/Kota
4. Sinkronisasi Program PDAM dan BBWS Citarum					Dinas Kimrum Provinsi, BBWS Citarum, PDAM, PT. TGR
5. Penyusunan alokasi air					BBWS Citarum, TKPSDA
6. Penguatan unit rekomtek dan rekomendasi penerbitan ijin serta fasilitasi advokasi hukum					BBWS Citarum, PJT II

— Upaya



3. Pengendalian Daya Rusak Air

Tabel I.7. Upaya Fisik Aspek Pengendalian Daya Rusak Air

ALTERNATIF STRATEGIS	2015-2020	2021-2025	2026-2030	2031-2035	Instansi
1. Pencegahan Daya Rusak Air					
a. Pembangunan Kolam Retensi Cieunteung di Kab. Bandung dan OP	—	—	—	—	BBWS Citarum
b. Pembangunan Floodway Cisangkluy di Kab. Bandung dan OP	—	—	—	—	
c. Normalisasi 4 anak sungai (S. Cikeruh, S. Cimande, S. Cikijing, S. Citarum Hulu) dan OP	—	—	—	—	
d. Normalisasi Sungai Cilember dan Sungai Cibeureum	—	—	—	—	
e. Perbaikan tebing-tebing sungai di Citarum Hilir dan OP	—	—	—	—	
f. Pembangunan Bendungan Cibeel (Multi Purpose)	—	—	—	—	
g. Pembangunan Bendungan Sadawaina	—	—	—	—	
h. Pembangunan Bendungan Cikao	—	—	—	—	
i. Pengerukan Sungai Citarum dan OP	—	—	—	—	
j. Pembangunan dan pemeliharaan rehabilitasi Sarana/Prasarana Pengamanan Pantai	—	—	—	—	
2. Penanggulangan Daya Rusak Air					
a. Penanganan daerah rawan banjir	—	—	—	—	BPBD
b. Penanganan daerah rawan longsor	—	—	—	—	
c. Posko banjir	—	—	—	—	
3. Pemulihan Infrastruktur Sumber Daya Air Pasca Bencana					BBWS Citarum

— Upaya
— Operasi dan Pemeliharaan (OP)

Tabel I.8. Upaya Non Fisik Aspek Pengendalian Daya Rusak Air

ALTERNATIF STRATEGIS	2015-2020	2021-2025	2026-2030	2031-2035	Instansi
1. Pencegahan Daya Rusak Air (DRA)					
a. SOP operasi Bendungan kaskade (Saguling, Cirata, Jatiluhur)	—	—	—	—	BBWS Citarum, PIT II, PLN
b. Flood forecasting warning system	—	—	—	—	BBWS Citarum, DMKG, Dinas PSDA
c. Analisis banjir dan kekeringan, Masterplan pencegahan DRA	—	—	—	—	BBWS Citarum,
d. Penataan tata guna lahan	—	—	—	—	PemKab/Kota
e. Sosialisasi konsep hidup selaras dengan bencana (adaptif)	—	—	—	—	PemKab/Kota, BBWS Citarum
f. Pengendalian pengambilan air tanah dalam pencegahan penurunan muka tanah	—	—	—	—	PemKab/Kota, PemProv
g. Studi identifikasi muara sungai dan pantai utara WS Citarum dan penanganannya	—	—	—	—	BBWS Citarum

— Upaya
— Operasi dan Pemeliharaan (OP)



4. Sistem Informasi Sumber Daya Air

Tabel I.9. Upaya Fisik dan Non Fisik Aspek SISDA

ALTERNATIF STRATEGIS	2015-2020	2021-2025	2026-2030	2031-2035	Instansi
1. Upaya Meningkatkan data dan informasi SDA (data hidrologi, hidrometri, hidrogeologi dan hidroklimatologi)					BBWS Citarum, Dinas PSDA Prov, Dinas PSDA Kab/Kota, Dinas Pertanian Prov, Dinas Pertanian Kab/Kota, BPSDA, Bappeda Prov, Dinas ESDM Prov, BMKG Prov, PT. KTI, Ditjen SDA, Kelompok masyarakat
a. Pos Curah Hujan (PCH)					
b. Pos Duga Air					
c. Pos Klimatologi					
d. Pengembangan Data dan Informasi SDA Terpadu WS Citarum					
e. Data kualitas air					
f. SIG spasial					
g. Peralatan sarana dan prasarana (speedboat, currentmeter, kalibrasi alat)					
h. Informasi alokasi air					
i. Informasi banjir dan kekeringan					
2. Upaya koordinasi antar instansi pengelola data dan informasi SDA					

— Upaya
— Operasi dan Pemeliharaan (OP)

5. Peningkatan Peran Masyarakat dalam Dunia Usaha

Tabel I.10. Upaya Fisik dan Non Fisik Aspek Pemberdayaan Masyarakat

ALTERNATIF STRATEGIS	2015-2020	2021-2025	2026-2030	2031-2035	Instansi
1. Pelibatan peran masyarakat dalam kegiatan pengelolaan SDA					BBWS Citarum, Dinas PSDA Prov, Jawa Barat, BPDAS Citarum-Cilwung, Dinas Kehutanan Prov. Jabar
a. Fasilitasi kegiatan TKPSDA WS Citarum					
b. Fasilitasi kegiatan organisasi kemasy. Dewan SDA WS Citarum Prov., Forum DAS, Komisi Inggasi, masyarakat pengguna air, dll					
c. Menyelenggarakan sosialisasi dan pertemuan konsultasi masyarakat (PKM) dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pengawasan, dan OP pengelola SDA					
2. Melaksanakan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pendampingan masyarakat					TKPSDA WS Citarum, Instansi terkait/Kelompok Masyarakat
a. Penyebaran masyarakat dalam pengelolaan SDA melalui pendidikan PALD, SD, SMP, SMA					
b. Pendidikan pelatihan masyarakat dalam pengelolaan SDA (rehabilitasi hutan lahan, pengelolaan ngasi, penanggulangan daya rusak air)					
c. Penelitian dan pengembangan pengelolaan SDA					
d. Pendampingan masyarakat kawasan hutan, petani pengguna air, pengelolaan air minum desa, penanggulangan daya rusak air (banjir, erosi)					
3. Peningkatan swadaya masyarakat					Instansi terkait/Kelompok Masyarakat
a. Fasilitasi perkuatan organisasi					
b. Bantuan teknis kegiatan swadaya masyarakat					

— Upaya
— Operasi dan Pemeliharaan (OP)



I.4.2. Kondisi Infrastruktur SDA yang Sudah Terpasang dan Kinerjanya

Infrastruktur utama yang telah dibangun di Wilayah Sungai Citarum, dimanfaatkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan antara lain untuk irigasi, air baku untuk air minum dan industri, ketenagaan, perikanan, penggelontoran dan pariwisata. Kondisi prasarana bangunan irigasi, baik pada tingkat jaringan utama, sekunder maupun pada tingkat tersier dan bangunan pengendali banjir memerlukan perhatian lebih pada operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi.

1. Infrastruktur Tampung Air

Infrastruktur maupun sarana tampung air berupa situ dan bendungan yang telah beroperasi dan berfungsi dengan baik pada saat ini sebagai pemasok kebutuhan air di Wilayah Sungai Citarum adalah sebagai berikut

Tabel I.11. Infrastruktur Eksisting Tampung Air di WS Citarum

Jenis Tampung	Jumlah	Tahun Selesai	Tampung (juta) m ³	Fungsi	Potensi Listrik
Situ/Embung	179		407	Irigasi/Air Baku	
Bendungan :	6				
1. Saguling		1986	900	PLTA/Irigasi	750 MW
2. Cirata		1988	1.900	PLTA	1000 MW
3. Ir.H. Djuanda/Jatiluhur		1967	2.500	PLTA/Irigasi	187,5 MW
4. Cipanunjang		1930	18.5	PLTA	
5. Cileunca		1984	11	PLTA	
6. Cipancuh		1927	8	Irigasi	

2. Infrastruktur Irigasi

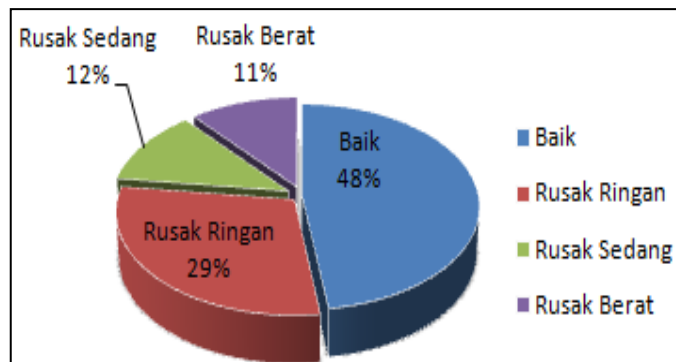
Areal irigasi kewenangan pusat eksisting di Wilayah Sungai Citarum seluas 272.722 Ha yang terbagi dalam 8 Daerah Irigasi sebagai berikut:



Tabel I.12. Daerah Irigasi Kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai Citarum

No.	Nama DI	Luas Areal (Ha)	(%)
1	DI Jatiluhur	239,148	87,69
2	DI Cipancuh	6,318	2,32
3	DI Cileuleuy	5,378	1,97
4	DI Leuwinangka	4,387	1,61
5	DI Cikaranggeusan	4,038	1,48
6	DI Cipamingkis	4,591	1,68
7	DI Cihea	5,484	2,01
8	DI Ciletuh	3,378	1,24
	Jumlah	272,722	100,00

Kondisi daerah irigasi di WS Citarum diklasifikasikan kedalam kondisi baik 48%, rusak ringan 29%, rusak sedang 12% dan rusak berat 11% sebagaimana bisa dilihat pada Gambar I.7 dibawah ini



Gambar I.8. Kondisi Daerah Irigasi WS Citarum

I.4.3. Potensi Pengembangan SDA

1. Potensi Pengembangan dan Pembangunan Infrastruktur Pemenuhan Air Baku
Potensi pengembangan dan pembangunan infrastruktur untuk pemenuhan pasokan air baku ke kota dan kabupaten di Wilayah Sungai Citarum telah dipertimbangkan sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada di wilayah tersebut. Beberapa potensi bendungan di Wilayah Sungai Citarum yang potensial untuk pemenuhan air baku untuk RKI dan untuk keperluan lainnya dapat dilihat pada Tabel I.11 dibawah ini.



Tabel I.13. Potensi Bendungan Di Wilayah Sungai Citarum

No.	Nama Potensi Waduk	Nama Sungai	Volume (m3)	Manfaat
1	Sadawarna	Cipunagara	43,55 juta	Air baku 1,1 Irigasi/pertanian, Pembangkit listrik tenaga mikrohidro, Pariwisata Perikanan darat, Konservasi, Pengendalian banjir
2	Harian Cikalong	Cisangkuy		Air baku 0,7, PLTA Cikalong
3	Santosa	Cisangkuy		Air baku 1,5
4	Cikapundung	Cikukang (Anak sungai Ciguling, Anak Sungai Cikapundung)	19.000	Air Baku 2,05, Mengurangi banjir di wilayah kota Bandung bagian selatan.
5	Rancaekek/Tegaluar, Citarik, Cikeruh			Air Baku 3,02
6	Cibeet	Cibeet	62 juta	Air Baku 2, Pengendalian Banjir, PLTA
7	Sakawana	Cimahi	718.767	Air Baku 0,43, Irigasi 1.717 Ha, Lisrtrik 1.630 MW/tahun, Banjir Sungai Cimahi terkendali, Memberikan tambahan debit (maintenance flow) Sungai Citarum.
8	Cipanengah	Cipanengah		Air Baku 1,55
9	Bendungan Cisondari 1,2,3, Ciwidey	Hilir Pertemuan Sungai Ciwidey dan Sungai Ciangkorah	3.261.328	Air Baku 1,04, Irigasi 1.658 Ha, Pariwisata 5% nilai total proyek, Banjir Sungai Ciwidey terkendali, Memberikan debit (maintenance flow) Sungai Citarum
10	Cigondok	Cigondok		Air Baku 0,38
11	Citarik	Citarik	70.468	Air baku Jatiningor dan Rancaekek 0,24, Irigasi setempat, Industri kawasan Bandung Timur untuk menghindari terjadinya penurunan muka tanah
12	Cipamingkis	Cipamingkis		Air Baku 2
13	Cimahi	Cimahi	31.251	Air Baku 0,33
14	Cimeta	Cimeta	31.251	Air Baku 0,59, Irigasi setempat 825 Ha, Pariwisata 20% nilai proyek
15	Pasirranji Cs	DAS Citarum	200 juta	Air Baku 2
16	Cilame Cs	Cilame-Cipunegara	17,7 juta	Air Baku 2
17	Cikitu	Citarum Hulu		
18	Wakap	Citarum Hulu		
19	Cibintinu	Cisangkuy		
20	Cikuda	Cidurian		
21	Sekerende	Cidurian		
22	Tugu	Cidurian		
23	Cikaliomiring	Cikaeruh		
24	Cikawari	Cipamokolan		
25	Tareptep	Cipamokolan		
26	Luewiliang	Citarik		
27	Cigumentong	Citarik		
28	Cimulu	Citarik		
29	Cibodas	Sungai Cibodas	71 juta	
30	Cibeber	Anak Sungai Cibeber, Sungai Cikandung, Sungai Cipunagara	53,76 juta	
31	Nameng	DAS Citarum	9,5 juta	
32	Pangkalan	DAS Citarum	471 juta	
33	Maya	DAS Citarum	71,3 juta	
34	Telaga Herang		97,6 juta	
35	Kandung		72,7 juta	

2. Potensi Peningkatan dan Pembangunan Infrastruktur untuk Irigasi

Peningkatan infrastruktur irigasi dilakukan melalui:

- Pembangunan jaringan irigasi baru

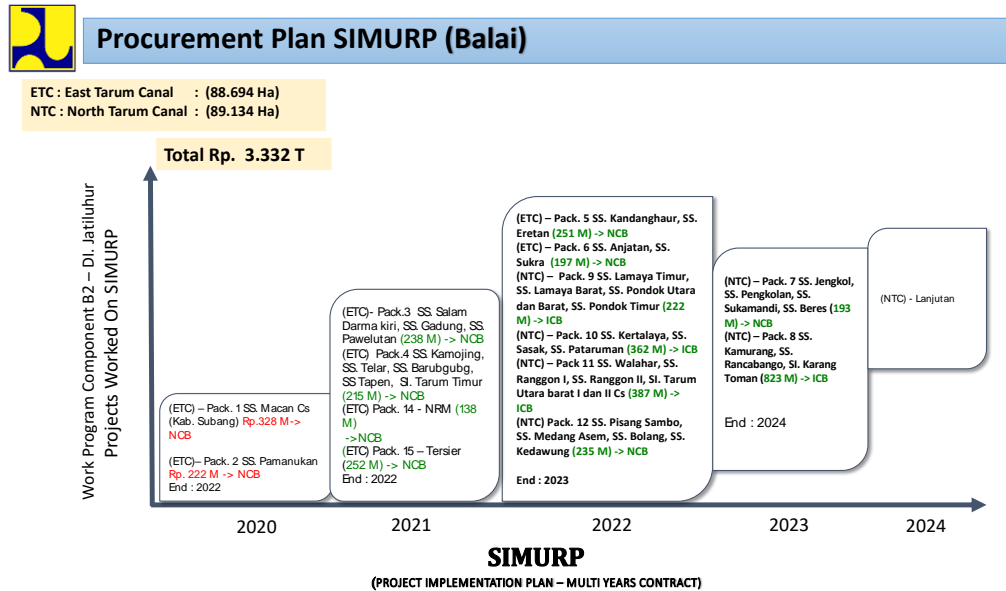
Dengan dilaksanakannya pembangunan Bendungan Sadawarna di Kabupaten Subang berpotensi mengairi jaringan irigasi seluas 4.500 Ha.

- Rehabilitasi dan modernisasi jaringan irigasi

Rehabilitasi dan Modernisasi Daerah Irigasi Jatiluhur dilaksanakan melalui *program Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project (SIMURP)* dengan sumber dana yang berasal dari Bank Dunia dengan target capaian total seluas 175,000 hektar dimana untuk modernisasi irigasi seluas 65,000 hektar dan untuk rehabilitasi



irigasi seluas 110,000 hektar pada daerah irigasi di Saluran Tarum Timur dan Saluran Tarum Utara pada DI Jatiluhur dengan masa pelaksanaan mulai Tahun Anggaran 2020 hingga Tahun Anggaran 2024.



Gambar I.9. Modernisasi Irigasi DI. Jatiluhur Loan SIMURP (2020 – 2024)

- Operasi dan pemeliharaan rutin

Operasi dan pemeliharaan rutin dilaksanakan guna mempertahankan kinerja dari infrastruktur jaringan irigasi yang telah dibangun.

3. Potensi Peningkatan dan Pembangunan Infrastruktur untuk Tambak

Dalam rangka pengembangan kawasan budidaya perikanan tambak, maka pemerintah telah melakukan berbagai upaya. Salah satu upayanya adalah dengan penataan jaringan irigasi tambak. Guna mendukung potensi perikanan budidaya tambak maka diperlukan data-data primer dan sekunder tentang jaringan tata air dan perencanaan yang optimal, berkelanjutan dengan tujuan meningkatkan pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, dilakukan penyusunan data aset sehingga diperoleh suatu data lengkap mengenai aset prasarana dan potensi tambak di pesisir utara Wilayah Sungai Citarum.



Tabel I.14. Luasan Tambak Eksisting dan Potensi di WS. Citarum

No	Kabupaten	Kecamatan	Luas Eksisting (Ha)	Luas Potensi (Ha)
1	Bekasi	Muara Gembong	9.785	232
2	Karawang	Cilamaya Wetan	420	1.027
		Cilamaya Kulon	104	
		Cilebar	92	186,1
		Pedes	406	
		Cibuaya	3.898	
		Tirtajaya	1.625	255,9
		Batu Jaya	830	279,2
		Pakis Jaya	1.413	384,7
		Tempuran	571	
3	Subang	Blanakan	2.013,37	674,1
		Sukasari	907	370,8
		Legon Kulon	1.480	969,1
		Pusakanagara	1.107	112,9
4	Indramayu	Sukra	24	
		Kandanghaur	1.125,1	582
Total			25.695,4	5073,8

I.4.4. Neraca Ketersediaan dan Kebutuhan Air

Kebutuhan air rumah-tangga dan perkotaan (*domestic and municipal*) kerap kali disebut juga dengan nama air baku jika air tersebut belum diolah, dan air bersih atau air minum jika air telah diolah dengan menggunakan Instalasi Pengolah Air. Kebutuhan ini sangat penting untuk selalu dipenuhi, sebab kegagalan pemenuhan kebutuhan air rumah tangga dan perkotaan dapat menimbulkan wabah penyakit dan keresahan masyarakat. Besarnya kebutuhan air ini bergantung pada jumlah penduduk, pola konsumsi air yang sejalan dengan naiknya tingkat kesejahteraan, serta ukuran besarnya kota, atau desa yang dapat diasumsikan bergantung pada jumlah penduduk

Kebutuhan air industri umumnya relatif konstan terhadap waktu. Dengan meningkatnya industri, maka meningkat pula kebutuhan air industri. Survei



kebutuhan air industri diperlukan untuk menentukan rata-rata penggunaan air pada berbagai jenis industri tertentu. Angka indeks ini kemudian dapat dikaitkan dengan ukuran besarnya industri tersebut misalnya melalui banyaknya produk yang dihasilkan, atau banyaknya tenaga kerja. Untuk industri yang terletak pada suatu kawasan industri, maka dapat digunakan perkiraan kasar kebutuhan air perhektarnya antara 0,5 sampai dengan 2 liter/s.

Tabel I.15. Potensi Ketersediaan Air dan Kebutuhan Air

Uraian	2015	2020	2025	2030	2035
Potensi Ketersediaan Air $Q_{90\%}$ (m ³ /dtk)	443,29	443,29	443,29	443,29	443,29
Kebutuhan Air (m ³ /dtk)	179,15	184,05	188,95	193,85	198,75

Sumber: BBWS Citarum, 2020

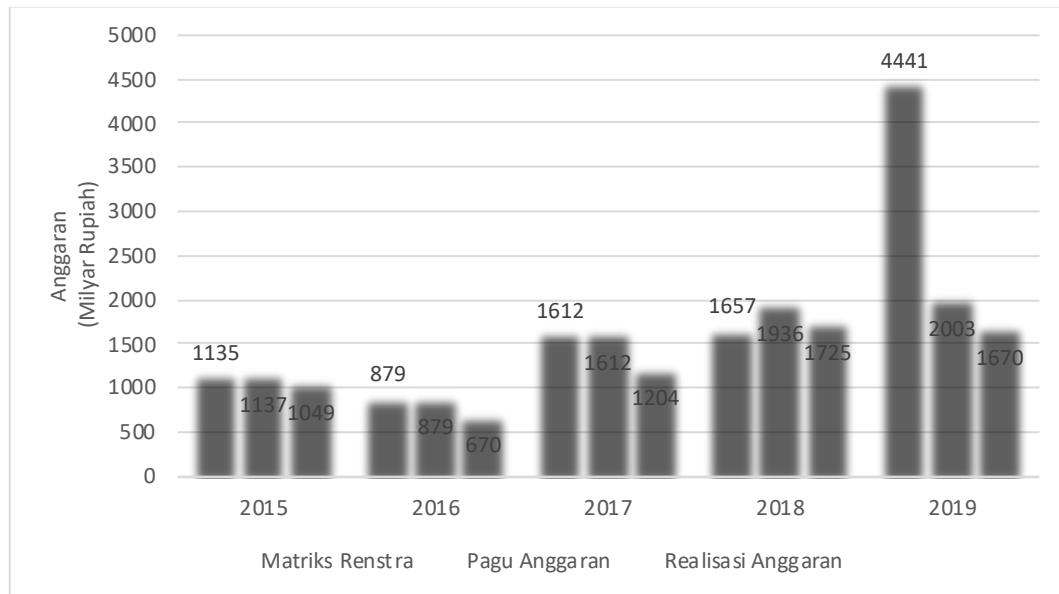


Tabel I.16. Perbandingan Ketersediaan dan Kebutuhan Air Provinsi Jawa Barat

No	Kabupaten/Kota	Tahun 2017		2024 (Proyeksi)	
		Kebutuhan Air (m ³ /tahun)	Daya Dukung Air	Kebutuhan Air (m ³ /tahun)	Daya Dukung Air
1	Bogor	244.727.682	122.629.932	284.203.264	83.154.350,12
2	Sukabumi	107.074.181	371.982.916	110.991.916	368.065.181,21
3	Cianjur	98.592.793	357.274.724	101.489.330	354.378.185,79
4	Bandung	157.532.087	61.221.201	176.831.506	41.921.782,01
5	Garut	112.544.319	74.658.758	119.393.281	67.809.795,96
6	Tasikmalaya	76.311.689	190.025.588	78.778.417	187.558.859,94
7	Ciamis	51.482.038	34.688.227	53.281.517	32.888.747,66
8	Kuningan	46.510.607	19.319.141	48.237.290	17.592.457,09
9	Cirebon	93.863.356	36.222.942	98.406.029	40.765.615,55
10	Majalengka	52.034.575	24.824.206	53.604.937	23.253.844,17
11	Sumedang	50.023.849	85.261.506	51.865.901	83.419.453,17
12	Indramayu	74.495.697	24.617.946	77.024.271	22.089.372,37
13	Subang	67.714.800	90.049.295	72.244.684	85.519.411,58
14	Purwakarta	40.852.304	26.913.369	44.355.253	23.410.420,12
15	Karawang	100.555.076	50.883.199	106.683.397	44.754.878,12
16	Bekasi	147.680.066	24.878.800	187.664.473	64.863.206,56
17	Bandung Barat	72.199.351	5.401.378	78.203.323	602.594,29
18	Pangandaran	17.205.385	54.143.419	17.808.773	53.540.030,11
19	Kota Bogor	46.633.291	37.111.650	51.836.512	42.314.871,36
20	Kota Sukabumi	14.064.049	9.744.939	15.003.953	10.684.843,54
21	Kota Bandung	109.089.244	102.718.924	112.644.446	106.274.126,17
22	Kota Cirebon	13.599.287	11.871.239	14.410.726	12.682.678,20
23	Kota Bekasi	122.079.579	114.195.098	144.514.596	136.630.115,16
24	Kota Depok	95.475.809	85.519.904	118.677.283	108.721.377,57
25	Kota Cimahi	26.018.120	24.456.285	28.690.883	27.129.048,19
26	Kota Tasikmalaya	28.890.743	14.653.383	29.777.255	15.539.895,17
27	Kota Banjar	7.967.264	263.495	8.211.055	19.703,80
Jawa Barat		2.075.217.238	1.132.785.134	2.284.834.271	923.168.101

I.5 Realisasi Pendanaan pada Periode Renstra Sebelumnya

Pendanaan pengelolaan BBWS Citarum melalui anggaran Direktorat Jenderal SDA pada tahun 2015-2019 cenderung mengalami peningkatan. Namun, dibandingkan dengan kebutuhan pendanaan sebagaimana tercantum pada Matriks Renstra BBWS Citarum 2015-2019, rata-rata alokasi anggaran tersebut adalah 30% dari anggaran yang dibutuhkan.



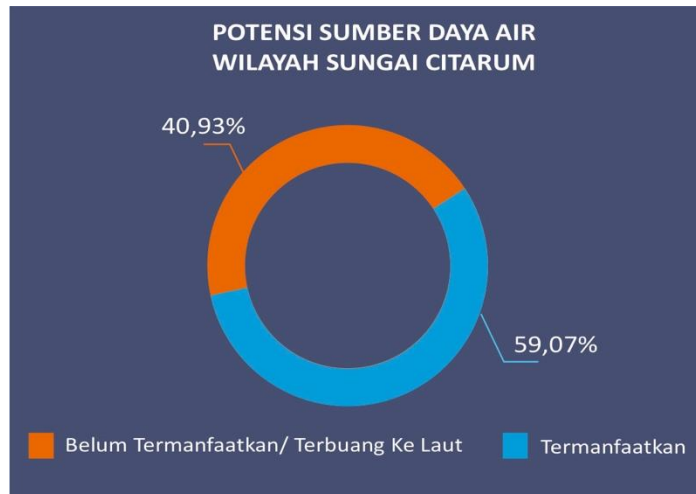
Gambar I.10. Pendanaan pada Periode Renstra Sebelumnya

Implikasi dari keterbatasan pendanaan ini adalah Direktorat Jenderal SDA melalui BBWS Citarum perlu menentukan prioritas diantara banyak kebutuhan dan isu yang harus ditangani. Prioritisasi dilakukan berdasarkan urutan prioritas untuk kemudian dilakukan penyaringan berdasarkan kriteria penyaringan.

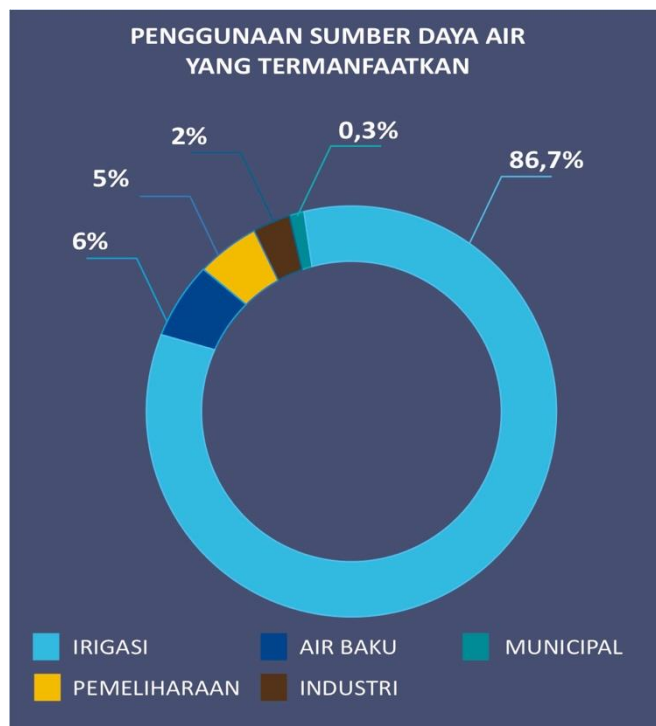
I.6 Potensi dan Permasalahan

I.6.1. Potensi Sumber Daya Air di WS Citarum

Potensi air di Wilayah Sungai Citarum adalah sebesar 12,95 milyar m^3 /thn. Sebesar 7,65 milyar m^3 /thn dapat dikendalikan untuk dimanfaatkan sebagai air irigasi sebesar 86,7%, air baku sebesar 6%, industri sebesar 2%, municipal sebesar 0,3%, pemeliharaan sebesar 5% dan sisanya sebesar 5,30 milyar m^3 /thn tidak termanfaatkan (terbuang ke laut). Dalam rangka ketahanan air, maka akan diupayakan pemanfaatannya untuk kebutuhan air municipal, industri dan lainnya.



Gambar I.11. Potensi Sumber Daya Air di WS. Citarum



Gambar I.12. Penggunaan Sumber Daya Air di WS. Citarum

Penerima manfaat dari sumber daya air ini bukan hanya mereka yang berada di Wilayah Sungai Citarum akan tetapi penduduk DKI Jakarta yang 80% kebutuhan air bakunya dipenuhi dari air sungai melalui Saluran Tarum Barat/ *West Tarum Canal (WTC)*.

Potensi curah hujan tahunan di Wilayah Sungai Citarum berkisar antara 2.000 mm/thn sampai dengan 3.700 mm/thn dengan debit andalan (Q90) sebesar 443,29 m³/dtk. Di Wilayah Sungai Citarum terdapat 6 Waduk dan beberapa



Situ/Embung yang berfungsi sebagai tampungan air dalam upaya mendukung ketersediaan air dan energi listrik nasional.

I.6.2. Permasalahan Sumber Daya Air di WS Citarum

Permasalahan Sumber Daya Air di Wilayah Sungai Citarum diuraikan dalam setiap aspek pengelolaan sumber daya air sebagai berikut:

1. Permasalahan berdasarkan aspek Konservasi Sumber Daya Air

Beberapa isu utama yang terkait dengan konservasi sumber daya air yang ditemui di Wilayah Sungai Citarum antara lain:

- a. Tata guna lahan yang terus berubah setiap tahun, dalam rentang tahun 2001-2014 banyak mengalami perubahan, khususnya lahan permukiman mengalami penambahan sebesar 122.944 Ha;
- b. Pertambahan lahan kritis dan kerusakan DAS;
- c. Pencemaran air akibat pembuangan limbah peternakan, pertanian, domestik dan industri (terutama kandungan logam berat);
- d. Kerusakan hutan bakau dan erosi pantai.
- e. Adanya rencana pembangunan kawasan industri baru yang akan merubah tata ruang dan guna lahan.

2. Permasalahan berdasarkan aspek Pendayagunaan Sumber Daya Air

Beberapa isu utama yang terkait dengan pendayagunaan sumber daya air yang ditemui di Wilayah Sungai Citarum antara lain:

- a. Peningkatan kebutuhan air Rumah Tangga, Kota dan Industri (RKI), seiring dengan pertumbuhan penduduk dan perkotaan;
- b. Cakupan pelayanan PDAM masih rendah sebesar 33,92%, dibandingkan dengan target sasaran visium Kementerian PUPR Tahun 2020-2024 sebesar 88 % untuk pemenuhan air minum.
- c. Keterbatasan penyediaan air baku permukaan untuk Metropolitan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) dan Metropolitan Cekungan Bandung;
- d. Potensi listrik tenaga air yang belum dimanfaatkan secara optimal;
- e. Kerusakan jaringan irigasi yang disebabkan oleh bencana alam, umur konstruksi, minimnya O&P, dan masih rendahnya petani dan beberapa



stakeholder lainnya dalam pengelolaan jaringan irigasi sehingga menyebabkan pelayanan irigasi belum optimal;

f. Pengelolaan aset (irigasi) belum berjalan baik.

3. Permasalahan berdasarkan aspek Pengendalian Daya Rusak Air

Beberapa isu utama yang terkait dengan pengendalian daya rusak air yang ditemui di Wilayah Sungai Citarum antara lain:

- a. Banjir terjadi setiap tahun di hulu sungai Citarum (Cekungan Bandung: Kecamatan Baleendah dan Dayeuhkolot), di hulu Bendungan Ir. H. Juanda (Desa Cikaobandung, Kecamatan Jatiluhur), di hilir Sungai Citarum (Hulu muara Sungai Cibee: Kabupaten Karawang) dan di DAS-DAS Pantai Utara (Sungai Cikarokrok, Sungai Cilamaya, Sungai Ciasem, Sungai Cipunagara : Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang dan Kabupaten Indramayu)
- b. Perambahan daerah bantaran/ sempadan sungai;
- c. Pembangunan perumahan di dataran banjir;
- d. Pembuangan sampah ke sungai dan saluran drainase;
- e. Pendangkalan/sedimentasi alur sungai dan saluran drainase;
- f. Penurunan muka tanah, pasang tinggi air laut;
- g. Terjadinya erosi dan/atau abrasi di pesisir pantai;
- h. Hilangnya kawasan hutan mangrove/baku sebagai pelindung Kawasan pesisir akibat abrasi dan instruksi Kawasan pesisir;
- i. Bahaya tanah/tebing longsor di daerah Puncak, Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Sumedang;
- j. Kejadian kekurangan air di beberapa lokasi.

4. Permasalahan berdasarkan aspek Sistem Informasi Sumber Daya Air (SISDA)

Beberapa isu utama yang terkait dengan SISDA yang ditemui di Wilayah Sungai Citarum antara lain:

- a. Ketersediaan data klimatologi, data hujan, data *Automatic Water Level Recorder/Logger* (AWLR/L), dan data kualitas air sungai yang belum memadai/optimal karena kurang terpeliharanya dengan baik dan terbatasnya SDM pengamat atau juru ukur;
- b. Basis data pada jaringan informasi SISDA dalam WS belum terintegrasi;



- c. Sebagian Standard Operation Prosedure (SOP) untuk pemuktahiran SISDA, pemantauan dan evaluasi sudah disusun, namun pelaksanaan belum optimal, masih perlu dilengkapi;
- d. SISDA belum digunakan sebagai alat dalam perencanaan.

5. Permasalahan berdasarkan aspek Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Masyarakat dan Dunia Usaha

Beberapa isu utama yang terkait dengan pemberdayaan dan peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha yang ditemui di Wilayah Sungai Citarum antara lain:

- a. Kinerja institusi yang bertanggungjawab dalam pengelolaan sumber daya air masih kurang, dan ada tumpang tindih dalam peran dan tanggung jawab;
- b. Pemilik kepentingan belum aktif berperan, sehingga masih memerlukan dukungan Pemerintah;
- c. Potensi peran masyarakat dan peran perempuan dalam pengelolaan sumber daya air perlu diperkuat.

6. Permasalahan berdasarkan aspek Penataan Ruang

Selain kelima aspek pengelolaan sumber daya air di atas, ditemui juga isu terkait dengan penataan ruang di Wilayah Sungai Citarum antara lain berkembangnya permukiman dan kegiatan usaha non pertanian dan alih fungsi lahan pertanian (untuk perkotaan, industri) pada:

- a. Kawasan yang berfungsi sebagai badan air dan daerah resapan (cekungan, rawa, dan situ);
- b. Kawasan pertanian (khususnya persawahan) yang beririgasi teknis terutama pada Metropolitan Bandung;
- c. Sepanjang sempadan sungai, sepanjang bantaran kanan-kiri sungai yang berada dalam kawasan perkotaan.

Integrasi penataan ruang dalam pengelolaan sumber daya air dapat diwujudkan dengan memasukkan zona-zona air ke dalam RTRW Provinsi/Kabupaten.

I.6.3. Analisis Lingkungan Strategis



Analisis lingkungan strategis adalah suatu analisis yang dilakukan secara objektif dan komprehensif dengan mempergunakan data yang (sejauh mungkin) akurat, terbaru, dan berasal dari lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Analisis strategis merupakan suatu upaya objektif untuk merumuskan dan memformulasikan strategi dalam upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang sesuai dengan visi misi yang ditetapkan.

I.6.3.1. Analisis Lingkungan Internal (Kekuatan dan Kelemahan)

Secara nyata BBWS Citarum memiliki kekuatan yang akan mempercepat lajunya kinerja dan sekaligus memiliki kelemahan yang memungkinkan besar dan akan menghambat kinerja yang sudah tersusun. Dengan mengetahui kekuatan dan kelemahan tersebut sejak dini, diharapkan seluruh jajaran yang ada mampu mengantisipasinya dan mengubah kekuatan menjadi peluang dan kelemahan menjadi tantangan yang harus diatasi. Secara sistematis, kekuatan dan kelemahan yang dimiliki BBWS Citarum adalah sebagai berikut :

1. Kekuatan

1.1 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Balai Besar Wilayah Sungai Citarum ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Organisasi Balai Besar Wilayah Sungai Citarum terdiri dari unit struktural sebagai berikut:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur SDA;
- c. Bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air;
- d. Bidang Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Sumber Air;
- e. Bidang Operasi dan Pemeliharaan;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.



Disamping unit structural di atas, juga terdapat 4 (empat) unit satuan kerja yang terdiri dari :

1. Satuan Kerja BBWS Citarum;
2. Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan SDA Citarum
3. SNVT PJSA Citarum, dan;
4. SNVT PJPA Citarum

Dengan organisasi yang ada ini, diharapkan dapat mendukung peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksanaan Teknis khususnya di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

1.2 Sumber Daya Manusia

Menurut data pada tahun 2020 BBWS Citarum memiliki jumlah pegawai dengan total 392 pegawai dengan komposisi pegawai PNS sebesar 237 orang dan Non PNS sebanyak 155 orang. Meskipun demikian jumlah tersebut masih cukup untuk menunjang kegiatan yang ada.

1.3 Fasilitas Pendukung

Ketersediaan fasilitas pendukung berupa sarana dan prasarana merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan pembangunan yang berkualitas. Pada BBWS Citarum jumlah sarana dan prasarana adalah sebagai berikut (Rincian terlampir):

1. Komputer dan peralatan komunikasi: 242 Unit.
2. Kendaraan dinas operasional dinas (KDO) : 218 Unit.
3. Peralatan berat, seperti: Truck/dumptruck, excavator: 12 unit.
4. Mesin pompa air :76 unit.
5. Kapal Keruk (Dredger): 1 Unit
6. Gedung Kantor, baik di Struktural maupun yang dimiliki masing-masing PPK dengan jumlah 5 Unit.

Sarana dan prasarana diatas telah memberikan dukungan yang cukup terhadap pelaksanaan anggaran tahun 2020. Peralatan berat, peralatan komunikasi dan komputer serta kendaraan dinas operasional misalnya, telah memberikan andil yang besar untuk mendukung kegiatan-kegiatan operasi dan pemeliharaan dalam upaya terjaganya fungsi infrastruktur sumber daya air yang telah terbangun.



1.4 Kesiapsiagaan Tanggap Darurat

Kesiapsiagaan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu wilayah yang rawan terhadap bencana. Dan untuk menghadapi hal tersebut BBWS Citarum setiap tahunnya membentuk tim Satgas Siaga bencana dengan tugas dan fungsi masing masing. Dan untuk mendukung itu BBWS Citarum mempunyai peralatan pendukung siaga Banjir berupa Alat berat seperti excavator, Crane, Buldozer, Wheel Loader, Truck, Perahu dan pompa mobile. Selain alat tersebut BBWS Citarum memiliki Pos Curah Hujan, Pos Duga Air dan Kualitas air untuk memantau tiap harinya, terutama pada musim hujan yang tersebar di WS Citarum.

2. Kelemahan

1. Struktur Organisasi

Terdapat perubahan struktur organisasi dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, namun dengan perubahan struktur diindikasikan dapat pula menimbulkan miskomunikasi yang dapat menghambat pelaksanaan tugas khususnya sebagai akibat dari kelompok pegawai yang masih berfikir dalam konteks *bussines as usual* (pro status quo).

2. Sumber Daya Manusia

Belum adanya upaya sistimatis untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM yang handal khususnya dalam mengantisipasi perubahan teknologi akibat era disrupsi, dan belum jamaknya pelaksanaan program pembinaan pegawai yang dibutuhkan sesuai dengan tuntutan tugas Unit Kerja ke depan. Selain itu, Efektifitas kinerja balai dikaitkan dengan komposisi pegawai yang ada masih perlu dikaji lebih lanjut, namun dirasakan bahwa sudah terdapat indikasi bahwa BBWS Citarum mulai mengalami kekurangan tenaga teknis (engineers) serta beberapa indikasi lain yang



menunjukkan adanya gap kompetensi jika dibandingkan dengan tuntutan kebutuhan SDM dalam mendukung target kinerja.

3. Pertumbuhan kebutuhan air lebih cepat daripada penyediaan SDA

Perbandingan pertumbuhan penduduk sekarang ini berbanding lurus dengan kebutuhan air, sementara penyediaan SDA justru berkurang karena banyaknya kebutuhan air baku seperti kebutuhan sehari-hari masyarakat, maupun irigasi.

I.6.3.2. Analisis Lingkungan Eksternal (Peluang dan Tantangan)

1. Peluang

Peluang (opportunities) yaitu situasi dan faktor-faktor luar organisasi yang bersifat positif, yang membantu organisasi mencapai visi dan misi.

a. Task Environment

Task Environment merupakan faktor yang secara langsung berinteraksi dan mempengaruhi organisasi seperti: pelanggan, konsumen, stakeholder. Dalam hal ini yaitu Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten), BUMN (PJT, Indonesia Power, PJB, dll) Kontraktor, Konsultan, & masyarakat. Sinkronisasi program dan kegiatan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dilakukan melalui forum RDP, Musrembang dan Forum Konsultasi Publik. Sebagai contoh antara lain dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat, Balai Besar Wilayah Sungai Citarum memberikan gambaran mengenai Rencana Strategis sebagai bahan acuan dan pertimbangan sehingga terjadi sinergitas antara Program Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat begitu pula sebaliknya. Dalam forum yang diselenggarakan dihadiri pula oleh elemen masyarakat sebagai perwakilan yang dapat menyampaikan pendapatnya sebagai bahan masukan.

b. Economic Environment

Berdasarkan data dari BPS, perekonomian Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku triwulan III-2020 mencapai Rp 3.894,7 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai



Rp 2.720,6 triliun. Ekonomi Indonesia triwulan III-2020 tumbuh membaik sebesar 5,05 persen (q-to-q) dibanding triwulan II-2020 yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 4,19 persen. Pada November 2020 terjadi inflasi sebesar 0,28 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 105,21. Tingkat inflasi tahun kalender (Januari–November) 2020 sebesar 1,23 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (November 2020 terhadap November 2019) sebesar 1,59 persen. Nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS pada Tahun 2020 berkisar antara Rp 14.000,- s.d. Rp 15.000,- per Dollar AS.

c. *Technological Environment*

Perkembangan teknologi baik jaringan internet maupun aplikasi di smartphone sangat mendukung dalam operasinal pekerjaan. Saat ini terdapat Program dan Aplikasi pendukung yang terintegrasikan ke dalam 1 (satu) database di kantor Kementerian PUPR pusat di Jakarta. Untuk mendukung hal tersebut, Kantor Balai Besar Wilayah Sungai Citarum mempersiapkan jaringan internet dengan kecepatan mencapai 100 Mbps.

d. *Social Environment*

Dalam mendukung upaya keterbukaan dan transparansi publik, Balai Besar Wilayah Sungai Citarum membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) yang menggambarkan kinerja yang dicapai atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai oleh APBN/APBD. Selain itu BBWS Citarum mempunyai website yang berisikan banyak informasi baik itu mengenai program yang sedang berjalan, berita terkini, permohonan data, peraturan, dan lain – lain yang bisa diakses oleh semua lapisan masyarakat.

e. *Ecological Environment*

Kondisi lingkungan Kantor Balai Besar Wilayah Sungai Citarum masih cukup baik karena berada di Jalan Inspeksi Sungai Cidurian yang terletak sekitar 500m dari Jalan Nasional dan berada di tengah permukiman penduduk sehingga tidak terkena polusi udara dan kebisingan lalu lintas.

f. *Political Environment*

Acuan normatif pada dokumen Pola PSDA WS Citarum sudah mengalami



pemuktahiran, khususnya dengan diberlakukannya Undang-Undang Sumber Daya Air Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air yang dan beberapa peraturan lainnya. Kemudian pada awal tahun 2018 telah digalakkan kegiatan kegiatan Citarum Harum yang diprakarsai oleh Perpres Nomor 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum yang telah memberikan perubahan besar pada pengelolaan sungai pada DAS Citarum.

g. *Security Environment*

Dalam pelaksanaan Program Citarum Harum bekerjasama dengan kesatuan militer yaitu Komando Distrik Militer (Kodim) yang dibagi dalam beberapa sektor sepanjang aliran Sungai Citarum sehingga kegiatan dilapangan dapat berjalan dengan aman terkendali.

2. Tantangan

a. *Task Environment*

Dalam pelaksanaannya dilapangan masih terjadi ego sektoral antara berbagai instansi/stakeholder sehingga menjadi penghambat dalam pelaksanaan percepatan pembangunan.

b. *Economic Environment*

Bank Indonesia (BI) memberi sinyal tingkat daya beli masyarakat akan lemah sampai akhir 2020. Hal ini akan memberi dampak pada rendahnya kontribusi pertumbuhan konsumsi ke perekonomian nasional tahun ini. Hal ini memberikan tekanan kepada APBN agar dapat segera dibelanjakan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

c. *Technological Environment*

Banyaknya user/pengguna jaringan internet mengakibatkan menurunnya kecepatan sehingga pengiriman data menjadi terhambat atau terlambat. Perlunya peningkatan SDM pegawai BBWS Citarum dalam penggunaan program dan aplikasi pendukung operasional pekerjaan.



d. *Social Environment*

Data yang tersebar di beberapa bagian belum terintegrasi dan terkumpul dengan baik sehingga penyajian dan penyampaian data yang lengkap dan akurat masih terhambat.

e. *Ecological Environment*

Akses jalan menuju Kantor Balai Besar Wilayah Sungai Citarum perlu dilakukan pelebaran untuk mempermudah lalu lintas peralatan dan kendaraan berat serta kendaraan operasional.

f. *Political Environment*

Perlu turunan dari peraturan yang ada agar lebih lengkap dan mendetail sehingga dapat menjadi acuan yang jelas dalam pelaksanaan dilapangan.

g. *Security Environment*

Memperluas kerjasama dengan kesatuan aparat penegak hukum lainnya sehingga mendapat lebih banyak dukungan dan pengamanan pelaksanaan kegiatan dilapangan.

Analisis *Strengths Weaknesses Opportunities Threats (SWOT)* merupakan analisis strategis perencanaan teknis suatu lembaga atau instansi yang digunakan untuk mencapai tujuan suatu pekerjaan atau rencana. Pada WS Citarum analisis *SWOT* ini dibuat lebih rinci dan menjadi acuan dalam RENSTRA.



Gambar I.13. Diagram *SWOT* di WS. Citarum



BAB II TUJUAN DAN SASARAN

II.1 Intemalisasi Visi dan Misi Kementerian PUPR

II.1.1. Visi

Berdasarkan kondisi, potensi dan permasalahan serta tantangan yang akan dihadapi pada periode 2020 – 2024, ditetapkan visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR):

“Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal, Responsif, Inovatif dan Profesional dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden:

“Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”

II.1.2. Misi

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

1. Memberikan dukungan teknis dan administratif serta analisis yang cepat, akurat, dan responsive kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Presiden dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sumber daya air, konektivitas, perumahan dan permukiman dalam suatu pengembangan infrastruktur wilayah yang terpadu.
3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang tata kelola, perencanaan, pengawasan, informasi, dan hubungan kelembagaan.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.



Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, sebagai bagian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mendukung pencapaian visi kementerian melalui pencapaian misi ke-2, yaitu: “Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Presiden dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sumber daya air, konektivitas, perumahan dan permukiman dalam suatu pengembangan infrastruktur wilayah yang terpadu.”

II.2 Tujuan dan Sasaran Kementerian PUPR

II.2.1. Tujuan

Guna mendukung pencapaian visi dan misi, tujuan Kementerian PUPR 2020-2024 diformulasikan sebagai berikut:

1. Peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses serta efisiensi pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan energi, industri dan sektor ekonomi unggulan, serta konservasi dan pengurangan risiko/kerentanan bencana alam.
2. Peningkatan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata bagi peningkatan pelayanan sistem logistik nasional yang lebih efisien dan penguatan daya saing.
3. Peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak dan aman menuju terwujudnya smart living, dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
4. Peningkatan pembinaan SDM untuk pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional.
5. Peningkatan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, bersih dan terpercaya yang didukung oleh SDM Aparatur yang berkinerja tinggi.

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, sebagai bagian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mendukung pencapaian tujuan kementerian melalui pencapaian tujuan ke-1, yaitu: “Peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses serta efisiensi pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan



produktivitas pertanian, pengembangan energi, industri dan sektor ekonomi unggulan, serta konservasi dan pengurangan risiko/kerentanan bencana alam.”

II.2.2. Sasaran

Dalam rangka pencapaian visi, misi, dan tujuan Kementerian PUPR 2020-2024, ditetapkan 5 (lima) Sasaran Strategis (SS) yang disertai dengan indikator kinerja Sasaran Strategis yang merupakan bagian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian PUPR yang akan dicapai selama periode 2020 – 2024, yaitu:

1. SS-1. Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur Sumber Daya Air
2. SS-2. Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional.
3. SS-3. Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau.
4. SS-4. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan professional
5. SS-5. Sasaran Strategis kelima (SS-5), yakni: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya.

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, sebagai bagian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mendukung pencapaian tujuan kementerian melalui pencapaian SS-1, yaitu: “Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur Sumber Daya Air.”

II.3 Tujuan dan Sasaran Direktorat Jenderal SDA

II.3.1. Tujuan

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian PUPR tahun 2020-2024, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air menjabarkan visi Kementerian PUPR tersebut ke dalam tujuan dan sasaran program dan kegiatan sesuai dengan peran, tugas dan fungsinya sebagaimana diatur oleh peraturan perundangundangan. Penjabaran visi dan misi tersebut juga mempertimbangkan pencapaian pembangunan terkait bidang Sumber Daya Air 2015-2019, potensi dan permasalahan, tantangan utama pembangunan yang dihadapi lima tahun ke depan



serta sasaran utama dan arah kebijakan pembangunan nasional dalam RPJMN tahun 2020-2024.

Tujuan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air 2020-2024 sebagai berikut:

1. Tujuan 1: Menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sumber daya air untuk mendukung pencapaian target infrastruktur pelayanan dasar dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas.
2. Tujuan 2: Menyelenggarakan tatakelola pengelolaan SDA yang terpadu dan berkelanjutan untuk pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan, infrastruktur ketahanan bencana, serta waduk multiguna dan modernisasi irigasi, dalam rangka penyediaan infrastruktur pelayanan dasar.
3. Tujuan 3: Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi Direktorat Jenderal SDA yang meliputi: sumber daya manusia, sarana prasarana pendukung, pengendalian dan pengawasan, serta sumber daya yang lainnya untuk meningkatkan kehandalan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat bidang sumber daya air yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

II.3.2. Sasaran

Berdasarkan Sasaran Strategis (SS) Kementerian PUPR 2020-2024, Direktorat Jenderal SDA mendukung SS-1, yaitu: Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur Sumber Daya Air. Pencapaian Sasaran Strategis ini dapat dilihat dari 4 (empat) indikator, yaitu:

1. Persentase penyediaan air baku untuk air bersih di wilayah sungai kewenangan Pusat (%)
2. Presentase peningkatan perlindungan banjir di WS kewenangan Pusat (%)
3. Kapasitas tampung per kapita (m³/kapita)
4. Volume layanan air untuk meningkatkan produktivitas irigasi (m³/tahun/ha)

Perwujudan Sasaran Strategis (SS) tersebut digambarkan melalui 2 (dua) Sasaran Program (SP) yang menunjukkan kinerja Direktorat Jenderal SDA, yaitu:



- a. Sasaran Program Teknis: Meningkatnya Ketersediaan Air Melalui Pengelolaan Sumber Daya Air Secara Terintegrasi. Pencapaian Sasaran Program ini dapat dilihat dari 10 indikator, yaitu:
1. Jumlah penambahan kapasitas layanan sarana prasarana air baku yang terbangun
 2. Penurunan luas kawasan terkena dampak banjir
 3. Tingkat pengendalian lumpur Sidoarjo
 4. Jumlah kumulatif penambahan kapasitas tampung sumber sumber air yang dibangun
 5. Jumlah potensi tenaga listrik dari infrastruktur SDA
 6. Jumlah DAS yang direvitalisasi
 7. Jumlah penambahan luas layanan irigasi padi yang dibangun melalui APBN, APBD, dan DAK
 8. Jumlah luas daerah irigasi yang direhabilitasi melalui APBN, APBD dan DAK
 9. Jumlah DAS yang menerapkan modernisasi hidrologi
 10. Tingkat layanan prasarana SDA
- b. Sasaran Program Generik: Meningkatnya Dukungan Manajemen Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya. Pencapaian Sasaran Program ini merupakan bagian dari kinerja bersama seluruh organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal SDA, yang dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR. Pencapaian kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal SDA diukur dari indikator: Tingkat kualitas dukungan manajemen Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya (%).

Guna mewujudkan Sasaran Program, pada internal proses Direktorat Jenderal SDA dilakukan beberapa kegiatan, yang masing-masing kegiatan tersebut memiliki Sasaran Kegiatan (SK) guna mencapai Sasaran Program tersebut. Ditetapkan ada 11 Sasaran Kegiatan dengan masing-masingnya memiliki indikator pencapaiannya masing-masing.



II.4 Tujuan dan Sasaran Balai Besar Wilayah Sungai Citarum

Balai Besar Wilayah Sungai Citarum adalah Unit Pelaksana teknis dalam bidang konservasi SDA, pengembangan SDA, Pendayagunaan SDA, dan Pengendalian Daya Rusak Air pada Wilayah Sungai Citarum yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air. Adapun tujuan dan sasaran Balai Besar Wilayah Sungai Citarum mengacu pada tugas dan fungsi Balai Besar Wilayah Sungai sebagai unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

II.4.1. Tujuan

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran program Direktorat Jenderal Sumber Daya Air tahun 2020 – 2024, Balai Besar Wilayah Sungai Citarum menjabarkan visi Direktorat Jenderal Sumber Daya Air tersebut ke dalam tujuan dan sasaran kegiatan sesuai dengan peran, tugas dan fungsinya sebagaimana diatur oleh peraturan perundangundangan. Penjabaran visi dan misi tersebut juga mempertimbangkan pencapaian pembangunan terkait bidang Sumber Daya Air 2015-2019, potensi dan permasalahan, tantangan utama pembangunan yang dihadapi lima tahun ke depan serta sasaran utama dan arah kebijakan pembangunan nasional dalam RPJMN tahun 2020-2024.

Tujuan Balai Besar Wilayah Sungai Citarum 2020-2024 sebagai berikut:

1. Keterpaduan perencanaan, pemograman, penganggaran dan evaluasi yang optimal sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daya dukung lingkungan serta sesuai dengan kebijakan pembangunan nasional dan daerah yang berkelanjutan.
2. Meningkatnya kinerja jaringan irigasi, produksi dan produktivitas melalui rehabilitasi, modernisasi dan penambahan luas jaringan irigasi sehingga dapat meningkatkan fungsi layanan irigasi.
3. Meningkatnya layanan infrastruktur sumber daya air yang berintegrasi dengan ketahanan bencana yaitu pencegahan, mitigasi, peringatan dini, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.



4. Meningkatnya ketersediaan tampungan sumber – sumber air untuk menunjang konservasi air, ketersediaan air irigasi yang handal untuk menunjang kedaulatan pangan, dan meningkatnya pengendalian daya rusak air untuk mitigasi bencana.
5. Meningkatnya layanan infrastruktur untuk penyediaan air baku dan air tanah dan optimalisasi air baku dan air tanah untuk keberlanjutan konservasi sumber daya air.
6. Meningkatnya keberlanjutan fungsi infrastruktur sumber daya air melalui kegiatan operasi dan pemeliharaan infrastruktur sumber daya air.

II.4.2. Sasaran

Sasaran kegiatan Balai Besar Wilayah Sungai Citarum merupakan penjabaran dari sasaran strategis, sasaran program Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR 2020 – 2024. Sasaran Kegiatan Balai Besar Wilayah Sungai Citarum adalah sebagai berikut :

Tabel II.1. Sasaran Kegiatan Balai Besar Wilayah Sungai Citarum

KODE	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN
5036	Pengembangan Jaringan Irigasi Permukaan, Rawa, dan Non-Padi	Meningkatnya layanan jaringan irigasi
5037	Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai	Meningkatnya layanan infrastruktur SDA untuk ketahanan bencana
5039	Pengembangan Bendungan, Danau, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Meningkatnya layanan tampungan air
5040	Pengembangan Jaringan Air Tanah dan Air Baku	Meningkatnya layanan sarana prasarana penyediaan air tanah dan air baku
5300	Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana SDA serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana	Meningkatnya kinerja layanan OP sarana prasarana SDA



Penjabaran Matrik Peta Sasaran sebagai berikut :

Tabel II.2. Peta Sasaran Kegiatan Balai Besar Wilayah Sungai Citarum

Costumers/ Stakeholder	SASARAN KEGIATAN				
	1. Meningkatnya Layanan Irigasi 2. Meningkatnya Layanan Infrastruktur SDA untuk Ketahanan Bencana 3. Meningkatnya Layanan Tampungan Air 4. Meningkatnya Layanan Sarana Prasarana Penyediaan Air Tanah dan Air Baku 5. Meningkatnya Kinerja Layanan OP				
Learning & Growth	OUTPUT	OUTPUT	OUTPUT	OUTPUT	OUTPUT
	1. Penambahan luas layanan irigasi padi seluas 4.500 Ha 2. Rehabilitasi dan Modernisasi seluas 201. 168 Ha	1. Penurunan luas dampak banjir dengan normalisasi dan rehabilitasi (saluran 2. Pembangunan Cekdam 29 buah 3. Membangun pengaman pantai 4. Penataan oxbow dan sempadan	1. Pembangunan 3 bendungan baru (air baku 20,16 m3/det, irigasi 20,65 m3/det) 2. Pembangunan embung 0.33 juta m3 3. Rehabilitasi situ	1. Penyediaan air baku 18,14 m3/det 2. Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan JIAT yang tersebar di semua kabupaten dan kota di WS. Citarum	1. Peningkatan layanan prasarana sumber daya air
Internal Process	OUTPUT LAYANAN INTERNAL				
	1. Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemograman, dan penganggaran 2. Meningkatnya ketahanan air 3. Meningkatnya pengendalian dan pengawasan intern				

Sumber : Hasil Analisis BBWS Citarum



BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

III.1 Arah Kebijakan dan Strategis Kementerian PUPR

Arah kebijakan dan strategi Kementerian PUPR 2020 – 2024 dirumuskan dalam kerangka pembangunan yang komprehensif dengan melibatkan Pemerintah Daerah dan Swasta. Arah kebijakan dan strategi Kementerian PUPR dibagi ke dalam dua bentuk, yaitu: arah kebijakan dan strategi utama pada masing-masing sektor serta arah kebijakan dan strategi lintas sektor.

III.1.1. Arah Kebijakan dan Strategi Sektor Sumber Daya Air

Kebijakan dan strategi sektor sumber daya air pada Peraturan Menteri PUPR nomor 23 tahun 2020 tentang Renstra Kementerian PUPR 2020-2024 diarahkan selaras dengan kebijakan dan strategi pada Prioritas Nasional ke-5, khususnya pada Program Prioritas Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar, yang meliputi:

a. Arah kebijakan dan strategi pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan

Kebijakan pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan diarahkan pada percepatan penyediaan air baku dari sumber air terlindungi, peningkatan kebijakan pengelolaan sumber daya air terpadu dan pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan air baku. **Strategi untuk percepatan penyediaan air baku dari sumber air terlindungi** antara lain:

- (1) Penambahan kapasitas air baku dari bendungan dan sumber air lainnya didukung oleh pengamanan kualitas air;
- (2) Rehabilitasi dan peningkatan efisiensi infrastruktur penyedia air baku;
- (3) Pelaksanaan konservasi air tanah yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air baku serta didukung oleh penegakan peraturan pengambilan air tanah. Strategi tersebut perlu dikembangkan secara bersamaan dengan peningkatan kinerja Instalasi Pengolahan Air (IPA) dan sistem distribusi air bersih. Percepatan sistem penyediaan air baku juga perlu melibatkan badan



usaha. Ketersediaan air secara berkelanjutan juga perlu didukung oleh peningkatan kesadaran masyarakat terhadap perilaku hemat air; dan

(4) Penyusunan Indeks Ketahanan Air dimana Kementerian PUPR mendukung penyusunan Indeks Ketahanan Air Nasional bersama dengan Kementerian/Lembaga terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Strategi untuk peningkatan kebijakan pengelolaan sumber daya air terpadu antara lain:

(1) Peningkatan Penyelesaian peraturan pemerintah terkait UU Sumber Strategi untuk pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan sumber daya air Daya Air;

(2) Peningkatan kinerja pengelolaan wilayah sungai melalui optimalisasi pola rencana SDA dalam jejaring air, pangan, dan energi;

(3) Perkuatan pengelolaan sumber daya air dan peningkatan kapasitas BUMN/D/S dan KPBU air baku/air minum;

(4) Penyusunan Indeks Ketahanan Air.

Strategi peningkatan kebijakan pengelolaan sumber daya air terpadu dan pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan air baku antara lain:

(1) Pengembangan sistem informasi sumber daya air;

(2) Pengembangan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi yang terintegrasi dengan manajemen sumber daya air (DSS, forecasting, early warning) dengan memanfaatkan teknologi baru (satelit, radar, real-time system, water accounting systems) serta pola pikir baru (antara lain: model based management, uncertainty analysis, dan community based data).

b. Arah kebijakan dan strategi perwujudan waduk multiguna dan modernisasi irigasi

Kebijakan perwujudan waduk multiguna dan modernisasi irigasi diarahkan pada penambahan kapasitas tampungan air, peningkatan dan pemanfaatan fungsi tampungan air, peningkatan kinerja bendungan dan penurunan indeks



risiko bendungan, peningkatan efisiensi dan kinerja sistem irigasi, dan penyediaan air untuk komoditas pertanian bernilai tinggi.

Strategi untuk penambahan kapasitas tampungan air antara lain:

- (1) Perencanaan bendungan multiguna dengan protocol berkelanjutan;
 - (2) Perencanaan pemanfaatan tampungan alami;
 - (3) Rehabilitasi bendungan kritis;
 - (4) Pembangunan bendungan multiguna dengan melibatkan badan usaha.
- Strategi tersebut didukung oleh pengembangan kawasan ekonomi terintegrasi berbasis bendungan multiguna serta penerapan skema investasi bendungan baru yang melibatkan badan usaha.

Strategi untuk peningkatan dan pemanfaatan fungsi tampungan air adalah:

- (1) Pemanfaatan bendungan untuk berbagai keperluan secara terpadu seperti air baku, irigasi, dan pengendali banjir;
- (2) Pengembangan potensi waduk untuk penyediaan energi terbarukan;
- (3) Revitalisasi danau kritis;
- (4) Pemanfaatan potensi danau untuk air baku, dan kebutuhan lainnya.

Strategi tersebut didukung oleh peningkatan dan pemulihan kondisi waduk serta pengembangan skema Kerjasama dengan BUMN dan badan usaha dalam optimalisasi fungsi waduk.

Strategi untuk peningkatan kinerja bendungan dan penurunan risiko bendungan antara lain:

- (1) Peningkatan tingkat keamanan bendungan dengan risiko tinggi;
- (2) Konservasi daerah tangkapan air bendungan;
- (3) Peningkatan kapasitas SDM bidang pengelolaan bendungan;
- (4) Peningkatan kinerja operasi bendungan yang sesuai standar dan didukung oleh unit pengelola bendungan yang kompeten.

Strategi tersebut didukung oleh penataan asset bendungan sebagai barang milik negara.



Strategi untuk peningkatan efisiensi dan kinerja sistem irigasi dengan penerapan konsep modernisasi irigasi antara lain:

- (1) Peningkatan keandalan penyediaan air irigasi;
- (2) Perbaikan sarana dan prasarana irigasi
- (3) Penyempurnaan system pengelolaan irigasi;
- (4) Penguatan institusi pengelola irigasi;
- (5) Pemberdayaan sumber daya manusia pengelola irigasi.

Strategi untuk penyediaan air untuk komoditas pertanian bernilai tinggi antara lain:

- (1) Pembangunan tampungan air dan sistem irigasi untuk komoditas perkebunan, peternakan, hortikultura dan perikanan;
- (2) Pembangunan jaringan irigasi untuk tambak rakyat;
- (3) Pengembangan mikro irigasi terutama untuk lahan belum termanfaatkan dengan optimal.

Strategi tersebut didukung oleh peningkatan peran pemerintah daerah, partisipasi masyarakat, dan kemitraan dengan badan usaha dalam pengelolaan irigasi.

c. Arah kebijakan dan strategi perwujudan ketahanan kebencanaan infrastruktur

Kebijakan pembangunan infrastruktur ketahanan bencana diarahkan pada pengembangan infrastruktur tangguh bencana dan penguatan infrastruktur vital, pengelolaan terpadu kawasan rawan bencana, serta restorasi dan konservasi daerah aliran sungai.

Strategi untuk pengembangan infrastruktur tangguh bencana dan penguatan infrastruktur vital terhadap risiko bencana banjir, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, lumpur, dan sedimen antara lain:

- (1) Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur Tangguh bencana di kawasan prioritas rawan bencana;
- (2) Penilaian dan peningkatan keamanan infrastruktur vital terhadap bencana;
- (3) Penetapan standar bangunan tangguh bencana;



(4) Pengembangan infrastruktur hijau. Strategi tersebut didukung oleh peningkatan kualitas industri konstruksi serta pengawasan mutu dan manajemen rantai pasok industri konstruksi. Kolaborasi antara lembaga penelitian dan pelaku industri dalam penguasaan teknologi juga perlu ditingkatkan serta didukung oleh peningkatan kualitas SDM di bidang konstruksi. Selain itu, perlu adanya inovasi pendanaan untuk meningkatkan efisiensi penganggaran dalam upaya peningkatan ketahanan bencana.

Strategi untuk mendukung pengelolaan terpadu kawasan rawan bencana antara lain:

- (1) Peningkatan Program terintegrasi dalam pengelolaan risiko bencana, khususnya risiko banjir pada daerah perkotaan, dengan kombinasi pendekatan struktural dan nonstruktural termasuk infrastruktur hijau;
- (2) Penetapan rencana induk ketahanan wilayah terhadap bencana;
- (3) Penyusunan peta risiko bencana berdasarkan karakteristik wilayah;
- (4) Pengembangan sistem pemantauan penurunan tanah;
- (5) Penyediaan sistem peringatan dini bencana banjir dan tanah longsor;
- (6) Koordinasi yang kuat dengan Kementerian/Lembaga terkait.

Strategi untuk mendukung restorasi dan konservasi daerah aliran sungai antara lain:

- (1) Normalisasi dan peningkatan kapasitas aliran sungai;
- (2) Konservasi kawasan rawa dan gambut;
- (3) Pengendalian pencemaran pada waduk dan danau dengan tingkat pencemaran tinggi;
- (4) Koordinasi dan kerjasama dengan KLHK dan Pemda setempat untuk konservasi dan restorasi daerah hulu.

III.1.2. Arah Kebijakan dan Strategi Lintas Sektor

Kebijakan dan strategi lintas sektor pada Renstra Kementerian PUPR 2020-2024 diarahkan pada pembangunan berbasis pengembangan wilayah, pengarusutamaan gender, dan pengarusutamaan infrastruktur PUPR tangguh bencana.



a. Arah kebijakan dan strategi pembangunan infrastruktur berbasis pengembangan wilayah

Dalam lima tahun mendatang (2020-2024), sasaran pembangunan kewilayahan yang akan dicapai yaitu “Menurunnya kesenjangan antarwilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI yaitu Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua, dan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa Bali dan Sumatera”. Untuk mencapai sasaran tersebut, kebijakan dan strategis Pembangunan wilayah tahun 2020-2024 antara lain:

1. Meningkatkan pemerataan antarwilayah KBI dan KTI maupun Jawa dan luar Jawa, melalui strategi pembangunan;
2. Meningkatkan keunggulan kompetitif pusat-pusat pertumbuhan wilayah dengan
 - (i) optimalisasi kawasan strategis prioritas seperti KEK, KI, DPP, dan kawasan lainnya;
 - (ii) optimalisasi Wilayah Metropolitan (WM) dan kota besar di luar Jawa dan meningkatkan daya dukung lingkungan untuk WM dan kota besar di Jawa;
 - (iii) pembangunan kota baru dan pembangunan Ibu Kota Negara di luar pulau Jawa;
3. Meningkatkan kualitas tata kelola pelayanan dasar, daya saing, serta kemandirian daerah;
4. Meningkatkan sinergi pemanfaatan ruang wilayah.

b. Arah kebijakan dan strategi pengarusutamaan gender Kementerian PUPR

Pengarusutamaan Gender di bidang pekerjaan umum dan perumahan dilaksanakan sesuai arahan pengarusutamaan pembangunan di dalam RPJMN 2020 – 2024, di mana strategi pembangunan nasional harus memasukan perspektif gender untuk mencapai pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia.



c. Arah kebijakan dan strategi pengarusutamaan infrastruktur PUPR tangguh bencana

Arah kebijakan dalam pengarusutamaan infrastruktur PUPR tangguh bencana ditempuh upaya untuk mengakomodasi kondisi kebencanaan di Indonesia yang ditujukan untuk menghasilkan infrastruktur PUPR yang tangguh dan bisa mengurangi risiko bencana serta dapat mengurangi jumlah kerusakan infrastruktur dan lingkungan.

III.2 Arah Kebijakan dan Strategis Direktorat Jenderal SDA

III.2.1. Arah Kebijakan Umum Direktorat Jenderal SDA

Arah kebijakan umum Direktorat Jenderal SDA 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan sumber daya air dilaksanakan dengan memperhatikan keserasian antara konservasi dan pendayagunaan, antara hulu dan hilir, antara pemanfaatan air permukaan dan air tanah, antara pengelolaan demand dan pengelolaan supply yang berkeadilan serta antara pemenuhan kepentingan jangka pendek dan kepentingan jangka panjang.
2. Pengelolaan sumber daya air secara terpadu dilaksanakan di tiap wilayah sungai kewenangan Pusat didasarkan pada rencana tata pengaturan air dan tata pengairan (pola pengelolaan SDA) dan rencana teknis tata pengaturan air dan tata pengairan (rencana pengelolaan SDA), yang diselaraskan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang bersangkutan.
3. Konservasi sumber air dilaksanakan dalam rangka mencapai keseimbangan antara upaya untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek dan upaya untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang.
4. Pengendalian pemanfaatan air tanah seiring dengan peningkatan penyediaan air baku dari air permukaan, pengembangan dan penerapan sistem conjuctive use antara pemanfaatan air permukaan dan air tanah akan digalakkan terutama untuk menciptakan sinergi dan menjaga keberlanjutan ketersediaan air tanah.
5. Pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi difokuskan pada optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang sudah dibangun,



- rehabilitasi pada areal irigasi berfungsi yang mengalami kerusakan dan peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan.
6. Pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air baku untuk air bersih diprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan pokok rumah tangga terutama di wilayah rawan/defisit air, wilayah tertinggal dan wilayah strategis.
 7. Pengendalian daya rusak air terutama dalam hal penanggulangan banjir dilaksanakan selaras antara pendekatan struktural dan pendekatan non-struktural melalui konservasi sumberdaya air dan pengelolaan daerah aliran sungai dengan memperhatikan keterpaduan dengan tata ruang wilayah, diutamakan pada daerah berpenduduk padat, konektivitas antar pusat ekonomi dan kawasan strategis.
 8. Pengamanan pantai-pantai dari abrasi terutama dilakukan pada daerah perbatasan, pulau-pulau kecil, kawasan permukiman, serta pusat kegiatan ekonomi untuk mengurangi disparitas pembangunan wilayah.
 9. Mitigasi dan adaptasi bidang SDA dalam menghadapi dampak negatif perubahan iklim global, khususnya banjir, kekeringan dan kenaikan muka air laut.
 10. Peningkatan partisipasi masyarakat dan kemitraan di antara pemangku kepentingan terus diupayakan pada kegiatan konservasi, pendayagunaan, serta pengendalian daya rusak, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga operasi dan pemeliharaan infrastruktur SDA.
 11. Penataan kelembagaan Direktorat Jenderal SDA melalui pengaturan kembali kewenangan dan tanggung jawab masing- masing pemangku kepentingan serta kemungkinan berbagi peran atau role sharing dalam pengelolaan SDA secara terpadu.
 12. Penataan dan penguatan sistem pengelolaan data dan informasi sumber daya air dilakukan secara terencana dan dikelola secara berkesinambungan dalam rangka pelayanan data dan informasi, baik ke dalam maupun ke luar Direktorat Jenderal SDA.



13. Penerapan “*living in harmony with mud*” dalam pengendalian lumpur Sidoarjo. Hal ini dengan mempertimbangkan pendapat sebagian ahli Geologi bahwa semburan lumpur panas Sidoarjo tidak mungkin bisa dihentikan.

III.2.2. Strategi Operasional Direktorat Jenderal SDA

Dalam rangka mencapai arah kebijakan di tingkat nasional dan di tingkat Kementerian PUPR, strategi operasional Direktorat Jenderal SDA 2020-2024 antara lain:

III.2.2.1 Strategi Operasional Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Berkelanjutan.

Strategi operasional pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan oleh Direktorat Jenderal SDA pada 2020-2024 diarahkan untuk memenuhi kebutuhan air untuk kehidupan sehari-hari masyarakat serta untuk kebutuhan sosial dan ekonomi produktif seperti kawasan pertanian, kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, daerah pariwisata prioritas, kawasan perkotaan dan metropolitan, dan Kawasan strategis lainnya, melalui:

1. Peningkatan kapasitas air baku sebesar 50 m³/detik, melalui pembangunan sarana prasarana penyediaan air baku, dengan sumber air permukaan, air tanah, atau sumber-sumber lainnya yang tersedia.
2. Peningkatan kapasitas air baku menggunakan sumber air permukaan difokuskan pada pemanfaatan potensi air baku dari bendungan yang ditargetkan selesai hingga tahun 2024 dengan kapasitas sebesar 23,4 m³/detik.
3. Peningkatan kapasitas air baku menggunakan sumber air tanah difokuskan pada daerah yang memiliki cekungan air tanah.
4. Penyediaan air baku komunal pada beberapa daerah yang sulit air dilakukan melalui penyediaan sumur dan pemanfaatan air hujan menggunakan pendekatan akuifer buatan simpanan air hujan (ABSABH) dan pemanenan air hujan (PAH).



5. Pengembalian fungsi dan kondisi sarana prasarana pengelolaan air baku dengan melaksanakan rehabilitasi sarana prasarana air baku yang rusak akibat umur konstruksi atau akibat kejadian bencana.
6. Pemanfaatan sumber air baku dilakukan dengan memperhatikan aspek keterpaduan dengan RTRW serta pola dan rencana pengelolaan SDA dan didasarkan atas desain yang menyeluruh mulai dari unit air baku, unit produksi, hingga unit distribusi.
7. Pemanfaatan air tanah sebagai sumber air baku dilaksanakan dengan tetap memperhatikan aspek pengendalian pemanfaatan air tanah, didukung oleh penegakan peraturan pengambilan air tanah dalam kerangka aspek konservasi air tanah dan air baku pada seluruh Unit Pelaksana Teknis dilingkungan Direktorat Jenderal SDA.
8. Penerapan sistem integrasi air permukaan dan air tanah untuk air baku di seluruh Unit Pelaksana Teknis dilingkungan Direktorat Jenderal SDA
9. Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana prasarana penyediaan air baku untuk menjaga keberlanjutan fungsi sarana prasarana, didukung oleh anggaran yang sesuai dengan Angka Kebutuhan Nyata O&P (AKNOP) secara bertahap serta kesiapan sumber daya manusia (SDM) dan regulasi.

III.2.2.2 Strategi Operasional Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur

Strategi operasional ketahanan kebencanaan infrastruktur oleh Direktorat Jenderal SDA pada 2020-2024 diarahkan untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam mengurangi risiko daya rusak air termasuk perubahan iklim, melalui penanganan kawasan yang terkena dampak banjir, sedimen/lahar gunung berapi, abrasi pantai, dan pencemaran air yang akan dicapai, baik melalui strategi dengan pendekatan struktural, maupun non-struktural, melalui:

1. Pengembangan infrastruktur tangguh bencana dan penguatan infrastruktur vital terhadap risiko bencana, meliputi:
 - a. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur Tangguh bencana, berupa infrastruktur pengendali banjir, pengendali sedimen, pengendali lahar gunung berapi, dan pengamanan pantai dari abrasi.



- b. Pembangunan infrastruktur pengendali banjir sepanjang 1.971 Km, berupa tanggul banjir, kanal banjir, dan penataan drainase utama perkotaan, difokuskan pada ibukota provinsi, kawasan Pantai Utara Jawa (Pantura Jawa), kawasan perkotaan, kawasan metropolitan, kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus, 10 KSPN Prioritas, daerah aliran sungai (DAS) prioritas, dan kawasan strategis lainnya.
- c. Pembangunan pengendali sedimen sebanyak 126 unit, berupa checkdam dan infrastruktur pengendali sedimen lainnya, difokuskan pada kawasan rawan longsor, kawasan memiliki aliran debris tinggi, dan kawasan rawan bencana sedimen lainnya.
- d. Pembangunan pengendali lahar gunung berapi sebanyak 58 unit, berupa sabo dam dan infrastruktur pengendali lahar lainnya, difokuskan pada kawasan rawan terdampak oleh gunung berapi, antara lain di Kawasan Gunung Sinabung (Sumatera Utara), Gunung Merapi (DIY dan Jawa Tengah), Gunung Agung (Bali), Gunung Lokon (Sulawesi Utara), dan kawasan gunung api aktif lainnya.
- e. Pembangunan pengaman pantai dari abrasi sepanjang 129 Km, berupa tanggul pantai, penahan ombak, tanggul laut, dan infrastruktur pengaman pantai lainnya, difokuskan pada kawasan Pantai Utara Jawa (Pantura Jawa), Kawasan perbatasan NKRI, kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus, 10 KSPN Prioritas, dan kawasan strategis lainnya.
- f. Pengembalian fungsi dan kondisi infrastruktur ketahanan bencana dengan melaksanakan rehabilitasi infrastruktur pengendali banjir, pengendali sedimen, pengendali lahar gunung berapi, dan pengaman pantai, yang rusak akibat umur konstruksi atau akibat kejadian bencana.
- g. Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan infrastruktur pengendali banjir, pengendali sedimen, pengendali lahar gunung berapi, dan pengaman pantai untuk menjaga keberlanjutan fungsi infrastruktur, didukung oleh anggaran yang sesuai dengan Angka Kebutuhan Nyata O&P (AKNOP) secara bertahap serta kesiapan sumber daya manusia (SDM) dan regulasi.



2. Pengelolaan terpadu kawasan rawan bencana, meliputi:
 - a. Penyusunan masterplan penanganan banjir pada sungaisungai prioritas, sehingga nantinya penanganan banjir akan menyeluruh tidak hanya spot-spot tertentu.
 - b. Penetapan standar bangunan tangguh bencana, terutama pada daerah atau kawasan pasca bencana.
 - c. Pelaksanaan monitoring kualitas air pada sungai-sungai utama di masing-masing wilayah kerja BBWS/BWS.
 - d. Penetapan sempadan sungai dan sumber-sumber air lainnya.
 - e. Pembuatan atau updating (pembaruan) peta rawan bencana yang disebabkan oleh daya rusak air, berdasarkan karakteristik wilayah.
 - f. Pemasangan dan pengoperasian early warning system (EWS) untuk memperpanjang waktu respon terhadap bencana di sungai-sungai utama rawan banjir, alur guguran sedimen (debris flow) dan di daerah rawan longsor.
 - g. Pelibatan Pemerintah Daerah dalam penanganan banjir, drainase perkotaan, dan pencemaran air.
 - h. Pelibatan/pemberdayaan masyarakat dalam upaya pencegahan banjir dan upaya pengurangan pencemaran air, terutama masyarakat yang tinggal di sepanjang sungai.
3. Restorasi dan konservasi pada 4 (empat) daerah aliran sungai (DAS) prioritas, meliputi upaya normalisasi dan peningkatan kapasitas aliran sungai, untuk mendukung penanganan struktural.

III.2.2.3 Strategi Operasional Waduk Multiguna dan Modernisasi Irigasi

Strategi operasional waduk multiguna oleh Direktorat Jenderal SDA pada 2020-2024 diarahkan untuk meningkatkan kapasitas tampungan air dan meningkatkan efisiensi layanan air untuk sistem irigasi, melalui:

1. Penambahan kapasitas tampungan air, meliputi:
 - a. Pembangunan 46 bendungan yang merupakan lanjutan dari target Renstra Direktorat Jenderal SDA 2015-2019, dengan target selesai sebagai berikut:



Gambar III.1. Rencana Target Penyelesaian 46 Bendungan

b. Pembangunan bendungan baru, didukung oleh perencanaan bendungan multiguna dengan protokol berkelanjutan. Dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara, kesiapan pelaksanaan, serta kepastian penyelesaian hingga tahun 2024, pelaksanaan bendungan baru difokuskan sebagai berikut:

- 3 bendungan akan dibangun dengan dana Rupiah Murni, yaitu Mbay, Kedung Langgar, dan Cibeeat
- 4 bendungan akan dibangun dengan dana pinjaman, yaitu Jenelata, Riam Kiwa, Pelosika dan Lambakan
- 2 bendungan akan dibangun melalui KPBU, yaitu Merangin dan Pasir Kopo.

Target dan indikasi lokasi ini berbeda dengan yang ditargetkan pada RPJMN 2020-2024. Ada 2 (dua) bendungan yang ditargetkan pada RPJMN 2020-2024 hingga periode ini diprediksikan baru selesai desainnya melalui Engineering Service Program (ESP), yaitu: Bendungan Rongkong dan Bendungan Digul. Sementara Bendungan Busung ditunda pelaksanaannya dengan pertimbangan kesiapan lahan.

c. Penyiapan dokumen perencanaan pembangunan bendungan baru dengan skema Kerjasama Pemerintah Dan Badan Usaha (KPBU). Penyesuaian target dan indikasi lokasi juga dilakukan dengan mempertimbangkan persiapan skema KPBU dan minat pasar serta kesiapan teknis bendungan. Beberapa bendungan yang ditargetkan pada RPJMN 2020-2024



dilaksanakan dengan skema KPBU, yaitu Bendungan Muara Juloi, Bendungan Sakagilas, Bendungan Krekeh dan Kusan ditunda, diperkirakan tidak dapat selesai pada periode 2020-2024. Pelaksanaan pelaksanaan pembangunan bendungan baru difokuskan pada 2 (dua) bendungan, yaitu Bendungan Merangin dan Bendungan Matenggeng.

- d. Penyiapan dukungan kesiapan pelaksanaan pembangunan 2 (dua) bendungan yang dilaksanakan oleh pihak swasta/BUMN, dengan indikasi lokasi yaitu: Bendungan Kayan (Kalimantan Utara) dan Bendungan Mentarang (Kalimantan Utara).
 - e. Pembangunan embung dan tampung air buatan lainnya sebanyak 500 unit dengan tetap mempertimbangkan fungsi utamanya sebagai embung konservasi atau embung air baku. Embung konservasi difokuskan pada daerah hulu dengan tujuan untuk menaikkan muka air tanah, sementara embung air baku difokuskan pada daerah sulit air atau membutuhkan tampungan air pada bulan-bulan tertentu.
 - f. Pengembalian fungsi dan kondisi bendungan melalui rehabilitasi 5 (lima) bendungan, difokuskan pada bendunganbendungan yang sudah mengalami sedimentasi tinggi atau mengalami penurunan fungsi, antara lain: Bendungan Wonogiri (Jawa Tengah), Bendungan Benanga (Kalimantan Timur), Bendungan Bili-bili (Sulawesi Selatan).
 - g. Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan tampungan buatan berupa bendungan dan embung serta pemeliharaan tampungan alami berupa danau dan situ, untuk menjaga keberlanjutan fungsi tampungan, didukung oleh anggaran yang sesuai dengan Angka Kebutuhan Nyata O&P (AKNOP) secara bertahap serta kesiapan sumber daya manusia (SDM) dan regulasi.
2. Peningkatan dan pemanfaatan fungsi tampungan air, meliputi:
- a. Pemanfaatan bendungan untuk penyediaan air baku dengan potensi kapasitas 23,4 m³/detik, dilakukan secara terpadu dalam kerangka sistem penyediaan air minum (SPAM).



- b. Pemanfaatan bendungan untuk menjamin pengairan daerah irigasi seluas 342.549 Hektar.
 - c. Pemanfaatan bendungan sebagai pengendali banjir daerah hilir, dilakukan terintegrasi dengan sistem pengendalian banjir.
 - d. Pemanfaatan bendungan sebagai sumber energi terbarukan dengan potensi energi sebesar 140,44 MW, dari 46 bendungan selesai, dilakukan berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PT. Perusahaan Listrik Negara (PT. PLN).
 - e. Pelibatan swasta dan badan usaha lainnya dalam pemanfaatan air sebagai sumber energi dilaksanakan melalui mekanisme perijinan sesuai peraturan perundang-undangan.
 - f. Revitalisasi tampungan alami difokuskan pada 15 danau prioritas dan situ-situ kritis pada daerah Jabodetabek dan daerah lainnya.
 - g. Pemanfaatan 4 (empat) danau dan tampungan alami lainnya sebagai sumber air baku, dilakukan dengan studi atau kajian yang menyeluruh.
 - h. Pengendalian pencemaran pada bendungan dan danau dilakukan dengan menetapkan sempadan, penerapan regulasi pembatasan kegiatan yang berpotensi mencemari bendungan dan danau, serta melakukan pengukuran kualitas air secara berkala, berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.
3. Peningkatan kinerja bendungan dan penurunan risiko bendungan, meliputi:
- a. Peningkatan tingkat keamanan bendungan difokuskan pada bendungan-bendungan dengan risiko tinggi, berdasarkan studi atau kajian yang menyeluruh.
 - b. Pengembangan kawasan konservasi daerah tangkapan air bendungan pada 55 kawasan, yang dimungkinkan menjadi bagian pelaksanaan Program Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GN-KPA) sebagai tindak lanjut Kesepakatan Bersama 8 Menteri pada 9 Mei 2015.
 - c. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) bidang pengelolaan bendungan melalui pendidikan dan pelatihan, bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dan Badan Pengembangan SDM Kementerian PUPR.



- d. Peningkatan kinerja operasi bendungan, didukung oleh standar (pedoman) operasional di tiap bendungan yang didukung oleh Rencana Tindak Darurat (RTD), serta pembentukan dan operasionalisasi unit pengelola bendungan (UPB) yang kompeten, di seluruh Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal SDA, yang memiliki infrastruktur bendungan.
 - e. Peningkatan peran masyarakat pada kegiatan konservasi, terutama masyarakat di sekitar sumber air, dengan memanfaatkan wadah koordinasi seperti Dewan SDA, TKPSDA, Komisi Irigasi, dll.
4. Peningkatan efisiensi dan kinerja sistem irigasi dengan penerapan konsep modernisasi irigasi, meliputi:
- a. Pembangunan bendung dan jaringan irigasi baru sebagai satu kesatuan sistem pada daerah irigasi seluas 500 ribu Hektar, terdiri dari 333,5 ribu hektar melalui pendanaan APBN dan 166,5 ribu hektar melalui pendanaan DAK dan/atau APBD, dengan arah pengembangan pada masing-masing wilayah sebagai berikut:
 - Pengembangan irigasi di P. Sumatera diarahkan pada peningkatan sawah tadah hujan menjadi sawah beririgasi dan pengembangan food estate untuk komoditas non-padi.
 - Pengembangan irigasi di P. Jawa diarahkan pada rehabilitasi dan modernisasi daerah irigasi yang telah habis umur ekonomisnya, antara lain DI Jatiluhur (Jawa Barat) dan DI Rentang (Jawa Barat).
 - Pengembangan irigasi di P. Bali diarahkan pada rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi, didukung oleh system pengembangan padi SRI.
 - Pengembangan irigasi di P. Nusa Tenggara diarahkan pada irigasi air tanah, didukung oleh pengembangan sumber sumber air (embung/bendungan).
 - Pengembangan irigasi di P. Kalimantan diarahkan pada pengembangan irigasi rawa, terutama untuk food estate.



- Pengembangan irigasi di P. Maluku diarahkan pada pengembangan irigasi permukaan.
 - Pengembangan irigasi di P. Papua diarahkan pada pengembangan irigasi rawa terutama untuk food estate.
- b. Dalam hal keterbatasan lahan, pengembangan daerah irigasi baru dapat dilakukan dengan melaksanakan revitalisasi kawasan rawa dan gambut, dengan mempertimbangkan tata air rawa dalam rangka pencegahan emisi gas rumah kaca serta mempertimbangkan rencana tata ruang.
 - c. Pengembalian fungsi dan kondisi bendung dan jaringan irigasi sebagai satu kesatuan sistem dengan melaksanakan rehabilitasi bendung dan jaringan irigasi yang rusak akibat umur konstruksi atau akibat kejadian bencana, pada daerah irigasi seluas 2 juta Hektar, terdiri dari 642 ribu hektar melalui pendanaan APBN dan 1.358 ribu hektar melalui pendanaan DAK dan/atau APBD.
 - d. Pemanfaatan bendungan sebagai sumber air untuk irigasi dilakukan dalam rangka meningkatkan luas daerah irigasi yang terjamin airnya melalui bendungan seluas 342.549 Hektar.
 - e. Penyediaan air untuk irigasi menggunakan sumber air tanah difokuskan pada daerah yang memiliki cekungan air tanah (CAT) dan tidak memiliki sumber air permukaan yang mencukupi, dilakukan secara terbatas dengan tetap menjaga dan mengendalikan pemanfaatan air tanah.
 - f. Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan bendung dan jaringan irigasi sebagai satu kesatuan sistem, untuk menjaga keberlanjutan fungsi daerah irigasi serta menjaga efektivitas alokasi air irigasi, didukung oleh anggaran yang sesuai dengan Angka Kebutuhan Nyata O&P (AKNOP) secara bertahap serta kesiapan sumber daya manusia (SDM) dan regulasi.
 - g. Sebagian pelaksanaan operasi dan pemeliharaan dilaksanakan dengan melibatkan Pemerintah Daerah melalui skema Tugas Pembantuan (TP-OP).
 - h. Penataan dan peningkatan kapasitas kelembagaan irigasi, antara lain melalui: pemberdayaan petani (P3A), peningkatan kemampuan personil



O&P, pembentukan dan operasionalisasi Unit Pengelola Irigasi (UPI), peningkatan koordinasi dengan instansi terkait (Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah).

5. Penyediaan air untuk komoditas pertanian bernilai tinggi, meliputi:
 - a. Pembangunan tampungan air dan sistem irigasi untuk kegiatan perkebunan, peternakan, dan pertanian hortikultura, , difokuskan pada kawasan prioritas potensial, yang ditetapkan Kementerian Pertanian.
 - b. Pembangunan dan/atau rehabilitasi jaringan irigasi untuk tambak rakyat, difokuskan pada kawasan tambak potensial, yang ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.
 - c. Penyediaan air untuk komoditas non-padi bernilai tinggi dilakukan dengan skema irigasi mikro.

III.2.3. Strategi Pendukung Direktorat Jenderal SDA

Strategi pendukung difokuskan pada upaya peningkatan keterpaduan tata kelola SDA yang lebih accountable, didukung oleh decision making process yang lebih partisipatif dan demokratis dalam rangka terwujudnya kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan, melalui:

1. Perencanaan pengelolaan SDA pada masing-masing wilayah sungai yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, meliputi:
 - a. Penyelesaian penyusunan, pembahasan dan penetapan dokumen pola dan rencana pengelolaan SDA pada masing-masing WS di wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal SDA.
 - b. Penyusunan rencana alokasi air pada masing-masing wilayah sungai yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
 - c. Operasionalisasi unit perencanaan pada masing-masing Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal SDA, untuk memperkuat kapasitas desain infrastruktur SDA.
 - d. Pemberian rekomendasi teknis sebagai dasar pemanfaatan SDA.



- e. Perencanaan, pemrograman, dan penganggaran yang didasarkan pada kebijakan dan strategi operasional pada dokumen pola dan rencana pengelolaan SDA WS kewenangan Pemerintah Pusat.
2. Peningkatan peran serta stakeholders, meliputi:
 - a. Optimalisasi peran stakeholder pada Tim Koordinasi Pengelolaan SDA (TKPSDA) pada masing-masing WS kewenangan Pemerintah Pusat, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga O&P pengelolaan SDA, untuk meminimalkan konflik kepentingan dalam pengelolaan air di WS yang bersangkutan, terutama pada penyusunan pola dan rencana pengelolaan SDA, rencana prioritas dan alokasi penggunaan air, kesepakatan mengenai program, rencana kegiatan dan alokasi pembiayaan pengelolaan SDA antar instansi, serta hal-hal lain yang bersifat taktis operasional di tingkat WS.
 - b. Pembinaan masyarakat, Pemerintah Daerah, dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pengelolaan SDA pada WS kewenangan Pemerintah Pusat.
 - c. Penilaian kinerja wadah organisasi pengelolaan sumber daya air dengan melakukan River Basin Organization (RBO) Benchmarking menggunakan indikator penilaian indeks RBO Benchmarking.
 - d. Pembatasan pelibatan swasta hanya pada pemberian ijin pendayagunaan sumber daya air, bukan pada bentuk kerjasama, sebagaimana diatur pada peraturan perundang-undangan terkait.
 - e. Pelaksanaan kegiatan melalui skema padat karya dengan melibatkan masyarakat. Sebagai contoh adalah kegiatan padat karya dengan melibatkan masyarakat pengguna air irigasi dilaksanakan melalui Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI).
 3. Peningkatan Sistem Informasi dan Data Sumber Daya Air (SISDA) yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas data dan informasi sebagai dasar pengambilan keputusan, dan peningkatan transparansi informasi publik melalui:



- a. Pemantapan website Direktorat Jenderal SDA yang dapat menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, dan akuntabel. Website ini didukung oleh pemantapan website di masing-masing Unit Pelaksana Teknis dan Balai Teknik di lingkungan Direktorat Jenderal SDA yang menampilkan data dan informasi lebih detil terkait pengelolaan WS dan infrastruktur SDA di wilayah kerjanya masing-masing.
- b. Pengembangan jejaring sistem informasi dan data SDA (SISDA), yang mencakup informasi terkait kondisi hidrologis, hidrometeorologis, hidrogeologis, kebijakan SDA, prasarana SDA, teknologi SDA, lingkungan SDA dan sekitarnya serta kegiatan sosial ekonomi dan budaya masyarakat yang terkait dengan SDA yang terintegrasi dengan manajemen sumber daya air (DSS, forecasting, early warning) dengan memanfaatkan teknologi baru (satelit, radar, real-time system, water accounting systems) serta mulai memperhitungkan analisa ketidakpastian (uncertainty analysis) sebagai pertimbangan tambahan untuk para pembuat keputusan (decision makers).
- c. Percepatan pemasangan alat monitoring hidrogeologi dan/atau penggunaan metode monitoring alternatif seperti monitoring dari satelit, interpolasi, pemodelan dan sebagainya untuk daerah tanpa alat ukur (ungauged catchments).
- d. Penerapan one map policy pada penyelenggaraan pengelolaan SDA sesuai dengan standar dan aturan yang berlaku.
- e. Pengembangan sistem e-government yang mendukung penyelenggaraan pengelolaan SDA di lingkungan Direktorat Jenderal SDA, secara terintegrasi dengan sistem e-government yang dikembangkan di lingkungan Kementerian PUPR, antara lain:
 - Pengembangan dan penggunaan e-programming yang dikembangkan di lingkungan Direktorat Jenderal SDA, untuk perencanaan dan pemrograman jangka menengah dan tahunan.



- Penggunaan i-monitoring yang dikembangkan di lingkungan Kementerian PUPR, untuk penganggaran dan monitoring pelaksanaan kegiatan.
 - Penggunaan e-procurement dan i-monitoring yang dikembangkan di lingkungan Kementerian PUPR, untuk pengadaan barang dan jasa.
 - Pengembangan dan penggunaan sistem baru yang dikembangkan di lingkungan Direktorat Jenderal SDA diantaranya sistem informasi untuk pengukuran kinerja unit organisasi dan kinerja individu (pegawai), terintegrasi dengan sistem e-kinerja yang dikembangkan oleh BPSDM Kementerian PUPR.
- f. Pemantapan sistem komunikasi publik Direktorat Jenderal SDA yang didasarkan pada data dan informasi yang transparan, lengkap, akurat, dan akuntabel.
- g. Peningkatan kapasitas SDM di bidang komunikasi publik dan teknologi informasi melalui pelatihan, studi banding, dan lain-lain.
4. Pemberian izin kepada usaha swasta dan badan usaha lainnya untuk melakukan pengusahaan atas air dilakukan dengan syarat tertentu dan ketat, mempertimbangkan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air yang memuat pertimbangan teknis dan saran teknis dengan prinsip pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan serta mengacu pada aturan yang berlaku. Prioritas pemberian ijin diarahkan untuk:
- a. pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari bagi kelompok yang memerlukan air dalam jumlah besar;
 - b. pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari yang mengubah kondisi alami Sumber Air;
 - c. pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada;
 - d. pengusahaan Sumber Daya Air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui sistem penyediaan Air minum;
 - e. kegiatan bukan usaha;
 - f. pengusahaan sumber daya air oleh BUMN/BUMD;
 - g. pengusahaan sumber daya air oleh badan usaha swasta.



III.3 Arah Kebijakan dan Strategi Balai Besar Wilayah Sungai Citarum

III.3.1. Arah Kebijakan Balai Besar Wilayah Sungai Citarum

Arah kebijakan dan strategi BBWS Citarum disusun berdasarkan sasaran kegiatan yang sudah disusun pada peta strategi, berisi langkah yang akan ditempuh untuk mencapai sasaran kegiatan dan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran program Direktorat Jenderal SDA dan sasaran strategis Kementerian PUPR. Rumusan kebijakan adalah untuk dapat menjawab isu strategi lokal, regional, nasional dan global serta memberi dukungan terhadap prioritas-prioritas pemerintah, dukungan terhadap pusat pengembangan kawasan ekonomi khusus dan lain-lain. Kebijakan disusun secara berurutan berdasarkan tingkat urgensi serta komitmen pemerintah pada isu-isu tertentu yang harus segera ditangani. Kebijakan disesuaikan dengan hasil sinkronisasi dan telaahan dari eselon yang di atasnya. Kebijakan disusun secara berurutan berdasarkan tingkat urgensi serta prioritas program pemerintah.

Perumusan arah kebijakan dan strategi BBWS Citarum harus memperhatikan:

1. Arah kebijakan dan strategi serta prioritas pembangunan nasional pada 5 (lima) tahun mendatang.
2. Arah kebijakan dan strategi pengelolaan SDA nasional kedepan.
3. Arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal SDA untuk pencapaian sasaran pembangunan nasional bidang SDA dan sasaran strategis Kementerian PUPR.
4. Arah kebijakan dan strategi pengelolaan SDA WS Citarum, sebagaimana dirumuskan pada dokumen pola dan/atau rencana pengelolaan SDA WS Citarum.
5. Pengarustamaan RPJMN 2020-2024, yaitu: Kesetaraan Gender, Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Pembangunan Berkelanjutan, Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim, Modal Sosial dan Budaya, dan Transformasi Digital.
6. Arah kebijakan sektoral sebagaimana dirumuskan pada Renstra Unit Kerja sesuai dengan bidangnya.



Tabel III.1. Pemilihan Kebijakan berdasarkan Urgensi Penanganan – BBWS Citarum

Kebijakan Pengelolaan SDA	Isu Strategis Berdasarkan Pola dan Rencana PSDA WS Citarum	Arah Kebijakan Ditjen SDA	Arahan Direktorat Teknis / Pusat	Kebijakan Pemerintah Daerah	Kebijakan Lainnya
1	2	3	4	5	6
Konservasi SDA					
1. Perlindungan dan Pelestarian SDA	Diperlukan peningkatan upaya restorasi sungai dengan memperbaiki sarana prasarana sungai, menghidupkan kembali oxbow (danau tapal kuda) dengan membuka tanggul, menghidupkan kembali sungai-sungai yang mati, memperlebar sempadan sungai	<ul style="list-style-type: none"> -Pengelolaan sumber daya air secara terpadu dilaksanakan di tiap wilayah sungai kewenangan Pusat didasarkan pada rencana tata pengaturan air dan tata pengairan (pola pengelolaan SDA) dan rencana teknis tata pengaturan air dan tata pengairan (rencana pengelolaan SDA), yang diselaraskan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang bersangkutan -Pengelolaan sumber daya air dilaksanakan dengan memperhatikan keserasian antara konservasi dan pendayagunaan, antara hulu dan hilir, antara pemanfaatan air permukaan dan air tanah, antara pengelolaan demand dan pengelolaan supply yang berkeadilan serta antara 	<ul style="list-style-type: none"> -Restorasi dan konservasi pada 4 (empat) daerah aliran sungai (DAS) prioritas, meliputi upaya normalisasi dan peningkatan kapasitas aliran sungai, untuk mendukung penanganan struktural -Pengembangan kawasan konservasi daerah tangkapan air bendungan pada 55 kawasan, yang dimungkinkan menjadi bagian pelaksanaan Program Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GN-KPA) sebagai tindak lanjut Kesepakatan Bersama 8 Menteri pada 9 Mei 2015 -Perlindungan terhadap mata air melalui kegiatan konstruksi maupun pemberdayaan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> -Meningkatkan kelestarian dan perlindungan terhadap Sumber Daya Air -Meningkatkan kualitas tutupan Lahan -Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar tingkat pemerintahan -Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang 	



Kebijakan Pengelolaan SDA	Isu Strategis Berdasarkan Pola dan Rencana PSDA WS Citarum	Arah Kebijakan Ditjen SDA	Arahan Direktorat Teknis / Pusat	Kebijakan Pemerintah Daerah	Kebijakan Lainnya
1	2	3	4	5	6
		<p>memenuhi kepentingan jangka pendek dan kepentingan jangka panjang</p> <ul style="list-style-type: none"> -Konservasi sumber air dilaksanakan dalam rangka mencapai keseimbangan antara upaya untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek dan upaya untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang 			
2. Kapasitas Tampungan Air	<ul style="list-style-type: none"> -Belum optimalnya pembangunan tampungan air -Peningkatan pemanfaatan waduk lama -Terdapat sekitar 130 (seratus tiga puluh) situ berada di WS Citarum sedangkan yang sudah diketahui manfaatnya berjumlah 50 (lima puluh) buah situ 	Revitalisasi tampungan alami difokuskan pada 15 danau prioritas dan situ-situ kritis pada daerah Jabodetabek dan daerah lainnya	Pengamanan situ-situ dari okupasi dan perubahan fungsi lindungnya		



RENCANA STRATEGIS
BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CITARUM
TAHUN 2020-2024

Kebijakan Pengelolaan SDA	Isu Strategis Berdasarkan Pola dan Rencana PSDA WS Citarum	Arah Kebijakan Ditjen SDA	Arahan Direktorat Teknis / Pusat	Kebijakan Pemerintah Daerah	Kebijakan Lainnya
1	2	3	4	5	6
3. Pengelolaan Kualitas Air	Pengelolaan kualitas air ditujukan untuk memperbaiki kualitas sumber air, mencegah pencemaran air, serta melaksanakan monitoring kualitas air, agar kualitas air sungai, waduk, situ tetap sesuai dengan kelas air dan standar baku mutu yang ditetapkan, dan dapat digunakan sebagai air baku untuk irigasi, air bersih untuk perkotaan, industri dan kebutuhan hidup sehari-hari	Pengamanan kualitas air dari bendungan dan sumber air lainnya	Melakukan monitoring kualitas air secara berkala untuk dikoordinasikan dengan instansi berwenang	-Meningkatkan kualitas dan penyediaan air serta kualitas udara -Meningkatkan penanganan pelanggaran Perda	Implementasi Program Citarum Harum melalui Perpres Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran Kerusakan DAS Citarum
4. Pengendalian Pencemaran Air	-Buangan limbah rumah tangga (domestik) 60%, limbah industri kimia cair 30% dan 10% limbah pertanian dan peternak. -Volume sampah di kawasan hulu Sungai Citarum, yakni di sekitar	-Pengendalian pencemaran pada bendungan dan danau dilakukan dengan menetapkan sempadan, penerapan regulasi pembatasan kegiatan yang berpotensi mencemari bendungan dan danau, serta melakukan pengukuran kualitas air secara berkala,	Penataan sempadan sungai melalui kajian garis sempadan sungai dilanjutkan dengan penetapannya melalui instrumen regulasi	-Meningkatkan pengelolaan limbah domestik -Meningkatkan penanganan pelanggaran Perda	



RENCANA STRATEGIS
BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CITARUM
TAHUN 2020-2024

Kebijakan Pengelolaan SDA	Isu Strategis Berdasarkan Pola dan Rencana PSDA WS Citarum	Arah Kebijakan Ditjen SDA	Arahan Direktorat Teknis / Pusat	Kebijakan Pemerintah Daerah	Kebijakan Lainnya
1	2	3	4	5	6
	Kabupaten Bandung sudah mencapai 500.000 m ³ /tahun	berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah			
Pendayagunaan SDA					
1. Penyediaan SDA	<ul style="list-style-type: none"> -Keterbatasan penyediaan air baku permukaan untuk Metropolitan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) dan Metropolitan Cekungan Bandung. -Alat ukur debit dan pintu air banyak yang rusak, Pengelolaan aset (irigasi) belum berjalan baik 	<ul style="list-style-type: none"> -Percepatan penyediaan air baku dari sumber air terlindungi, peningkatan kebijakan pengelolaan sumber daya air terpadu dan pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan air baku -Penyediaan air baku komunal pada beberapa daerah yang sulit air dilakukan melalui penyediaan sumur dan pemanfaatan air hujan menggunakan pendekatan akuifer buatan simpanan air hujan (ABSAH) dan pemanenan air hujan (PAH) -Melakukan penyusunan indeks ketahanan air 	<ul style="list-style-type: none"> -Penambahan Kapasitas Air Baku dari Bendungan dan sumber air lainnya didukung oleh pengamanan kualitas air -Rehabilitasi dan Peningkatan efisiensi infrastruktur penyediaan air baku (mengurangi idle capacity) -Pemanfaatan bendungan untuk menjamin pengairan daerah irigasi seluas 342.549 Hektar -Pelaksanaan konservasi air tanah yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air baku serta didukung oleh penegakan peraturan pengambilan air tanah -Penyediaan air baku komunal pada beberapa daerah yang sulit air -Penerapan Integrasi Air permukaan dan Air Tanah 	<ul style="list-style-type: none"> -Meningkatkan pengelolaan layanan air untuk domestik, industri dan pertanian -Meningkatkan Pemenuhan Infrastruktur Dasar bagi Masyarakat Miskin 	Implementasi manajemen risiko melalui penerapan SPIP dan pembinaan SDM secara terencana, terukur dan berkesinambungan
2. Penggunaan SDA	<ul style="list-style-type: none"> -Peningkatan kebutuhan air Rumah Tangga, Kota dan Industri (RKI), 	<ul style="list-style-type: none"> -Pengendalian pemanfaatan air tanah seiring dengan peningkatan penyediaan air 	<ul style="list-style-type: none"> -Pengembalian fungsi dan kondisi sarana prasarana pengelolaan air baku 	Meningkatkan kinerja jaringan irigasi	



RENCANA STRATEGIS
BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CITARUM
TAHUN 2020-2024

Kebijakan Pengelolaan SDA	Isu Strategis Berdasarkan Pola dan Rencana PSDA WS Citarum	Arah Kebijakan Ditjen SDA	Arahan Direktorat Teknis / Pusat	Kebijakan Pemerintah Daerah	Kebijakan Lainnya
1	2	3	4	5	6
	<p>seiring dengan pertumbuhan penduduk dan perkotaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Cakupan pelayanan PDAM masih rendah (dibandingkan dengan target sasaran MDG) -Jaringan irigasi teknis terbatas, banyak yang rusak, dan pelaksanaan OP rendah 	<p>baku dari air permukaan, pengembangan dan penerapan sistem conjuctive use antara pemanfaatan air permukaan dan air tanah akan digalakkan terutama untuk menciptakan sinergi dan menjaga keberlanjutan ketersediaan air tanah</p> <ul style="list-style-type: none"> -Pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi difokuskan pada optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang sudah dibangun, rehabilitasi pada areal irigasi berfungsi yang mengalami kerusakan dan peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan -Pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air baku untuk air bersih diprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan pokok rumah tangga terutama di wilayah rawan/defisit air, 	<ul style="list-style-type: none"> -Pemanfaatan air baku dengan memperhatikan RTRW Serta Pola dan Rencana SDA -Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana penyediaan air baku 		



RENCANA STRATEGIS
BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CITARUM
TAHUN 2020-2024

Kebijakan Pengelolaan SDA	Isu Strategis Berdasarkan Pola dan Rencana PSDA WS Citarum	Arah Kebijakan Ditjen SDA	Arahan Direktorat Teknis / Pusat	Kebijakan Pemerintah Daerah	Kebijakan Lainnya
1	2	3	4	5	6
		<p>wilayah tertinggal dan wilayah strategis</p> <ul style="list-style-type: none"> -Kebijakan perwujudan waduk multiguna dan modernisasi irigasi diarahkan pada penambahan kapasitas tampungan air, peningkatan dan pemanfaatan fungsi tampungan air, peningkatan kinerja bendungan dan penurunan indeks risiko bendungan, peningkatan efisiensi dan kinerja sistem irigasi, dan penyediaan air untuk komoditas pertanian bernilai tinggi -Peningkatan efisiensi dan kinerja sistem irigasi dengan penerapan konsep modernisasi irigasi 			
3. Pengembangan SDA	-Kinerja institusi yang bertanggungjawab dalam pengelolaan sumber daya air masih kurang, dan ada tumpang tindih	-Peningkatan partisipasi masyarakat dan kemitraan di antara pemangku kepentingan terus diupayakan pada kegiatan konservasi, pendayagunaan, serta	-Peningkatan kapasitas air baku menggunakan sumber air tanah difokuskan pada daerah yang memiliki cekungan air tanah -Peningkatan kapasitas air baku menggunakan air permukaan	Pengembangan kawasan klaster pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan	



RENCANA STRATEGIS
BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CITARUM
TAHUN 2020-2024

Kebijakan Pengelolaan SDA	Isu Strategis Berdasarkan Pola dan Rencana PSDA WS Citarum	Arah Kebijakan Ditjen SDA	Arahan Direktorat Teknis / Pusat	Kebijakan Pemerintah Daerah	Kebijakan Lainnya
1	2	3	4	5	6
	<p>dalam peran dan tanggung jawab;</p> <ul style="list-style-type: none"> -Pemilik kepentingan belum aktif berperan, sehingga masih memerlukan dukungan Pemerintah; -Potensi peran masyarakat dan peran perempuan dalam pengelolaan sumber daya air perlu diperkuat 	<p>pengendalian daya rusak, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga operasi dan pemeliharaan infrastruktur SDA</p> <ul style="list-style-type: none"> -Penataan kelembagaan Direktorat Jenderal SDA melalui pengaturan kembali kewenangan dan tanggung jawab masing- masing pemangku kepentingan serta kemungkinan berbagi peran atau role sharing dalam pengelolaan SDA secara terpadu -Penataan dan penguatan sistem pengelolaan data dan informasi sumber daya air dilakukan secara terencana dan dikelola secara berkesinambungan dalam rangka pelayanan data dan informasi, baik ke dalam maupun ke luar Direktorat Jenderal SDA 	<ul style="list-style-type: none"> -Peningkatan kapasitas air baku menggunakan sumber air tanah (Terutama pada daerah CAT) -Peningkatan kapasitas air baku sebesar 50 m³/detik menggunakan sumber air permukaan difokuskan pada pemanfaatan potensi air baku dari bendungan yang ditargetkan selesai hingga tahun 2024 dengan kapasitas sebesar 23,4 m³/detik -Pembangunan 46 bendungan yang merupakan lanjutan dari target Renstra Direktorat Jenderal SDA 2015-2019 -Pembangunan bendungan baru, didukung oleh perencanaan bendungan multiguna dengan protokol berkelanjutan. Dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara, kesiapan pelaksanaan, serta kepastian penyelesaian hingga tahun 2024 -Pembangunan embung dan tampung air buatan lainnya sebanyak 500 unit dengan tetap mempertimbangkan 		



RENCANA STRATEGIS
BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CITARUM
TAHUN 2020-2024

Kebijakan Pengelolaan SDA	Isu Strategis Berdasarkan Pola dan Rencana PSDA WS Citarum	Arah Kebijakan Ditjen SDA	Arahan Direktorat Teknis / Pusat	Kebijakan Pemerintah Daerah	Kebijakan Lainnya
1	2	3	4	5	6
			<p>fungsi utamanya sebagai embung konservasi atau embung air baku</p> <ul style="list-style-type: none"> -Mendorong pengembangan sistem penyediaan air baku yang komprehensif (<i>source to tap</i>) sehingga dituntut integrasi dan kolaborasi dalam pemrograman dan penganggarannya -Pemanfaatan air Tanah sebagai air baku dilaksanakan dengan tetap memperhatikan aspek pengendalian pemanfaatan air tanah 		
4. Pengusahaan SDA	Potensi listrik tenaga air belum dimanfaatkan secara optimal	-Pemanfaatan bendungan sebagai sumber energi terbarukan dengan potensi energi sebesar 140,44 MW, dari 46 bendungan selesai, dilakukan berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PT. Perusahaan Listrik Negara (PT. PLN)	Pengembangan waduk multiguna dan instalasi mikrohidro	Meningkatkan jangkauan pelayanan listrik untuk kepentingan aktivitas ekonomi, pelayanan publik dan rumah tangga hingga ke pelosok	
Pengendalian Daya Rusak Air		-			



Kebijakan Pengelolaan SDA	Isu Strategis Berdasarkan Pola dan Rencana PSDA WS Citarum	Arah Kebijakan Ditjen SDA	Arahan Direktorat Teknis / Pusat	Kebijakan Pemerintah Daerah	Kebijakan Lainnya
1	2	3	4	5	6
1. Kebijakan Pencegahan Daya Rusak Air	<ul style="list-style-type: none"> -Perambahan/okupasi daerah bantaran/ sempadan sungai. Pembangunan perumahan di dataran banjir -Basis data pada jaringan informasi SISDA dalam WS belum terintegrasi; -Sebagian Standard Operation Prosedure (SOP) untuk pemuktahiran SISDA, pemantauan dan evaluasi sudah disusun, namun pelaksanaan belum optimal, masih perlu dilengkapi; -SISDA belum digunakan sebagai alat dalam perencanaan -Pembuangan sampah ke sungai dan saluran drainase 	Kebijakan pembangunan infrastruktur ketahanan bencana diarahkan pada pengembangan infrastruktur tangguh bencana dan penguatan infrastruktur vital, pengelolaan terpadu kawasan rawan bencana, serta restorasi dan konservasi daerah aliran sungai		Meningkatkan upaya penurunan emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan, pertanian, energi, transportasi, dan pengelolaan limbah domestik, serta kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim	



RENCANA STRATEGIS
BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CITARUM
TAHUN 2020-2024

Kebijakan Pengelolaan SDA	Isu Strategis Berdasarkan Pola dan Rencana PSDA WS Citarum	Arah Kebijakan Ditjen SDA	Arahan Direktorat Teknis / Pusat	Kebijakan Pemerintah Daerah	Kebijakan Lainnya
1	2	3	4	5	6
	-Pendangkalan/sedimentasi alur sungai, saluran drainase				
2. Kebijakan Penanggulangan Daya Rusak Air dan Mitigasi Bencana	-Penurunan muka tanah dan pasang tinggi air laut -Bahaya tanah/tebing longsor -Kejadian kekurangan air (kekeringan) di beberapa lokasi	-Mitigasi dan adaptasi bidang SDA dalam menghadapi dampak negatif perubahan iklim global, khususnya banjir, kekeringan dan kenaikan muka air laut		Meningkatkan mitigasi dan penanggulangan bencana	
3. Kebijakan Pengendalian Banjir	Banjir tahunan terjadi di Kawasan Citarum hulu 750 ha, Kawasan Muara Gembong 180 ha, dan Kawasan Pantura 11.000 ha	-Pengendalian daya rusak air terutama dalam hal penanggulangan banjir dilaksanakan selaras antara pendekatan struktural dan pendekatan non-struktural melalui konservasi sumberdaya air dan pengelolaan daerah aliran sungai dengan memperhatikan keterpaduan dengan tata ruang wilayah, diutamakan pada daerah berpenduduk padat, konektivitas antar pusat	-Pembangunan infrastruktur pengendali banjir sepanjang 1.971 Km, berupa tanggul banjir, kanal banjir, dan penataan drainase utama perkotaan, difokuskan pada ibukota provinsi, kawasan Pantai Utara Jawa (Pantura Jawa), kawasan perkotaan, kawasan metropolitan, kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus, 10 KSPN Prioritas, daerah aliran sungai (DAS) prioritas, dan kawasan strategis lainnya -Pembangunan pengendali sedimen sebanyak 126 unit, berupa checkdam dan infrastruktur pengendali sedimen	Meningkatkan penanganan pelanggaran Perda	Implementasi Program Citarum Harum melalui Perpres Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran Kerusakan DAS Citarum



RENCANA STRATEGIS
BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CITARUM
TAHUN 2020-2024

Kebijakan Pengelolaan SDA	Isu Strategis Berdasarkan Pola dan Rencana PSDA WS Citarum	Arah Kebijakan Ditjen SDA	Arahan Direktorat Teknis / Pusat	Kebijakan Pemerintah Daerah	Kebijakan Lainnya
1	2	3	4	5	6
		ekonomi dan kawasan strategis -Pemanfaatan bendungan sebagai pengendali banjir daerah hilir, dilakukan terintegrasi dengan sistem pengendalian banjir	lainnya, difokuskan pada kawasan rawan longsor, kawasan memiliki aliran debris tinggi, dan kawasan rawan bencana sedimen lainnya -Penyusunan masterplan penanganan banjir pada sungai-sungai prioritas, sehingga nantinya penanganan banjir akan menyeluruh tidak hanya spot-spot tertentu		
4. Kebijakan Pengendalian Erosi dan Sedimentasi	-Alih fungsi kawasan hutan menjadi areal produktif / perubahan tata guna lahan yang terjadi setiap tahun. -Luas lahan kritis (agak kritis, kritis dan sangat kritis) di Wilayah Sungai Citarum seluas 431.419 Ha atau 38,10% dari luas Wilayah Sungai	Pengendalian erosi dan sedimentasi / pembangunan infrastruktur pengendali lahar ditujukan untuk melindungi masyarakat maupun infrastruktur SDA dari ancaman bencana	Pengembangan waduk multiguna dan instalasi mikrohidro	Meningkatkan jangkauan pelayanan listrik untuk kepentingan aktivitas ekonomi, pelayanan publik dan rumah tangga hingga ke pelosok	
5. Kebijakan Pengamanan Pantai dan Muara Sungai	Kerusakan hutan bakau dan erosi pantai	Pengamanan pantai-pantai dari abrasi terutama dilakukan pada daerah perbatasan, pulau-pulau kecil, kawasan permukiman, serta pusat kegiatan ekonomi untuk	Pembangunan pengaman pantai dari abrasi sepanjang 129 Km, berupa tanggul pantai, penahan ombak, tanggul laut, dan infrastruktur pengaman pantai lainnya, difokuskan pada kawasan Pantai Utara Jawa		



RENCANA STRATEGIS
BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CITARUM
TAHUN 2020-2024

Kebijakan Pengelolaan SDA	Isu Strategis Berdasarkan Pola dan Rencana PSDA WS Citarum	Arah Kebijakan Ditjen SDA	Arahan Direktorat Teknis / Pusat	Kebijakan Pemerintah Daerah	Kebijakan Lainnya
1	2	3	4	5	6
		mengurangi disparitas pembangunan wilayah	(Pantura Jawa), Kawasan perbatasan NKRI, kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus, 10 KSPN Prioritas, dan kawasan strategis lainnya		



III.3.2. Strategi Balai Besar Wilayah Sungai Citarum

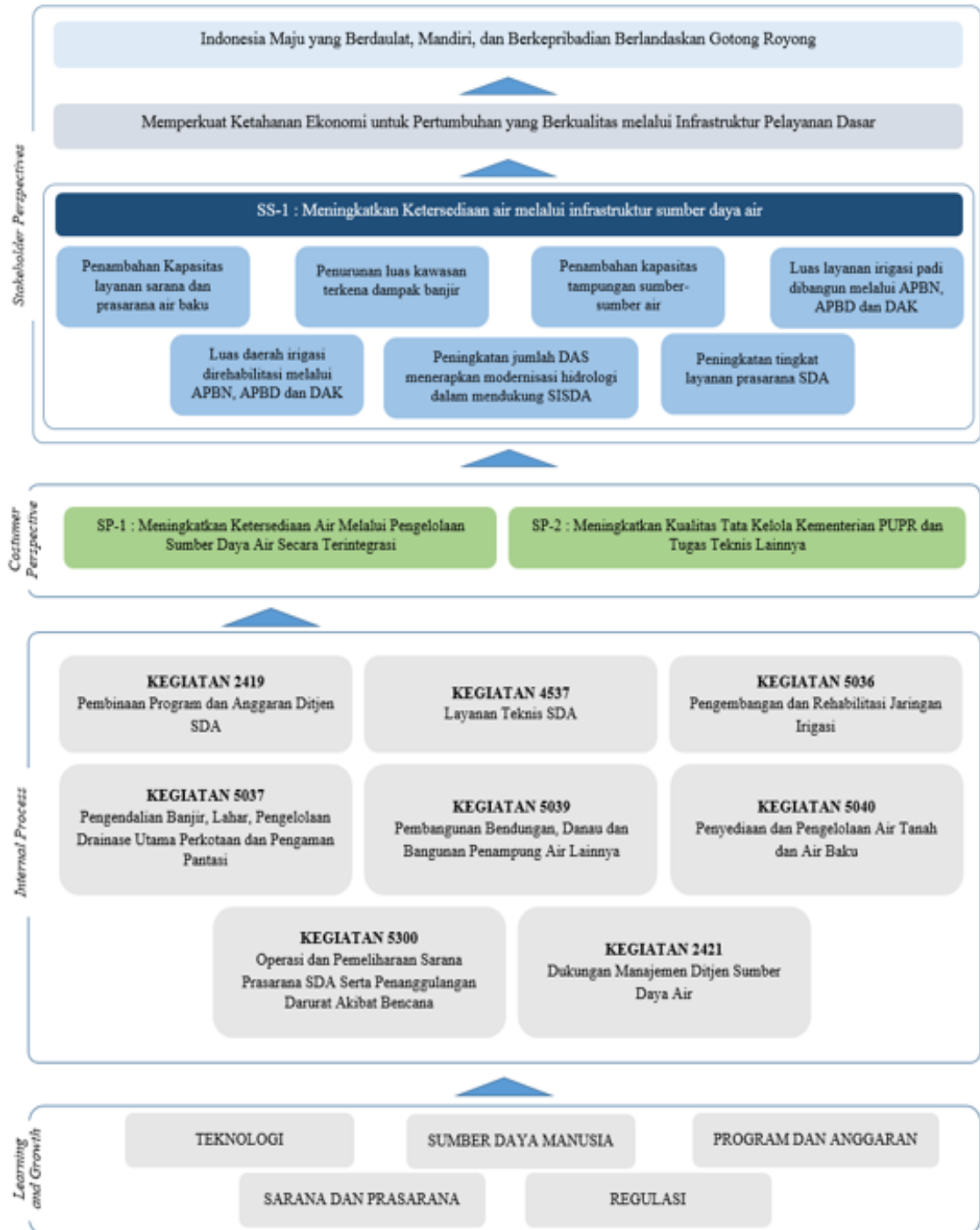
Dalam rangka mencapai arah kebijakan tersebut, Balai Besar Wilayah Sungai Citarum menyusun strategi operasional diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan air baku
 - a. Pemanfaatan bendungan sebagai sumber air baku yaitu dari Bendungan Ir.H. Juanda/Jatiluhur, Bendungan Cirata, Bendungan Saguling, dan Bendungan Cipancuh.
 - b. Pemenuhan Penyediaan air baku daerah Subang, Indramayu dan Sumedang dengan membangun Bendungan Sadawarna.
 - c. Peningkatan kapasitas Saluran Tarum Barat dalam upaya pemenuhan penyediaan air baku Prov. DKI Jakarta.
 - d. Pembangunan Bendungan Cibeet dan Cijurey dalam upaya pemenuhan penyediaan air baku Kab. Bogor dan pengendalian banjir daerah hilir
 - e. Upaya pemenuhan air baku metro Bandung dengan membangun Embung Cikalong, pembangunan penyediaan air baku Kertasari dan pembangunan penyediaan air baku Sinumbra.
 - f. Penyediaan air baku dalam rangka mendukung program pemulihan ekonomi nasional (PEN)
 - g. Penyediaan air baku pedesaan
 - h. Pemanfaatan air tanah untuk air baku untuk daerah minim sumber air permukaan (JIAT)
2. Penyediaan sarana prasarana pengendali daya rusak air
 - a. Pengendalian banjir pada kawasan Citarum Hulu/Cekungan Bandung pada daerah Majalaya-Sapan, Rancaekek, Gedebage, Dayeuh Kolot/Baleendah, Banjaran, Pasteur-Pagarsih, dan Melong-Margaasih
 - b. Pengendalian banjir pada Kawasan Citarum Hilir (Wilayah banjir Kab. Bekasi, Kab. Karawang, dan Kab. Subang)
 - c. Pengamanan banjir rob difokuskan pada pesisir utara Jawa (Kab. Bekasi, Kab. Indramayu, dan Kab. Subang)
 - d. Pengendalian sedimen difokuskan pada sungai-sungai rawan sedimentasi tinggi pada kawasan Citarum Hulu.



- e. Pengamanan pantai (Kab. Bekasi, Kerawang, Indramayu, dan Subang)
 - f. Pengendalian degradasi pada Sungai Cipamingkis
 - g. Perbaikan tanggul kritis pada kawasan Citarum Hilir
 - h. Pengendalian banjir dalam rangka mendukung program pemulihan ekonomi nasional (PEN)
3. Peningkatan kapasitas tampung air
 - a. Penyelesaian 1 buah waduk yaitu pembangunan Bendungan Sadawarna (2018-2022)
 - b. Pembangunan bendungan Cibeet dan Cijurey dimulai TA 2022
 - c. Pembangunan embung-embung pada daerah sulit air dan minim sumber air permukaan
 4. Peningkatan layanan air irigasi
 - a. Rehabilitasi irigasi kewenangan Pusat yang rusak (DI Jatiluhur, DI Leuwi Nangka, DI Karanggeusan, Cipancuh, Cileuleuy, Cihea, Cipamingkis, Ciletuh).
 - b. Modernisasi Daerah Irigasi Jatiluhur melalui program *Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project* (SIMURP) dengan sumber dana yang berasal dari Bank Dunia.
 5. Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan
 - a. Operasi dan Pemeliharaan untuk seluruh prasarana SDA yang berupa aset.
 - b. Pengalokasian anggaran untuk kegiatan O&P sesuai dengan AKNOP secara bertahap
 - c. Program padat karya untuk perbaikan irigasi kecil

Guna mendukung Sasaran Program Balai Besar Wilayah Sungai Citarum dilakukan beberapa kegiatan, yang masing-masing kegiatan tersebut memiliki Sasaran Kegiatan (SK) dalam upaya mencapai Sasaran Program tersebut. Selanjutnya disusun pula peta strategi untuk mewujudkan Sasaran Program tersebut seperti pada Gambar III.3 dibawah ini.



Gambar III.2. Peta Strategi Balai Besar Wilayah Sungai Citarum



III.4 Kerangka Regulasi

Balai Wilayah Sungai dan Balai Besar Wilayah Sungai yang merupakan unit pelaksana teknis (UPT) yang berada di bawah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BBWS Citarum beroperasi dengan berdasarkan pada regulasi terkait pengelolaan sumber daya air, antara lain sebagai berikut:



Tabel III.2. Matriks Kerangka Regulasi

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
1	Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada DAS / Catchment Area	Perubahan tata guna lahan telah menjadi salah satu faktor utama penyebab bencana banjir maupun kekeringan	Kementerian ATR/BPN	Pemda / OPD terkait perizinan pemanfaatan dan pengendalian ruang	Non definitif / Eksternal BBWS
2	Penjabaran tugas dan fungsi serta tata laksana tingkat UPT secara lebih komprehensif sebagai penjabaran dari Permen PUPR Nomor 16 Tahun 2020 dan perubahannya	Permen PUPR Nomor 16/PRT/M/2020 masih perlu dijabarkan lebih detail berikut SOP untuk masing-masing tugas/fungsi yang diberikan agar setiap pegawai dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh keyakinan sesuai standar yang baku	Sekretariat Ditjen SDA	Biro Kepegawaian dan Ortala, Direktorat Teknis lingkup Ditjen SDA	Non definitif / Eksternal BBWS
3	Pembentukan Unit-unit pelaksana substansi teknis sesuai OTK UPT dilingkungan Ditjen SDA	Unit pelaksana substansi teknis yang dimaksud adalah seperti Unit Hidrologi dan Kualitas Air, Unit SISDA, Unit Kompu, Unit Pengelola Bendungan, dll yang belum dijabarkan secara lebih terinci dalam regulasi formal	Sekretariat Ditjen SDA	Biro Kepegawaian dan Ortala, Direktorat Teknis lingkup Ditjen SDA	Non definitif / Eksternal BBWS



No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
4	Penataan Jabatan Fungsional dan pengintegrasian angka kreditnya kedalam tugas dan fungsi BBWS	Perlu dilakukan pembentukan Jabatan Fungsional yang lebih adaptif terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BBWS dikarenakan jenis JF yang ada saat ini masih bersifat umum. Sekaligus penataan angka kredit yang berkorelasi langsung dengan uraian tugas dan fungsi BBWS	Sekretariat Ditjen SDA	Biro Kepegawaian dan Ortala, Direktorat Teknis lingkup Ditjen SDA	Non definitif / Eksternal BBWS



III.5 Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan merupakan perangkat, struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Unit Kerja (Eselon II). Penyusunan kerangka kelembagaan ini bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan keterkaitan dan koordinasi pelaksanaan Renstra, sesuai dengan fungsi, serta visi dan misi Kementerian PUPR;
- b. Mempertajam arah kebijakan dan strategi sesuai dengan kapasitas organisasi dan dukungan sumber daya aparatur sipil negara;
- c. Membangun struktur organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran, untuk menghindari duplikasi fungsi dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi Unit Kerja (Eselon II);
- d. Memperjelas ketatalaksanaan dan meningkatkan profesionalitas sumber daya aparatur.

Dalam penyusunan kerangka kelembagaan, terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan, antara lain:

- a. Dalam merumuskan kerangka kelembagaan, setiap Unit Kerja (Eselon II) harus mempertimbangkan keterkaitan, kontribusi dan peran BBWS/BWS/Balai Teknis dalam mencapai tujuan pembangunan jangka panjang di dalam Renstra dan prioritas pembangunan di dalam renstra;
- b. Setiap Unit Kerja (Eselon II) wajib melakukan penataan kelembagaan mengacu kepada kebijakan pembangunan, peraturan dan memperhatikan prinsip pengorganisasian yang efektif, efisien dan transparan;
- c. Kerangka kelembagaan disusun untuk mampu menopang dan mewujudkan rencana kerja menjadi kenyataan;
- d. Kerangka kelembagaan yang disusun dapat merupakan proses evaluasi terhadap struktur organisasi kelembagaan yang sudah ada.

Balai Besar Wilayah Sungai adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air, dibentuk dengan



23/PRT/M/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar dan Balai di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan Direktorat Jenderal Bina Marga dan perubahan melalui Peraturan Menteri PUPR nomor 20/PRT/M/2016 tanggal 23 Mei 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pada tahun 2020 terdapat pembaharuan melalui Peraturan Menteri PUPR nomor 16/PRT/M/2020 tanggal 2 Juni 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bahwa Balai Besar Wilayah Sungai Citarum sebagai Balai Besar tipe A.

Tabel III.3. Sejarah Pembentukan Organisasi Balai Besar Wilayah Sungai Citarum

Tahun	Nama Organisasi	Keterangan
1957 - 1967	Proyek Serbaguna Jatiluhur	Pembangunan Proyek Nasional Serbaguna Jatiluhur yang meliputi Bendungan Utama dan PLTA
1967 – 1970	Perusahaan Negara Jatiluhur	
1970 - 1999	Perusahaan Umum Otorita Jatiluhur	
1999 - Sekarang	Perusahaan Umum Jasa Tirta 2	
1985 - 1987	Proyek Irigasi Jatiluhur	
1987 - 1994	Badan Pelaksana Proyek Serbaguna Jatiluhur	
1994 – 2005	Proyek Induk Pengembangan Wilayah Sungai Citarum	
2005 - 2006	Induk Pelaksana Pengembangan Wilayah Sungai Citarum	
2006 - Sekarang	Balai Besar Wilayah Sungai Citarum	

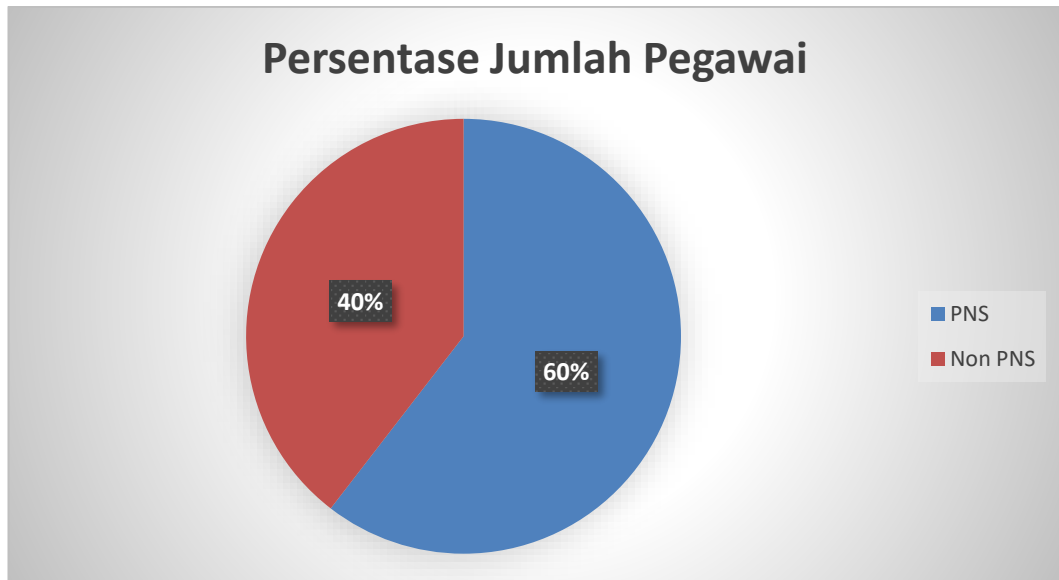


Berdasarkan keputusan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Citarum No. 22/KPTS/BBWSC/2020 tanggal 03 Agustus 2020 tentang Perubahan Ketiga Surat Keputusan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Citarum No. 03/KPTS/BBWSC/2020 tentang Penempatan Personil Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Balai Besar Wilayah Sungai Citarum Tahun 2020, jumlah pegawai di Balai Besar Wilayah Sungai Citarum adalah sebanyak 392 orang yang terdiri dari 237 orang PNS dan 155 orang Non PNS. Komposisi Sumber Daya Manusia Tahun 2020 BBWS Citarum sebagai berikut:

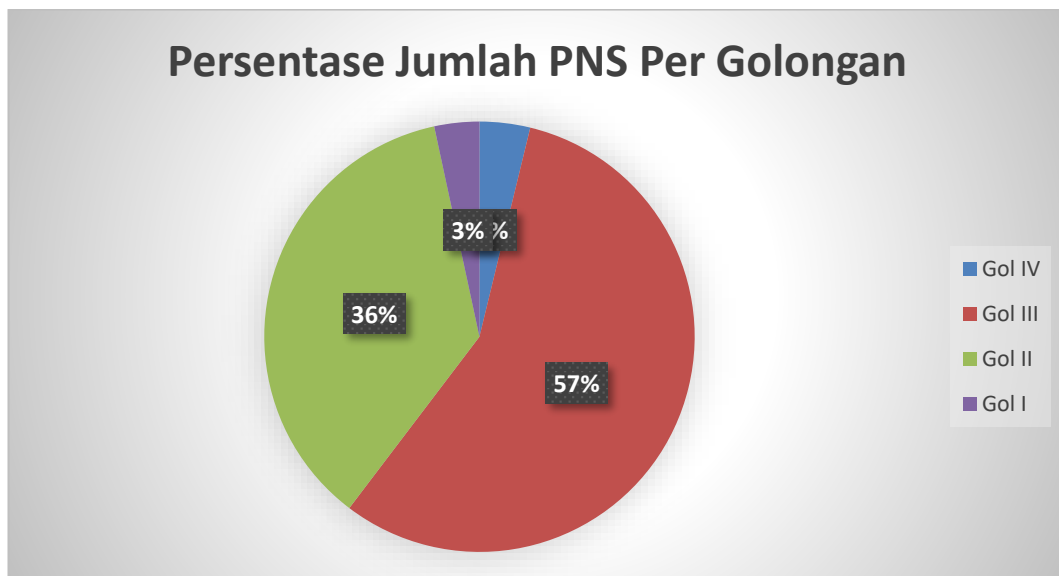
Tabel III.4. Komposisi SDM di Lingkungan Balai Besar Wilayah Sungai Citarum

UNIT KERJA	Gol IV		Gol III		Gol II		Gol I	
	PNS	Non PNS	PNS	Non PNS	PNS	Non PNS	PNS	Non PNS
BAGIAN TATA USAHA	1	0	12	8	10	8	5	1
BIDANG KPISDA	0	0	5	3	0	0	0	0
BIDANG PJSA	2	0	4	0	0	0	0	0
BIDANG PJPA	2	0	2	0	1	0	0	0
BIDANG OP	2	0	2	3	2	0	0	0
SATKER BALAI	1	0	21	4	8	0	0	0
SNVT PJSA	1	0	43	2	26	9	2	2
SNVT PJPA	0	0	24	6	20	7	0	0
SATKER OP	0	0	21	10	19	57	1	35
Jumlah	9	0	134	36	86	81	8	38

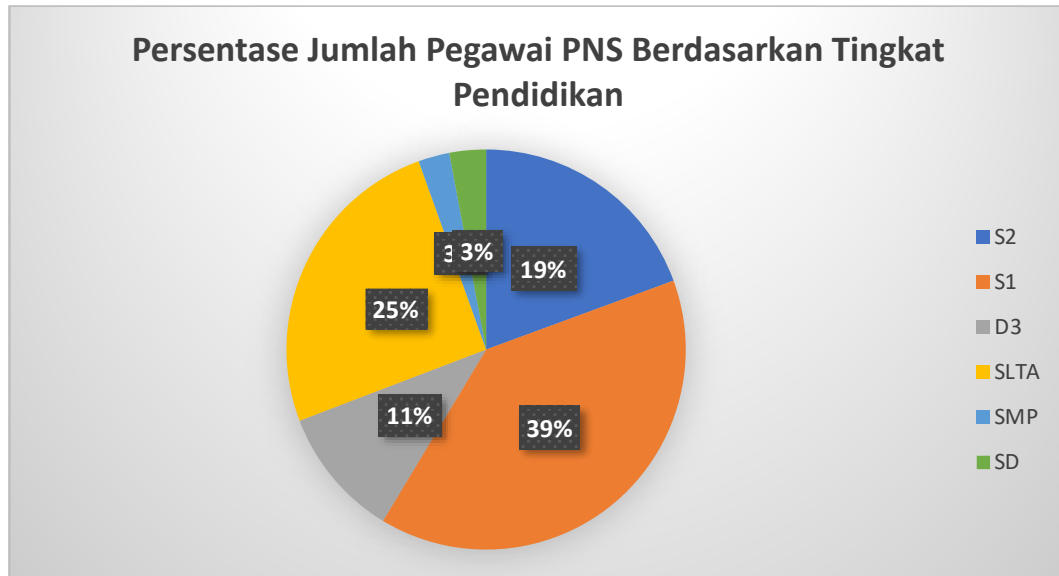
Dari jumlah tersebut, sumber daya manusia BBWS Citarum terbagi dalam tiga kualifikasi kepegawaian yaitu golongan, Pendidikan dan status kepegawaian



Gambar III.3. Presentase Jumlah Pegawai BBWS Citarum Berdasarkan Status Kepegawaian



Gambar III.4. Presentase Jumlah Pegawai BBWS Citarum Berdasarkan Golongan



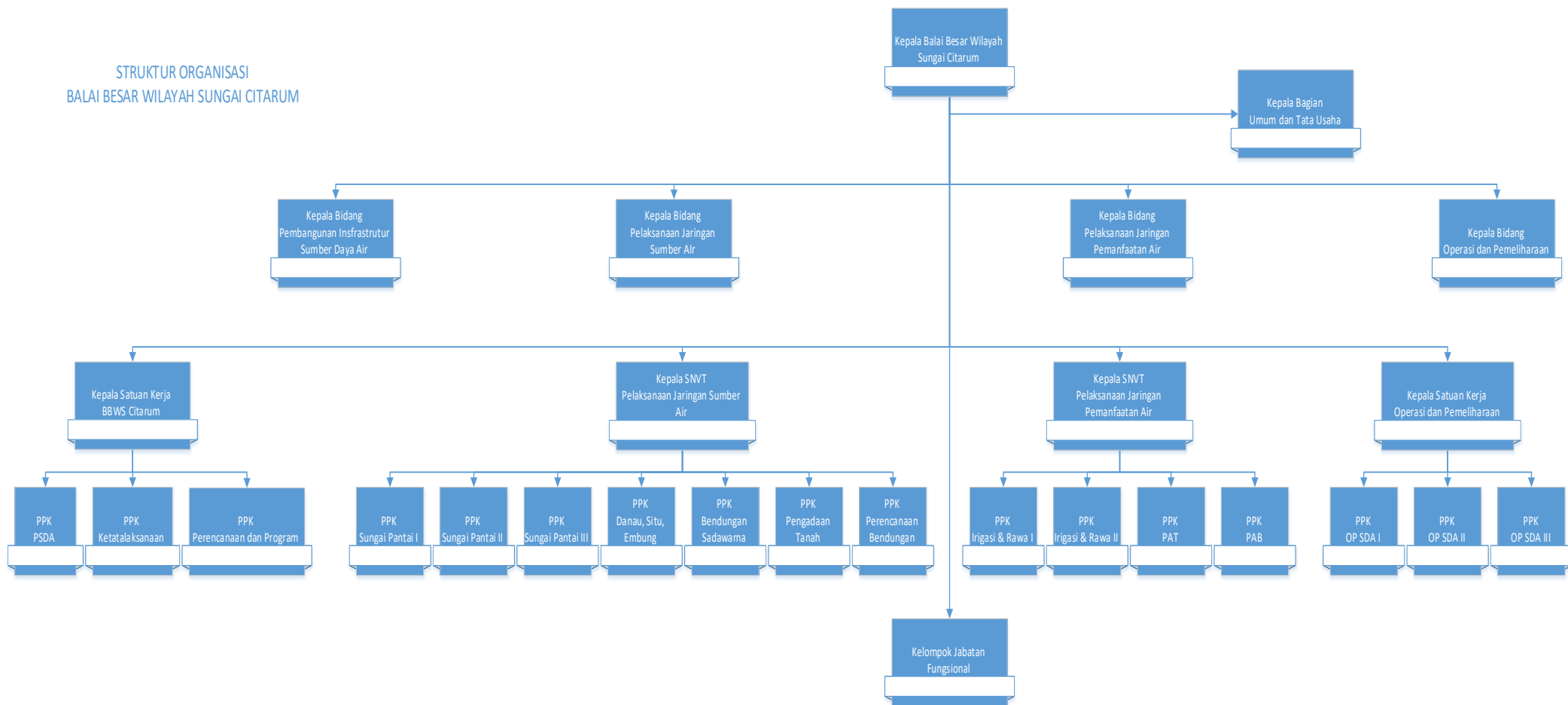
Gambar III.5. Presentase Jumlah Pegawai BBWS Citarum Berdasarkan Level Pendidikan

Komposisi pegawai ini menjadi perhatian ke depannya, mengingat kondisi ini menggambarkan kondisi rasio status pegawai, perbandingan golongan, level Pendidikan yang secara fundamental akan mempengaruhi kinerja BBWS Citarum. Level pendidikan S1 masih menjadi komposisi utama, dan setelahnya pendidikan SLTA namun juga masih terdapat level SD dan SMP serta D3. Melihat perkembangan lingkungan strategis yang ada, pendidikan minimal sebaiknya adalah pada level SLTA memenuhi 12 tahun wajib belajar. Sementara untuk pendidikan D3 masih dibutuhkan sebagai pengawas lapangan, sementara kualifikasi Pendidikan S1 merupakan pelaksana dan pembantu dalam pengambilan keputusan, sementara level pendidikan S2 direkomendasikan sebagai pengambil keputusan serta membantu analisis permasalahan, dan level S3 selain pengambilan keputusan juga sebagai analis utama. Adapun Struktur Organisasi Balai Besar Wilayah Sungai Citarum saat ini ditunjukkan pada Gambar III.3 dibawah ini.



RENCANA STRATEGIS
BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CITARUM
TAHUN 2020-2024

STRUKTUR ORGANISASI
BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CITARUM



Gambar III.6. Struktur Organisasi Balai Besar Wilayah Sungai Citarum



BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

IV.1 Target Kinerja

Target kinerja dalam hal ini diartikan sebagai target kinerja sasaran, baik sasaran strategis, sasaran program, maupun sasaran kegiatan yang dilengkapi dengan indikatornya. Target kinerja sasaran menunjukkan tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh Balai Besar Wilayah Sungai Citarum yang meliputi program dan kegiatan dalam periode waktu yang telah ditetapkan (disajikan dalam lampiran). Dalam penyusunan target kinerja baik tingkat kegiatan maupun program didasarkan pada kriteria :

1. Target menggambarkan angka kuantitatif dan satuan yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja sasaran.
2. Penetapan target relevan dengan indikator kinerjanya, logis dan berdasarkan baseline data yang jelas.

Kegiatan teknis pelaksanaan pengelolaan SDA Balai Besar Wilayah Sungai Citarum diukur dari indikator kinerja output sebagai berikut:

1. Jumlah waduk/embung/situ/bangunan penampung air lainnya yang dibangun.
2. Jumlah waduk, situ dan bangunan penampung air lainnya yang direhabilitasi.
3. Jumlah waduk, situ dan bangunan penampung air lainnya yang dioperasikan dan dipelihara.
4. Jumlah kawasan sumber air yang dilindungi/ dikonservasi.
5. Jumlah jaringan irigasi yang dibangun/ ditingkatkan.
6. Jumlah jaringan irigasi yang direhabilitasi.
7. Jumlah jaringan irigasi yang dioperasikan dan dipelihara.
8. Jumlah jaringan irigasi air tanah yang dibangun/ ditingkatkan.
9. Jumlah jaringan irigasi air tanah yang direhabilitasi.
10. Jumlah jaringan tata air tambak yang dibangun/ ditingkatkan.
11. Jumlah jaringan tata air tambak yang direhabilitasi.
12. Jumlah jaringan tata air tambak yang dioperasikan dan dipelihara.
13. Jumlah sarana/ prasarana penyediaan air baku yang dibangun/ ditingkatkan.



14. Jumlah sarana/ prasarana penyediaan air baku yang direhabilitasi.
15. Jumlah sarana/ prasarana penyediaan air baku yang dioperasikan dan dipelihara.
16. Panjang sarana/ prasarana pengendalian banjir yang dibangun.
17. Panjang sarana/ prasarana pengendalian banjir yang direhabilitasi.
18. Panjang sarana/ prasarana pengendalian banjir yang dioperasikan dan dipelihara.
19. Panjang bangunan pengaman pantai yang dibangun.
20. Panjang bangunan pengaman pantai yang diperbaiki.
21. Panjang bangunan pengaman pantai yang dipelihara.
22. Jumlah pola dan rencana pengelolaan SDA WS.
23. Tingkat ketersediaan data dan informasi SDA.

IV.2 Kerangka Pendanaan

Tuntutan pengelolaan sumber daya air di Balai Besar Wilayah Sungai Citarum menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun namun hal ini belum diimbangi dengan pendanaan yang dibutuhkan. Diperlukan pengelolaan secara cermat terkait ketersediaan dana. Pengelolaan yang cermat dilakukan dengan menyusun skala prioritas anggaran, alokasi anggaran harus difokuskan pada program dan kegiatan yang memegang peranan penting dalam pencapaian prioritas pengelolaan SDA terpadu.

Untuk itu kerangka pendanaan pengelolaan SDA di Balai Besar Wilayah Sungai Citarum diarahkan sebagai berikut :

1. Sumber pendanaan adalah APBN yang terdiri atas Rupiah Murni (RM), Pinjaman / Hibah Luar Negeri (PHLN), serta Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
2. Penyusunan program dan anggaran berdasarkan kriteria prioritas yang ditetapkan sesuai dengan sasaran strategis nasional.

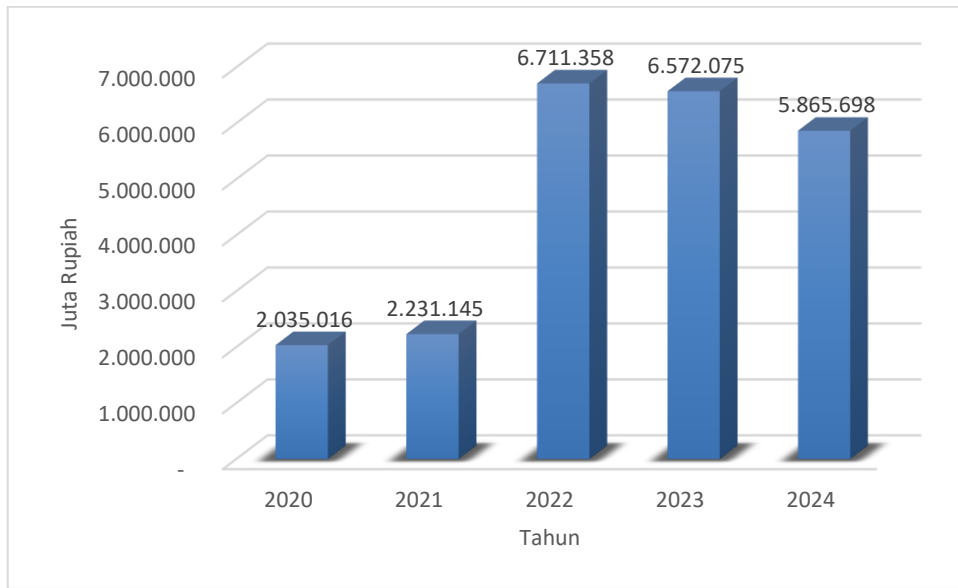
Alokasi pendanaan yang dibutuhkan untuk Balai Besar Wilayah Sungai Citarum selama kurun waktu 2020 – 2024 sebesar Rp. 23.415.291.826.000,00 (Dua Puluh Tiga Trilyun Empat Ratus Lima Belas Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Juta



Delapan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah) dengan rincian alokasi kebutuhan dana masing – masing Tahun Anggaran sebagai berikut :

1. Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 2.035.016.000,00
2. Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 2.231.145.000,00
3. Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 6.711.358.000,00
4. Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 6.572.075.000,00
5. Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 5.865.698.000,00

Target kinerja dan kerangka pendanaan di Balai Besar Wilayah Sungai Citarum 2020 – 2024 dapat dilihat pada Lampiran IV.



Gambar IV.1. Kebutuhan Pendanaan BBWS Citarum 2020-2024

IV.3 Identifikasi Resiko

Dalam pelaksanaannya, arah kebijakan dan strategi yang dituangkan ke dalam target-target kinerja sebagaimana ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) Balai Besar Wilayah Sungai Citarum 2020-2024, diidentifikasi terdapat beberapa risiko seperti pada Tabel IV.1 berikut ini.



Tabel IV.1. Identifikasi Resiko Pencapaian Target Renstra Balai Besar Wilayah Sungai Citarum

No.	Pernyataan Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak pada Capaian Tujuan	Skor Kemungkinan Terjadi	Skor Dampak	Total Skor (6x7)	Ranking
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Penyediaan Air Baku	KPI,PJPA, OP	Pembebasan lahan yang akan digunakan dalam pembangunan	Pelaksanaan pembangunan akan terlambat	3	3.5	10.5	3
			Data alokasi air yang belum akurat	Volume kebutuhan air tidak terpenuhi	3	3.5	10.5	3
			Penolakan warga pada pembangunan bendungan	Pelaksanaan pembangunan akan terlambat	2.5	3.5	8.8	8
2	Penyediaan sarana prasarana pengendali daya rusak	KPI, PJSA, OP	Pembebasan lahan yang akan digunakan dalam pembangunan	Pelaksanaan pembangunan akan terlambat	3	3.5	11.4	1
			Pembuangan sedimentasi sungai	Proses pelaksanaan kegiatan terhambat	3.3	3.5	9.6	6
			Penyediaan dana yang tidak terpenuhi	Proses pelaksanaan kegiatan terhambat	2.5	3.5	7.9	12
3	Peningkatan kapasitas tampung air	KPI, PJSA	Pembebasan lahan yang akan digunakan dalam pembangunan	Pelaksanaan pembangunan akan terlambat	2.5	3.25	10.6	2



No.	Pernyataan Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak pada Capaian Tujuan	Skor Kemungkinan Terjadi	Skor Dampak	Total Skor (6x7)	Ranking
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Keterlambatan penyelesaian Detail Engineering Desain (DED)	Pelaksanaan pembangunan akan terlambat	2.5	3.5	8.8	8
			Potensi dan kebutuhan belum teridentifikasi	volume target belum memiliki dasar yang jelas	2.5	3.5	8.8	8
			Penyediaan dana yang tidak terpenuhi	Proses pelaksanaan kegiatan terhambat	2.5	3.5	8.8	8
4	Peningkatan layanan air irigasi	PJPA	kebutuhan daerah layanan irigasi yang belum teridentifikasi secara tepat	pemberian air ke saluran irigasi tidak optimal	1.8	3.5	6.1	14
			Penyediaan dana yang tidak terpenuhi	Proses pelaksanaan kegiatan terhambat	3	3.5	10.5	3
5	Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan	OP	Penyediaan dana yang tidak terpenuhi	Proses pelaksanaan kegiatan terhambat	2.8	3.5	9.6	6
			Potensi dan kebutuhan belum teridentifikasi	volume target belum memiliki dasar yang jelas	2	3.5	7	13



BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Balai Besar Wilayah Sungai Citarum merupakan penajaman target-target yang akan dicapai sebagai konsekuensi logis dari adanya perubahan lingkungan strategis termasuk didalamnya terdapat Direktif Presiden yang harus diakomodir sebagai kebutuhan *new initiatives*. Rencana Strategis (Renstra) ini menjadi dasar penyelenggaraan Program Pengelolaan SDA bagi setiap unit di lingkungan Direktorat Jenderal SDA, dalam rangka mencapai sasaran - sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Balai Besar Wilayah Sungai Citarum siap melaksanakan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra ini dengan mengedepankan strategi peningkatan koordinasi, konsolidasi, dan sinergi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dengan Dunia Usaha agar keseluruhan sumber daya yang ada dapat digunakan secara optimal dan dapat mencapai kinerja yang maksimal dalam rangka meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan infrastruktur yang lebih merata untuk 5 tahunan (2020-2024). Oleh sebab itu diperlukan kerangka peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar bagi penyelenggaraan pembangunan selanjutnya yang lebih terpadu dan efektif dengan mengkedepankan proses partisipatif sehingga dapat dan menghasilkan output dan outcome yang optimal dalam pemenuhan berbagai kebutuhan Sumber Daya Air guna lebih mensejahterakan masyarakat khususnya di Provinsi Jawa Barat maupun secara Nasional.

Rencana strategis (Renstra) ini berlaku dalam rentang waktu 5 Tahun yaitu mulai dari Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Tahun Anggaran 2024 yang selanjutnya akan dilakukan revisi (jika dibutuhkan) dan penyusunan kembali untuk Renstra yang baru dimulai pada tahun ke-empat pelaksanaan Renstra ini.



LAMPIRAN